

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM PERTANIAN ORGANIK

(studi pada Dinas Pertanian Kabupaten Jombang)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Gelar Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

RIZAL PAHLEVI

NIM: 145030101111044



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

PROGRAM STUDI ILMU ADMINITRASI PUBLIK

MALANG

2018



MOTTO

"Keyakinan Akan Mengalahkan Kegagalan

Semakin Besar Kita Yakin Semakin Besar Kita Akan

Meraih Kesuksesan."

(Rizal Pahelvi)



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Implementasi Sistem Pertanian Organik (Studi pada
Dinas Pertanian Kabupaten Jombang)

Disusun oleh : Rizal Pahlevi

NIM : 145030101111044

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Konsentrasi/Minat : -

Malang, 18 Mei 2018

Ketua Komisi Pembimbing,

Anggota Komisi Pembimbing



Sukanto Drs., M.S.

NIP. 195912271986011001



Drs. Stefanus Panji Rengu. M.AP

NIP. 195311131982121001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip oleh naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan serta daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia jika skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU no.20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70)

Malang, Mei 2018



Rizal Pahlevi

NIM 145030101111044

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 5 Juli 2018

Waktu : 11.00 – 12.00 WIB

Skripsi Atas Nama : Rizal Pahlevi

Judul : Implementasi Kebijakan Sistem Pertanian Organik
(Studi Pada Dinas Pertanian Kabupaten Jombang)

Dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua

Anggota

Drs. Sukanto, MS

NIP. 19591227 198601 1 001

Drs. Stefanus Pani Rengu, M.AP

NIP. 19531113 198212 1 001

Anggota

Asti Amelia Novita, S.AP, M.AP., Ph.D

NIP. 19851110 201012 2 006

HALAMAN PERSEMBAHAN

Ku Persembahkan Karyaku Kepada:

Untuk Orang Tuaku Tersayang;

Ayahanda Hartadi dan Ibunda Min Saodah

Kakak ku;

Yunita Dian Puspita

Adikku ;

Afifah Nuril Aini

Terima kasih untuk setiap doa, dukungan kasih sayang, canda tawa serta semangat selama penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini

RINGKASAN

Rizal Pahlevi, 2018, **Implementasi Kebijakan Sistem Pertanian Organik (Studi pada Dinas Pertanian Kabupaten Jombang)**, Sukanto Drs., MS. dan Stefanus Pani Rengu Drs., M.AP. 150 halaman + xv

Kabupaten Jombang memiliki area persawahan yang sangat luas, akan tetapi kondisi lingkungan dan tanah sudah dapat diatakatan tercemar oleh penggunaan bahan-bahan kimia yang digunakan selama melakukan proses pertanian. Dinas Pertanian Kabupaten Jombang mempunyai kebijakan yang terkait dengan landasan hukum Peraturan Menteri nomor 64 tahun 2013 tentang sistem pertanian organik. Implementasi kebijakan pertanian organik ini diharapkan mampu untuk mengurangi kerusakan alam dan kesuburan tanah yang diakibatkan oleh penggunaan pupuk kimia yang berlebihan. Serta dengan menggunakan pertanian organik mempunyai manfaat yang dirasakan oleh petani.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui model interaktif oleh Miles, Huberman dan Saldana. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah Implementasi kebijakan sistem pertanian organik sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan dari pertanian organik.

Dalam penelitian ini, peneliti menyarankan perlu adanya penambahan atau usaha yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Jombang terkait pemahaman terhadap seluruh petani yang ada di Kabupaten Jombang mengingat tujuan dari Dinas Pertanian Kabupaten Jombang adalah menjadikan seluruh wilayah pertanian Kabupaten Jombang menjadi pertanian organik. Akan tetapi sampai saat ini masih sekitar 3 hektar yang diterpkan pertanian organik.

Kata Kunci : Administrasi Publik, Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan, Pertanian Organik.

SUMMARY

Rizal Pahlevi, 2018, **Implementation Of Policy of organic farming system (Study at agriculture departement of Jombang)**, Sukanto Drs., MS. dan Stefanus Pani Rengu Drs., M.AP. 150 pages + xv

Jombang district has a vast area of rice fields, but environmental and soil conditions can already be said to be contaminated by use of chemicals used during the farming process. The agriculture service of district Jombang has a policy that is related to the legal basis of Ministerial Regulation number 64 of the year 2013 on organic farming system. The implementation of organic agriculture policy is expected to be able to reduce the natural damage and soil fertility caused by excessive use of chemical fertilizers. And by using organic farming has many benefits perceived by farmers.

The research uses descriptive research type with qualitative approach through interactive model by Miles, Huberman and Saldana. The conclusion of the results of this study is the implementation of organic system policy is in accordance with the principles and objectives of organic agriculture

In this study, researchers suggest the need for an addition or business undertaken by the agriculture department of Jombang related understanding of all farmers in Jombang District considering the purpose of the agricultural service District of Jombang is to make the entire agricultural area of Jombang regency into organic farming. But until now still 3 hectares applied by organic farming.

Keyword : Public Administration, Public Policy, Policy Implementation, Organic Agriculture.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan berkah atas segala karunia yang diberikan kepada penulis menyelesaikan laporan skripsi berjudul **“Implementasi Sistem Pertanian Organik ”**. Sholawat serta salam selalu tucurahkan kepada Junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikutinya hingga akhir kelak.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam menempuh ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, peneliti ingin menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Drs. Andi Fefta Wijaya, MDA., Ph.D, selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Brawijaya Malang.
3. Fadillah Amin, Dr., M.AP., Ph.D selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Bapak Sukanto Drs., M.S selaku Ketua Komisi Pembimbing dan Stefanus Pani Rengu Drs., M.AP. yang telah meluangkan waktu, memberikan pengarahan serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sebagai bekal untuk kemudian hari.
6. Bapak dan Ibu Pegawai dilingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang yang telah memberikan izin serta bantuan kepada peneliti dalam penyusunan skripsi ini.
7. Terimakasih terhadap Fauzi Ripda S.AP dan Selvi Oktavianti S.AP. yang menjadikan motivasi tersendiri untuk saya.
8. Manis Manja Grup yang selalu menyemangati, mendukung dan mendoakan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Mas Mbeng, Abud, Mas Jul, Irpan, Azmi yang mendukung dari awal hingga akhir walaupun di warung kopian
10. Terima kasih rekan-rekan IMJ Andri, Anggi, Ella, Alvin, Adit, Titus, Nurul, Yudha, Riko, Nadyah, dan lain-lain sudah memberikan suasana kekeluargaan di tanah rantau.
11. Andre, Mas Erwan, Ipung, Mandra, Krisna, Taufik, Mas Yudha yang selalu mendoakan dan mendukung dalam menyelesaikan skripsi saya.
12. Dan terimakasih teman-teman lain yang tidak bisa saya sebutkan semuanya yang telah mensupport saya untuk menyelesaikan skripsi saya.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang membutuhkan saran dan kritik dari pembaca agar dapat menjadi lebih baik. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| MOTTO..... | ii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | iii |
| TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI..... | iv |
| PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI..... | v |
| RINGKASAN | vi |
| SUMMARY..... | vii |
| KATA PENGANTAR..... | viii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| DAFTAR TABEL..... | xii |
| DAFTAR GAMBAR..... | xiv |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 9 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 9 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 9 |
| E. Sistematika Penelitian..... | 10 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | |
| A. Administrasi Publik | |
| 1. Pengertian Administrasi Publik..... | 12 |
| B. Kebijakan Publik | |
| 1. Pengertian Kebijakan Publik..... | 13 |
| 2. Pengertian Implementasi Kebijakan | 15 |
| 3. Model Implementasi Kebijakan..... | 17 |
| C. Pertanian Organik | |
| 1. Pembangunan Pertanian | 23 |
| 2. Pengertian Pertanian Organik | 34 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Jenis Penelitian..... | 37 |
| B. Fokus Penelitian..... | 38 |
| C. Lokasi dan Situs Penelitian..... | 39 |
| D. Jenis dan Sumber Data..... | 40 |
| E. Teknik Pengumpulan Data..... | 41 |
| F. Instrumen Penelitian..... | 43 |
| G. Analisis Data..... | 44 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|-----|
| A. Gambaran Umum Kabupaten Kabupaten Jombang | |
| 1. Gambaran Umum Kabupaten Jombang..... | 47 |
| 2. Letak dan Kodisi Geografis Kabupaten Jombang..... | 48 |
| 3. Visi Misi Kabupaten Jombang..... | 49 |
| 4. Lambang Daerah Kabupaten Jombang | 49 |
| B. Gambaran Umum Dinas Pertanian Kabupaten Jombang | |
| 1. Profil Dinas Pertanian Kabupaten Jombang..... | 51 |
| 2. Visi dan Misi Dinas Pertanian Kabupaten Jombang..... | 52 |
| 3. Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Jombang..... | 53 |
| 4. Sumber Daya Manusia Dinas Pertanian Kabupaten Jombang..... | 55 |
| 5. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Jombang..... | 55 |
| 6. Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Jombang..... | 58 |
| C. Penyajian Data | |
| 1. Implementasi Kebijakan Sistem Pertanian Organik di Kabupaten Jombang | |
| a. Implementasi Kebijakan Sistem Pertanian Organik Menurut Van Matter dan Van Horn | 59 |
| b. Ukuran-ukuran Dasar dan Tujuan-Tujuan Kebijakan..... | 60 |
| c. Sumber Daya | 62 |
| d. Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksana | 63 |
| 2. Bentuk Kegiatan Dari Kebijakan Sistem Pertanian Organik Pada Dinas Pertanian Kabupaten Jombang | |
| a. Bentuk Kegiatan dalam Mendukung Sistem Pertanian Organik | 65 |
| b. Bentuk Kegiatan Dari Pelaksana Sistem Pertanian Organik | 68 |
| 3. Faktor-Faktor Pendukung Serta Faktor-Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Sistem Pertanian Organik | |
| a. Faktor Pendukung Internal | 90 |
| b. Faktor Pendukung Eksternal | 92 |
| c. Faktor Penghambat Internal | 94 |
| d. Faktor Penghambat Eksternal | 95 |
| D. Analisis Data | |
| 1. Implementasi Kebijakan Sistem Pertanian Organik di Kabupaten Jombang | |
| a. Implementasi Kebijakan Sistem Pertanian Organik Menurut Van Matter dan Van Horn..... | 97 |
| b. Ukuran-Ukuran Dasar dan Tujuan-Tujuan Kebijakan..... | 101 |
| c. Sumber Daya..... | 102 |

| | |
|--|-----|
| d. Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksana..... | 102 |
| 2. Bentuk Kegiatan Dari Kebijakan Sistem pertanian Organik pada Dinas Pertanian Kabupaten Jombang | |
| a. Bentuk Kegiatan Dalam Mendukung dan Pelaksanaan Sistem Pertanian Organik | 103 |
| 3. Faktor-Faktor Pendukung Serta Faktor-Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Sistem Pertanian Organik. | |
| a. Faktor Pendukung Internal | 107 |
| b. Faktor Pendukung Eksternal | 109 |
| c. Faktor Penghambat Internal | 110 |
| d. Faktor Penghambat Eksternal | 111 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan..... | 114 |
| B. Saran..... | 118 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 120 |
| LAMPIRAN..... | 123 |

DAFTAR TABEL

| NO | Judul | Halaman |
|-----------|--|----------------|
| 1 | Perkembangan Luas Lahan Sawah di Indonesia | 2 |
| 2 | Proyeksi Kebutuhan Jenis Pupuk 2010-2014..... | 4 |
| 3 | Rata-rata Harga Gabah Menurut Kualitas HPP di Tingkat Petani (rupiah/kg) 2011-2015..... | 5 |
| 4 | Nama Anggota Petani Organik Kelompok Tani Desa Banjarsari | 69 |
| 5 | Luas Lahan Sawah, Tegal, dan Pekarangan tahun 2015.... | 93 |



DAFTAR GAMBAR

| NO | Judul | Halaman |
|----|--|---------|
| 1 | Model Proses Implemenatasi Kebijakan | 19 |
| 2 | Komponen Analisis Data Model Interaktif | 46 |
| 3 | Peta Kabupaten Jombang..... | 48 |
| 4 | Lambang Daerah Kabupaten Jombang..... | 49 |
| 5 | Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Jombang. | 58 |
| 6 | Proses Alur Sistem Pertanian Organik Tentang Masa Tanam Sampai Masa Panen | 64 |
| 7 | Proses Sosialisasi di Kecamatan Bareng | 71 |
| 8 | Diklat Pembuatan Pupuk Organik | 73 |
| 9 | Proses Alur Sistem Pertanian Organik Tentang Masa Panen Sampai Penjualan | 76 |
| 10 | Proses Panen Beras Organik di Kecamatan Bareng | 78 |
| 11 | Beras Organik yang di tamping Oleh Gapoktan. | 80 |
| 12 | Proses Penggilingan | 81 |
| 13 | Proses Sortasi yang Dilakukan Oleh Ketua Kelompok Tani | 82 |
| 14 | Proses Pengemasan Beras Organik | 83 |
| 15 | Sertifikat Organik | 85 |

DAFTAR LAMPIRAN

| NO | Judul |
|----|--|
| 1 | Surat Keterangan Riset Dinas Pertanian |
| 2 | Peraturan Menteri Nomor 64 tahun 2013 tentang Sistem Pertanian Organik |
| 3 | Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Jombang 2014-2018 |
| 4 | Pertemuan Antara Pihak Dinas Pertanian dengan Petani Organik |
| 5 | Kondisi Area Persawahan Pertanian Organik |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia mempunyai potensi untuk menjadi Negara yang dapat menghasilkan jumlah pertanian pangan dalam jumlah besar, karena Indonesia merupakan Negara yang agraris serta memiliki lahan pertanian yang sangat besar. Dengan seiring berjalannya waktu banyak petani di Indonesia mulai kehilangan lahan sawah mereka untuk berladang, karena pertumbuhan manusia yang sangat pesat, kebutuhan rumah bagi masyarakat serta banyaknya pembangunan yang mengakibatkan peralihan fungsi lahan pertanian menjadi pembangunan jalan tol, kawasan industri sampai perumahan sehingga dari permasalahan tersebut lahan lahan yang produktif akhirnya tidak dapat memproduksi tanaman pangan (majalah Humus Sukses Musim Tanam Edisi 53 tahun V/ 2016). Pulau Jawa yang disebut menjadi pusat pertanian mengalami pengalihan lahan pertanian yang paling besar. Jika pengalihan lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian ini terus dibiarkan maka bukan tidak mungkin bahwa lahan pertanian menjadi semakin sempit, produksi pertanian menurun dan dalam jangka panjang Indonesia dapat mengalami defisit pangan dengan kata lain Indonesia harus bergantung kepada Negara lain untuk impor beras (majalah Humus Sukses Musim Tanam edisi 53 Tahun V/2016 halaman 6). Konvensi lahan yang tidak

terkendali disebabkan oleh pembangunan yang tidak merata serta kurang memperhatikan aspek lingkungan.

Pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat, transformasi struktur ekonomi dan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi merupakan determinan utama pengalihan lahan pertanian. Menurut Undang Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang isinya adalah perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan terhadap lahan pertanian pangan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan yang berada didalam atau diluar kawasan pertanian pangan sudah menjadi payung hukum yang sah agar tidak semudah begitu saja mengalihkan fungsi lahan. Hal ini dapat dilihat melalui tabel 1 tentang perkembangan luas lahan sawah di Indonesia Tahun 2010-2014.

Tabel 1

Perkembangan Luas Lahan Sawah di Indonesia Tahun 2010-2014

| Nomer | Tahun | Luas Lahan Sawah (Ha) |
|-------|-------|--------------------------|
| 1 | 2010 | 4.893.128,00 |
| 2 | 2011 | 4.924.172.00 |
| 3 | 2012 | 4.417.581.92 |
| 4 | 2013 | 4.817.170.00 |
| 5 | 2014 | 4.760.580.00 |

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2014 (diolah)

Kaum petani juga merasakan bukan hanya konvensi lahan dalam skala besar saja yang dapat mempengaruhi jumlah produksi pangan, tetapi faktor ketersediaan pupuk juga sangat mempengaruhi jumlah produksi pangan. Pupuk merupakan sarana dan kunci sukses dari kesuburan tanah serta keberhasilan petani dalam meningkatkan produksi tanaman pangan. Hal ini para kaum petani sangat membutuhkan pupuk untuk menunjang hasil produksi yang dicapainya. Saat ini banyak sekali permasalahan yang muncul akibat pupuk yang di gunakan oleh para petani memiliki harga yang sangat mahal, pabrik pupuk yang sudah berusia tua sehingga efesiensi produknya semakin menurun, tetapi kebutuhan pupuk semakin meningkat sehingga terjadilah kelangkaan pupuk. Pada tahun 2008 Indonesia pernah mengalami krisis kelangkaan pupuk yang dikarenakan pengawasan yang lemah dari Pemerintah Daerah di dalam pengelolaan pupuk bersubsidi (majalah HUMUS edisi 53 Tahun V 2016 halaman 9). Petani sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah untuk mendapatkan payung hukum atau legalitas yang sah agar mereka mendapatkan pupuk yang sesuai.

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan nomor 15 tahun 2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian menjelaskan bahwa pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyaluraannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan Kelompok Tani dan/ atau Petani di sektor pertanian meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA, Pupuk NPK dan Jenis Pupuk Bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian serta program khusus pertanian adalah program yang dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Dinas yang membidangi Pertanian Kabupaten/Kota atau kelembagaan petani untuk usaha budidaya tanaman yang anggarannya telah disediakan oleh Pemerintah atau lembaga lainnya.

Peran Pemerintah Daerah khususnya Dinas yang terkait diharapkan agar dapat menyalurkan pupuk bersubsidi yang sudah di jelaskan oleh Peraturan Menteri nomor 15 tahun 2013 kepada Kelompok Tani yang membutuhkan agar dapat meningkatkan jumlah produksi tanaman khususnya tanaman pangan, agar dapat menunjang ketahanan pangan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat melalui tabel 2 yaitu tentang proyeksi jenis pupuk tahun 2010-2014 dibawah ini :

Tabel 2

Proyeksi Kebutuhan Jenis Pupuk 2010-2014 (Juta Ton)

| jenis Pupuk | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Pertumbuhan (%/th) | Total |
|----------------|------|------|------|------|------|-----------------------|-------|
| Urea | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 7 | 7 | -4,2 | 35,6 |
| SP 36 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,4 | 4,3 | -4,5 | 22,1 |
| ZA | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 8,3 | 6,3 |
| KCL | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | -11,1 | 13,1 |
| NPK | 8,1 | 6 | 9,2 | 9,7 | 10,3 | 24,8 | 45,9 |

| | | | | | | | |
|---------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Organik | 11,9 | 12,2 | 12,4 | 12,7 | 13 | 8,9 | 62,2 |
| Total | 35,8 | 36,4 | 37 | 37,6 | 38,4 | 22,3 | 185,2 |

sumber : Kementrian Pertanian, 2014 (diolah)

Permasalahan kestabilan harga gabah di kalangan kaum petani juga sangat mempengaruhi produktifitas tanaman pangan di Indonesia. Program peningkatan tanaman pangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah masih menghadapi beberapa kendala, antara lain rendahnya harga gabah di tingkat petani, nilai tukar gabah/ beras sangat rendah. Kebijakan harga dasar untuk gabah menjadi sulit dipertahankan karena pemerintah tidak lagi membiayai pembelian gabah dan operasi pasar dalam jumlah besar, dan Bulog tidak lagi memegang hak monopoli. Kondisi demikian pemerintah harus mengupayakan cara-cara lain untuk menjaga kestabilan harga dan memberikan intensif berproduksi kepada petani (Suryana,2005). Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) nomor 71 tahun 2015 tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah dan Beras Diluar Kualitas Oleh Pemerintah memberikan dukungan peningkatan produktifitas padi, dan produksi padi nasional termasuk pemanfaatan sumber daya lahan dan air dalam rangka peningkatan pendapatan petani.

Bulog kesulitan menyerap harga gabah petani karena pada Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang terpatok sehingga bulog sering lebih rendah dibandingkan pasar atau tengkulak”. Kerjasama dalam pengadaan gabah dilakukan dengan pedagang besar (bukan petani). Dengan demikian bulog tidak memberikan keuntungan bagi petani. Penyerapan hasil gabah oleh lumbung kelompok masih

sedikit sehingga belum efektif mengatasi gejolak harga gabah di tingkat petani. Hal ini didukung dengan adanya tabel 3 yaitu tentang rata-rata harga gabah menurut kelompok kualitas HPP di tingkat petani (Rupiah/Kg) 2011-2015 dibawah ini.

Tabel 3.

**Rata-rata harga gabah menurut kelompok kualitas HPP di tingkat petani
(Rupiah/kg) 2011-2015**

| Tahun | Gabah Kering Giling | Gabah Kering Panen | Rendah | Harga Pembelian Pemerintah |
|-------|------------------------|-----------------------|---------|----------------------------------|
| 2011 | 4046.04 | 3543.42 | 3024.02 | 2640.00 |
| 2012 | 4463.04 | 3891.99 | 3459.10 | 3300.00 |
| 2013 | 4592.50 | 3962.78 | 3556.43 | 3300.00 |
| 2014 | 4766.58 | 4268.05 | 3693.01 | 3300.00 |
| 2015 | 5303.46 | 4646.75 | 3987.01 | 3700.00 |

sumber : Badan Pusat Statistik, 2015(diolah)

Permasalahan dalam sektor pertanian yang terjadi secara umum di Indonesia maupun di Jawa Timur juga terjadi di Kabupaten Jombang. Sektor pertanian menjadi sektor utama dalam perekonomian, namun kontribusi sektor ini lambat laun mengalami penurunan. Berkurangnya luas lahan pertanian, menurunnya kualitas tanah, bertambahnya jumlah penduduk, hambatan pupuk bersubsidi serta harga gabah

yang tidak stabil merupakan beberapa faktor yang menyebabkan menurunnya produksi dan kontribusi sektor pertanian.

Pertanian di Kabupaten Jombang mempunyai berbagai macam prestasi khususnya pada pertaniannya, dari Laboratorium pertanian sampai mengelola web dengan baik adalah sebagian dari prestasi di Kabupaten Jombang. Berbagai permasalahan yang dialami oleh kaum petani, Dinas Pertanian Kabupaten Jombang merupakan instansi yang mempunyai tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di kalangan kaum petani. Dinas Pertanian harus dapat membuat suatu kebijakan atau implementasi program untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Menurut Pressman dan Wildavsky dalam Wahab (2012:135), menyatakan bahwa sebuah kata kerja mengimplementasikan itu sudah sepantasnya terkait langsung dengan kata benda kebijakan. Proses melaksanakan kebijakan perlu mendapatkan perhatian yang seksama. Sedangkan menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab (2012:135) menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan

“ Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkan pedoman-pedoman kebijakan publik yang mencakup baik dan usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”.

Upaya implememtasi yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Jombang dalam mengatasi permasalahan pertaniain yang ada adalah dengan sistem

pertanian organik. Di dalam Sistem Pertanian Organik terdapat dua program yang mendukung sistem pertanian organik yaitu program peningkatan daya dukung lahan, air dan lingkungan pertanian serta program pengolahan lahan tanaman pertanian. Dari kedua program tersebut sangat mendukung untuk menciptakan kesuburan tanah dan kelestarian lingkungan. Pertanian organik merupakan sistem manajemen produksi yang bertujuan untuk menghindari penggunaan kimia berbahaya aktif, dalam hal ini pupuk kimia maupun pestisida kimia merupakan faktor pencemaran udara tanah dan air juga hasil produksi pertanian. Pertanian organik juga menjaga keseimbangan ekosistem dan sumberdaya alam yang terlibat langsung dalam proses produksi. Sistem pertanian organik memberikan beberapa manfaat diantaranya adalah tanaman menjadi sehat, bebas dari bahan kimia aktif, residu, baik dari akibat oleh pestisida ataupun pemupukan. Hasil produksi akan lebih sehat dan menjadikan pertanian yang mampu menjaga kelestarian alam serta menjaga keseimbangan ekosistem.

Didalam pengimplementasian sistem pertanian organik terdapat gejala atau permasalahan sehingga dapat menghambat berjalannya pertanian organik sedikitnya ada tiga permasalahan didalam implementasi sistem pertanian organik yaitu, pertanian organik dipandang sebagai sistem pertanian yang merepotkan, hal inilah yang menjadi kendala bagi Dinas Pertanian untuk menerapkan sistem pertanian organik di Kabupaten Jombang karena petani pada umumnya mengerjakan lahan sawahnya menggunakan petani konvensional yang mereka kerjakan dari tahun ke tahun sehingga untuk berubah menjadi petani organik petani konvensional menganggap sistem pertanian organik merupakan sistem yang merepotkan. Persepsi yang berbeda

mengenai hasil, maksud dari kendala ini adalah petani tidak siap untuk hasil panennya mengalami penurunan karena pada saat menggunakan pertanian organik hasil dari panen pertama pasti mengalami penurunan sehingga membuat petani menjadi khawatir. Petani mengalami saat krisis, didalam sistem pertanian yang konvensional dengan menggunakan pupuk kimia maka akan terjadi pencemaran lingkungan yang mana akan membuat tanah menjadi tidak subur, dengan adanya pertanian organik maka membuat tanah semakin subur, hal ini lah petani tidak memiliki pengetahuan sehingga mereka enggan beralih ke petani organik. dapat dikatakan bahwa sumber daya manusia dari petani konvensional masih tergolong rendah.

Berdasarkan teori-teori dan latar belakang diatas, Dinas Pertanian Kabupaten Jombang merupakan sebagai organisasi atau birokrasi publik perlu untuk melakukan inovasi guna mempermudah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta menyelesaikan permasalahan-permasalahan pertanian yang ada. Peneliti tertarik untuk mengambil judul “ **Implementasi Kebijakan Sistem Pertanian Organik (Studi pada Dinas Pertanian Kabupaten Jombang)** ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Sistem Pertanian Organik di Kabupaten Jombang ?
2. Bagaimana Bentuk Kegiatan dari Kebijakan Sistem Pertanian Organik di Kabupaten Jombang ?
3. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat didalam pelaksanaan Sistem Pertanian Organik di Dinas Pertanian Kabupaten Jombang

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengetahui, mendiskripsikan, dan menganalisis cara Dinas Pertanian Kabupaten Jombang dapat mengimplementasikan Kebijakan Pertanian Organik di Kabupaten Jombang.
2. Menganalisis Faktor pendukung dan pengahambat di dalam pelaksanaan sistem pertanian organik di Dinas Pertanian Kabupaten Jombang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat yang dapat diperoleh dari uraian tujuan penelitian diatas adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

- Penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi bahan referensi untuk menunjang dan mengembangkan dari penelitian lainnya
- Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian di bidang dan tempat yang sama

2. Manfaat Praktis

- Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan referensi bagi Dinas Pertanian Kabupaten Jombang yang berkaitan dengan kebijakan sistem pertanian organik

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai skripsi ini, dibawah di sampaikan pokok-pokok pembahasan yang ada di dalam setiap bab, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori dan pendapat para ahli serta peraturan pemerintah yang mendasar dan mengatur tentang pokok-pokok permasalahan yang berhubungan dengan penelitian. Adapun teori yang digunakan

dari penelitian ini adalah Administrasi Publik, Kebijakan Publik, Pertanian Organik.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan bagaimana penelitian akan dilaksanakan dan metode apa yang digunakan. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Serta menjelaskan fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian yaitu Kabupaten Jombang dan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang serta penyajian data dari hasil analisis yang telah ditetapkan sebelumnya yang sesuai dengan metode yang digunakan.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan-kesimpulan yang berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan serta memberikan saran atau rekomendasi terhadap masalah yang dihadapi



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. ADMINISTRASI PUBLIK

1. Pengertian Administrasi Publik

Administrasi berasal dari kata *to administer*, yang diartikan sebagai *to manage* (mengelola). Secara etimologis, administrasi dapat diartikan sebagai kegiatan dalam mengelola informasi, manusia, harta benda, hingga tercapainya tujuan yang terhimpun dalam organisasi, Sukidin (2002:4). Dalam arti sempit menurut Sukidin (2002:4) administrasi dapat dikatakan sebagai penyusunan dan pencatatan dan informasi secara sistematis dengan maksud untuk menyediakan keterangan dan informasi secara sistematis serta untuk memperolehnya kembali. Prof. Susilo Jouhar mengatakan dalam arti luas administrasi dapat dikatakan sebagai kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama.

Menurut Siagian dalam Sukidin (2002:5) mengatakan bahwa administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan pada rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang lebih ditentukan sebelumnya. Sedangkan pendapat Harris dalam Sukidin (2002:6) administrasi adalah suatu pekerjaan yang

berhubungan dengan tulis-menulis, surat-menyurat dan mencatat (membukukan) setiap perubahan/kejadian yang terjadi di dalam organisasi.

Administrasi itu pada hakikatnya menyelenggarakan, mengatur, melaksanakan, dan mewujudkan apa yang menjadi tujuan organisasi. Tidak ada administrasi, sudah dapat dipastikan bahwa tujuan organisasi akan gagal diwujudkan. Oleh karena itu, sumbangan atau kontribusi utama administrasi terhadap pembangunan selaku dikaji dari pendekatan manajemen dalam pendekatan manajemen ini, selain berbicara fungsi *planning, organizing, aktuating* dan *controlling* (POAC) sekaligus juga berbicara tentang alat-alat atau sarana (*tools of management*). Sarana-sarana manajemen untuk kajian ekonomi dan dunia usaha meliputi 6 M, yaitu *Men, Money, Methode, Materials, Machine*, dan *Market*. Sedangkan kajian untuk administrasi publik tidak sampai membicarakan *Market*. Fayol dalam Ngusmanto (2015: 58)

Dari pernyataan-pernyataan teori para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa Administrasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh dua orang maupun instansi atau lebih yang memiliki tujuan dan mencapai tujuan tersebut secara bersama-sama.

B. . KEBIJAKAN PUBLIK

1. Pengertian Kebijakan Publik.

Menurut Cochran dalam Fermana (2009:11) mengatakan bahwa inti dari arti kebijakan publik adalah studi tentang keputusan (*decision*) dan tindakan (*actions*) pemerintah dalam fokusnya terhadap kebutuhan publik, apabila memang kebijakan pemerintah tidak berpihak atau tidak fokus terhadap publik, maka masyarakat berhak menolaknya. Sedangkan menurut Parson dalam Fermana (2009 : 31) mengatakan bahwa gagasan yang jelas membedakan ruang privat dan ruang publik adalah ruang privat merupakan ruang yang tidak merugikan orang lain. Persoalan tidak merugikan orang lain selalu berubah dan berkembang seiring dengan banyaknya informasi tentang persoalan sosial dan persoalan lainnya yang berhubungan dengan konsekuensi publik dari tindakan privat, dan karenanya melahirkan desakan untuk melakukan perbaikan (*reform*). Pada intinya, proses merugikan orang lain pembahasannya bersifat dinamis dan harus diletakkan dalam debat publik yang masuk akal (*reasonable*), Fermana (2009:32).

Pada dasarnya, kebijakan publik mernitikberatkan pada “publik dan masalah-masalahnya”. Kebijakan publik membahas bagaimana isu-isu dan persoalan tersebut disusun (*constructed*), didefinisikan, serta bagaimana kesemua persoalan tersebut diletakkan dalam agenda kebijakan. Selain itu, kebijakan publik juga merupakan studi bagaimana, mengapa, dan efek dari tindakan (*action*) dan pasif (*inaction*) pemerintah atau kebijakan publik adalah studi tentang “apa yang dilakukan pemerintah, mengapa

pemerintah mengambil tindakan tersebut, dan apa akibat dari tindakan tersebut. Lebih spesifik lagi kebijakan publik adalah studi tentang keputusan dan tindakan pemerintah yang disusun untuk kepentingan publik, menurut Parson dan Cochran dalam Fermana (2009 : 34-35). Thomas R. Dye dalam Islamy (2009:18) memiliki pendapat tentang Kebijakan publik yaitu :

“Apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan dan pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya (obyektifnya) dan kebijakan Negara itu harus meliputi semua “tindakan” pemerintah jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. disamping itu sesuatu yang tidak di laksanakan oleh pemerintah pun disebut dengan kebijakan Negara. Hal ini disebabkan karena “sesuatu yang tidak dilakukan” oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh (dampak) yang sama besarnya dengan “sesuatu yang dilakukan” oleh pemerintah.

Sedangkan menurut Islamy (2009:20) mengatakan bahwa kebijaksanaan Negara adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi kepada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.

2. Pengertian Implementasi Kebijakan

Ada banyak teori tentang Implementasi diantaranya Ripley dan Franklin dalam Winarno (2014: 148) mengatakan implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan

otorites program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Istilah implementasi menunjuk pada sebuah kegiatan yang mengikuti persyaratan dan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah.

Sementara itu, Grindle dalam Winarno (2014:149) juga memberikan pandangan tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu ikatan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya “*a policy delivery system*”, dimana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, van Mater dalam Winarno (2014:149) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

Sedangkan kebijakan ada banyak definisi yang dibuat oleh para ahli untuk menjelaskan arti kebijakan. Heglo dalam Abidin (2012:6) menyebutkan kebijakan sebagai “*a course of action intended to accomplish some end*” atau sebagai tindakan yang bermaksud untuk

mencapai tujuan tertentu. Sedangkan Jones dalam Abidin (2012:6) merumuskan kebijakan sebagai suatu “ *‘behavioral consistency and repetitiveness ‘ associated with efforts in and trough government to resolve public problems*” (perilaku yang tetap dan berulang dalam hubungan dengan usaha yang ada di dalam dan melalui pemerintah untuk memecahkan masalah umum). Implementasi Kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. van Mater dalam Winarno (2014:147).

Implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979), menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa, “Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.” (Wahab, 2012:135-136).

Berdasarkan pengertian implementasi yang dikemukakan diatas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan pihak-pihak yang berwenang (pemerintah atau swasta) yang bertujuan untuk mewujudkan sesuatu yang sudah ditetapkan, implementasi dilakukan untuk melaksanakan program yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari program yang telah direncanakan.

3. Model Implementasi Kebijakan

3.1 Model Van Meter dan Van Horn

Model proses implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (2012: 158-159) menawarkan suatu model dasar, model yang mereka tawarkan mempunyai enam variabel yang membentuk kaitan (*linkage*) antara kebijakan dan kinerja (*performance*). Model seperti ini diungkapkan oleh Van Meter dan Van Horn, tidak hanya menentukan hubungan-hubungan antar variabel-variabel bebas dan variabel terkait mengenai kepentingan-kepentingan, tetapi juga menjelaskan hubungan-hubungan antara variabel-variabel bebas. Variabel-variabel tersebut dijelaskan oleh Van Meter dan Van Horn sebagai berikut :

a. Ukuran-Ukuran Dasar dan Tujuan-Tujuan Kebijakan

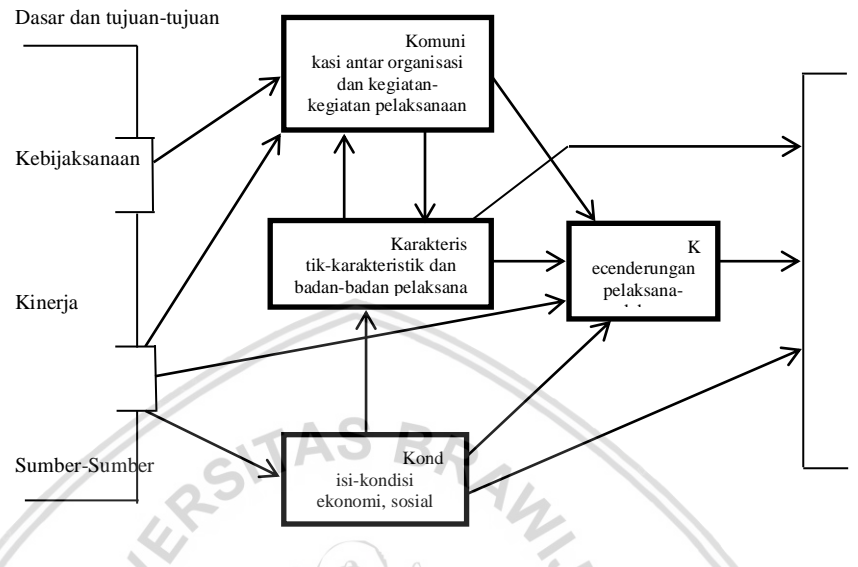
Variabel ini didasarkan pada kepentingan utama terhadap faktor-faktor yang menentukan kinerja kebijakan. Menurut Van Meter dan Van horn, identifikasi indikator-indikator kinerja merupakan tahap

yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Indikator-indikator kinerja ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan.

Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan dalam menentukan studi implementasi merupakan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran suatu program yang dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak dipertimbangkan. Dalam merencanakan ukuran-ukuran dasar dan sasaran-sasaran, kita dapat menggunakan pernyataan-pernyataan dari para pembuat keputusan sebagaimana direfleksikan dalam banyak dokumen, seperti regulasi-regulasi dan garis-garis pedoman program yang menyatakan kriteria untuk evaluasi kinerja kebijakan (Winarno, 2012: 159-161).

Berdasarkan penjelasan diatas maka ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan. Ukuran-ukuran dasar adalah landasan hukum yang dijadikan sebagai acuan untuk membuat kebijakan dan tujuannya adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

Ukuran-ukuran



Gambar 1 : Model Proses Implementasi Kebijakan

Sumber : Budi Winarno 2012 : 160 dalam Van Meter dan Van Horn.

b. Sumber-Sumber Kebijakan

Proses implementasi kebijakan yang selanjutnya adalah sumber-sumber yang tersedia. Sumber-sumber layak mendapat perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber-sumber yang dimaksud mencakup dana atau perangsang (*incentive*) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif.

Empat faktor tambahan lain yang tercakup dalam model proses implementasi kebijakan seperti yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn adalah komunikasi antar organisasi dan kegiatan-

kegiatan pelaksanaan, karakteristik-karakteristik badan-badan pelaksana, lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang mempengaruhi yurisdiksi atau organisasi implementasi, dan kecenderungan (*disposition*) para pelaksana (*implementors*) (Winarno, 2012: 161).

Dari penjelasan diatas maka yang dimaksudkan sumber-sumber kebijakan adalah hal yang mendukung untuk melaksanakan atau mengimplementasikan kebijakan, seperti halnya sumber dana, sumber daya manusia dan sarana-prasarana

c. Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan

Komunikasi antara organisasi-organisasi merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit. Dalam meneruskan pesan-pesan ke bawah dalam suatu organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lainnya, para komunikator dapat menyimpangkannya atau menyebarkanluaskannya, baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi yang berhasil sering kali membutuhkan mekanisme-mekanisme dan prosedur-prosedur lembaga. Hal ini sebenarnya akan mendorong kemungkinan yang lebih besar bagi pejabat-pejabat tinggi (atasan) untuk mendorong pelaksana (pejabat-pejabat bawahan) bertindak dalam suatu cara yang

konsisten dengan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan (Winarno, 2012: 161-162).

Dari penjelasan diatas maka dapat dikatakan bahwa untuk menjadikan implementasi yang baik tentunya diperlukan komunikasi yang baik antar organisasi serta dapat memahami kebijakan yang akan di implementasikan.

d. Karakteristik Badan-Badan Pelaksana

Karakteristik badan-badan pelaksana, seperti dinyatakan oleh Van Meter dan Van Horn, maka pembahasan ini tidak bisa lepas dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan.

Van Meter dan Van Horn mengetengahkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan : (1) Kompetensi dan ukuran staf suatu badan; (2) Tingkat pengawasan hierarkis terhadap keputusan-keputusan sub-unit dan proses-proses dalam badan-badan pelaksana; (3) Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan di antara anggota-anggota legislatif dan eksekutif); (4) Vitalitas suatu organisasi; (5) Tingkat komunikasi-komunikasi “terbuka”, yang

didefinisikan sebagai jaringan kerja komunikasi horizontal dan vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu diluar organisasi; dan (6) Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan “pembuatan keputusan” atau “pelaksana keputusan” (Winarno, 2012: 166).

e. Kondisi-Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik

Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik merupakan variabel selanjutnya yang diidentifikasi oleh Van Meter dan Van Horn. Dampak kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik pada kebijakan publik merupakan pusat perhatian yang besar selama dasawarsa yang lalu. Para peminat perbandingan politik dan kebijakan publik secara khusus tertarik dalam mengidentifikasi pengaruh variabel-variabel lingkungan pada hasil-hasil kebijakan (Winarno, 2012: 167).

f. Kecenderungan Pelaksana (*Implementors*)

Kecenderungan pelaksana yang diungkapkan Van Meter dan Van Horn merupakan intensitas kecenderungan-kecenderungan pelaksana yang mempengaruhi kinerja kebijakan. Dalam keadaan seperti ini, Van Meter dan Van Horn menyarankan agar orang melihat kepada peran pengawasan dan pelaksanaan untuk menjelaskan perbedaan-perbedaan keefektifan implementasi. Oleh karena itu, para pengkaji implementasi kebijakan harus mengumpulkan banyak

individu yang berasal dari unsur kecenderungan yang beragam (Winarno, 2012: 168-169).

3.2 Model Grindle

Model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan maka implementasi kebijakan dilakukan. Isi kebijakan mencakup :

- Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan
- Jenis manfaat yang akan dihasilkan
- Derajat perubahan yang diinginkan
- Kedudukan pembuat kebijakan
- (siapa) pelaksanaan program
- Sumberdaya yang dikerahkan

Sementara itu konteks implementasinya adalah :

- Kekuasan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat
- Karakteristik lembaga dan penguasa
- Kepatuhan dan daya tanggap.

(Wibawa, 1994; Grindle, 1980)

C. Pertanian Organik

1. Pembangunan Pertanian

1.1 Pendekatan Teori Pembangunan Pertanian

Pembangunan pertanian menurut Nuhfil Hanani A.R(2003: 75) mengatakan bahwa pembangunan pertanian harus mengantisipasi tantangan demokratisasi dan globalisasi untuk dapat menciptakan sistem yang adil serta harus diarahkan untuk mewujudkan masyarakat sejahtera khususnya petani melalui pembangunan sistem pertanian dan usaha pertanian yang mapan. Sedangkan menurut Jabat Tarik Ibrahim (2003:76) mengatakan bahwa pembangunan sistem pertanian merupakan pembangunan yang mengintegrasikan pertanian dengan industri dan jasa terkait dalam suatu kluster industri yang mencakup usaha tani, pemasaran, pengolahan, serta jasa. Sedangkan menurut Imam Harjanto (2011:87) mengatakan bahwa teori pembangunan pertanian berupaya untuk menjelaskan kekuatan-kekuatan yang ada dalam masyarakat khususnya masyarakat desa untuk melakukan perubahan-perubahan dibidang pertanian, teori permbangunan pertanian berusaha untuk menjelaskan bagaimana sumber-sumber pertumbuhan dapat distimulasi dan dikombinasikan untuk menghasilkan tingkat pertumbuhan yang luas dengan berbasis pada pertanian.

Jadi dengan kata lain teori pembangunan pertanian adalah menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat bisa menikmati dan mengurangi kesenjangan sosial khususnya pada masyarakat desa yang mengandalkan pada sektor pertanian, dengan cara memaksimalkan usaha-usaha yang telah dilakukan oleh petani.

Sektor pertanian sangat penting karena sebagian anggota masyarakat di Negara-negara miskin menggantungkan hidupnya pada sektor tersebut. Jika para perencana dengan sungguh-sungguh memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya, maka satu-satunya cara adalah dengan meningkatkan kesejahteraan sebagian anggota masyarakatnya yang hidup di sektor pertanian itu. Cara ini bisa ditempuh dengan jalan meningkatkan produksi tanaman pangan dan tanaman perdagangan mereka dan atau dengan menaikkan harga yang mereka terima atas produk-produk yang mereka hasilkan. Tentu saja tidak setiap output akan menguntungkan sebagian besar penduduk pedesaan yang bergerak dibidang pertanian itu. Lahirnya sistem mekanisme, perkebunan-perkebunan besar, dan lain-lain bisa saja hanya akan menguntungkan petani-petani kaya saja, dengan kata lain, kenaikan output pertanian bukanlah merupakan syarat yang cukup untuk mencapai kenaikan kesejahteraan masyarakat pedesaan, namun itu merupakan syarat yang penting.

Sektor pertanian juga dapat merupakan sumber modal yang utama bagi pertumbuhan ekonomi modern. Modal berasal dari tabungan yang

diinvestasikan dan tabungan bersal dari pendapatan. Di Negara-negara yang paling miskin, pangsa pendapatan pertanian terhadap produk nasional mencapai 50 persen. Berarti separuh atau lebih dari produk nasional di sumbangkan oleh sektor non-pertanian, terutama industri dan perdagangan (jasa-jasa), dan sektor-sektor ini merupakan penyumbang bagi tabungan yang akhirnya digunakan untuk investasi.

Menurut Kuznets dan Todaro dalam Harjanto (2011:88), kontribusi pertanian dalam pengembangan suatu Negara adalah :

- a. Pertanian sebagai penyerap tenaga kerja
- b. Kontribusi terhadap pendapatan
- c. Kontribusi dalam penyediaan pangan
- d. Pertanian sebagai penyedia bahan baku
- e. Kontribusi dalam bentuk capital
- f. Pertanian sebagai sumber devisa

1.2 Tahap Pengembangan Kapasitas Pertanian

Menurut Harjanto (2011:88) ada tiga tahapan pengembangan kapasitas di dalam pertanian, tahap pertama adalah pertanian tradisional, tahap kedua pertanian tradisional menuju pertanian modern dan pertanian modern.

a. Pertanian Tradisional (subsisten)

Dalam pertanian tradisional, produksi pertanian dan konsumsi sama banyaknya dan hanya satu atau dua macam tanaman saja (biasanya jagung atau padi) yang merupakan sumber pokok bahan makanan. Produksi dan produktifitasnya rendah karena hanya menggunakan peralatan yang sangat sederhana. Penanaman modal sangat sedikit, sedangkan tanah dan tenaga kerja manusia merupakan faktor yang dominan. Kegagalan panen karena hujan/banjir, atau kurang suburnya tanah, atau karena tindakan pemerasan oleh para rentenir merupakan hal yang sangat ditakuti oleh para petani. Para petani biasanya hanya menggarap tanah sebanyak yang bisa digarap oleh keluarganya, tanpa memerlukan tenaga bayaran, walaupun ada juga petani yang mempekerjakan buruh yang tidak mempunyai tanah. Keadaan lingkungan sangat statis, terbatasnya teknologi, sistem kelembagaan sosial yang kaku, pasar-pasar terpencar jauh serta jaringan komunikasi antara daerah pedesaan dan perkotaan yang kurang memadai cenderung akan menghambat perkembangan produksi.

b. Pertanian Tradisional menuju Pertanian modern

Suatu tindakan tidak realistis jika mentransformasikan secara cepat suatu sistem pertanian tradisional ke dalam sistem pertanian modern. Upaya untuk mengenalkan tanaman perdagangan dalam pertanian

tradisional sering kali gagal dalam membantu petani untuk meningkatkan taraf hidupnya. Menggantungkan diri pada tanaman perdagangan bagi para petani kecil lebih mengundang resiko daripada pertanian subsistem (tradisional) murni karena resiko fluktuasi harga menambah keadaan menjadi lebih tidak menentu. Oleh karena itu penganeekaragaman pertanian merupakan suatu langkah pertama yang logis dalam masa transisi dari pertanian subsistem (tradisional) ke pertanian modern (komersial). Pada tahap ini, tanaman-tanaman pokok tidak lagi mendominasi produk pertanian, karena tanaman perdagangan yang baru seperti buah-buahan, kopi, teh dan lain-lain sudah mulai dijalankan dengan usaha pertanian yang sederhana. Kegiatan-kegiatan baru meningkatkan produktivitas tanaman yang sebelumnya sering terjadi pengangguran tidak kentara.

c. Pertanian Modern.

Pertanian modern menggambarkan tingkat pertanian yang paling maju. Keadaan demikian bisa dilihat di negara-negara industri yang sudah maju. Pertanian modern ini berkembang sebagai respon terhadap dan sejalan dengan pembangunan yang menyeluruh di berbagai bidang lain dalam ekonomi nasional. Kenaikan standar hidup, kemajuan biologis, dan teknologis serta perluasan pasar-pasar nasional

dan internasional merupakan motor yang penting bagi pembangunan ekonomi nasional.

Dalam pertanian modern, pengadaan pangan untuk kebutuhan sendiri dan jumlah surplus yang bisa dijual, bukan lagi merupakan tujuan pokok. Keuntungan komersial murni merupakan ukuran keberhasilan serta hasil maksimum per hektar dari hasil upaya manusia diantaranya irigasi, pupuk, pestisida, bibit unggul dan lain-lain, dan sumber daya alam merupakan tujuan kegiatan pertanian ini. Dengan kata lain seluruh produksi diarahkan untuk keperluan pasar.

Dari ketiga pernyataan diatas maka pertanian tradisional merupakan pertanian yang produktifitasnya masih tergolong rendah karena menggunakan alat yang sangat sederhana, sedangkan pertanian tradisional menuju pertanian modern merupakan pertanian yang mencoba digunakan untuk mengubah pertanian tradisional dengan pertanian modern yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidupnya, sedangkan pertanian modern merupakan pertanian yang sudah digunakan pada negara industri yang seluruh hasil produksi diarahkan untuk keperluan pasar.

1.3 Pengembangan Pertanian dengan Pendekatan Model

Pengembangan pertanian dengan pendekatan model menurut Harjanto (2011:95-97) ada 4 pendekatan yang digunakan yaitu :

a. *The Conservation Model*

Karakteristik kunci teknik konservasi meliputi :

- Input yang dihasilkan oleh pertanian sendiri.
- Ada batas pada hasil

b. *The Urban Impact Model (or location model)*

Prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam *The Urban Impact Model* adalah :

- Pembangunan ekonomi terjadi dalam sebuah matriks lokasi yang sudah tertentu
- Matriks lokasi merupakan pusat pertumbuhan utamanya adalah industri-perkotaan.
- Organisasi ekonomi yang sudah ada berada dekat dengan pusat pembangunan ekonomi tertentu juga bekerja dengan baik dalam bidang pertanian pada lokasi yang masih berhubungan dengan pusat dan bekerja kurang memuaskan pada bidang pertanian yang terletak di pinggiran.

Konsep kunci yang diterapkan adalah :

- Pertanian harus mampu mengubah kombinasi input.

- Pertanian harus mampu menanggapi perubahan permintaan

Dalam model ini terdapat proses pertumbuhan pertanian dengan cara :

- Mengadopsi masukan baru seperti teknik-teknik.
- Memperoleh informasi baru yang akan digunakan sebagai masukan.
- Mempelajari permintaan pasar.

c. *The Diffusion Model*

Prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam *The Diffusion Model* adalah :

- Teori Difusi meliputi upaya mentransferkan teknologi dan pengetahuan khususnya bidang pertanian dari DCs (Negara berkembang) ke LDCs (Negara terbelakang)
- Transfer pengetahuan telah menghasilkan beberapa perbaikan dalam produktivitas pertanian di LDCs (Negara Terbelakang) tetapi keberhasilan transfer teknologi belum memperlihatkan hasil. Kondisi ini mungkin disebabkan

oleh adanya perbedaan yang nyata dalam lingkungan fisik di mana teknologi akan diterapkan.

- Ada beberapa keuntungan yang sepenuhnya bisa didapat dengan memanfaatkan teknologi dan pengetahuan yang sudah ada namun teknologi dan pengetahuan yang baru tetap diperlukan dan penting untuk melakukan perbaikan lebih lanjut untuk meningkatkan produktivitas.
- Hubungan antara sesama petani itu juga penting dalam rangka transfer teknologi dan pengetahuan ekonomi yang sudah ada dari petani progresif kepada petani tertinggal untuk meningkatkan produktivitas.
- Ide ini merupakan pembangunan sistem pertanian secara luas.

d. *The high-Payoff Input Model*

Prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam *The High Payoff Input Model* adalah :

- Meningkatkan sumber daya yang dimiliki saat ini.
- Berasal dari luar sektor pertanian.
- Didukung dengan pendidikan.
- Bentuknya dapat digunakan petani.
- Harga di petani mampu.

Implikasi kebijakan dengan penerapan *The High Payoff*

Input Model

- Berinvestasi pada penelitian untuk memperoleh teknologi baru yang didasarkan pada kondisi lokal.
- Berinvestasi pada kapasitas industri lokal untuk mengembangkan, menghasilkan, dan memasok baru.
- Berinvestasi sesuai dengan kapasitas petani dengan menggunakan masukan seperti pendidikan dasar umum, pendidikan orang dewasa, dan sistem penyuluhan.
- Memberikan petani masukan dan teknologi baru perbaikan (bibit, pupuk, pestisida, dan irigasi.)
- Teori ini didasarkan pada argumen bahwa petani sudah bertindak rasional dalam menggunakan sumber daya yang mereka miliki secara efektif dan efisien meliputi relokasi sumber daya tidak akan mengarah ke peningkatan produktivitas dan petani membutuhkan masukan baru yang memberikan hasil yang bagus dan teknologi untuk meningkatkan produksi
- Aplikasi teori ini menghasilkan peningkatan produksi pangan (beras, gandum, dan jagung) yang besar di Asia dan Amerika latin.

- Masa-masa selanjutnya, manfaat dari *high-payoff* dan teknologi terutama masalah distribusi telah memperlihatkan hasil.

1.4 Strategi Modernisasi Pertanian.

Strategi Modernisasi Pertanian menurut Imam Harjanto (Harjanto, 2011: 104-108) ada tiga bentuk antara lain :

a. Perubahan Teknologi dan Inovasi

Ada dua sumber inovasi teknologi yang bisa meningkatkan hasil-hasil pertanian. Kedua sumber ini mempunyai implikasi-implikasi yang sangat berbeda bagi pembangunan pertanian. Yang pertama adalah pengenalan terhadap mekanisme pertanian sebagai ganti tenaga kerja manusia. pengenalan terhadap peralatan untuk menghemat tenaga semacam itu (misal traktor-traktor besar) akan mempunyai pengaruh sangat besar terhadap volume output setiap tenaga kerja, terutama tanah yang ditanami itu luas dan tenaga kerja masih sedikit. Inovasi yang kedua yaitu inovasi biologis (seperti bibit unggul) dan kimiawi (pupuk buatan, pestisida, dan lain-lain) merupakan usaha untuk memperbaiki mutu tanah yang ada dengan meningkatkan hasil (produktivitas) perhektar walaupun memang tidak langsung

meningkatkan output setiap tenaga kerja. Usaha-usaha ini secara teknologis bersifat netral, artinya secara teoritis dapat dipakai pertanian besar maupun pertanian kecil dengan efektivitas yang sama.

b. Perbaikan Pola Pemilik Tanah

Struktur pertanian dan pola penggunaan tanah perlu disesuaikan dengan tujuan ganda, yaitu meningkatkan produksi pangan dan meningkatkan pemerataan keuntungan bagi petani secara luas. Pertanian dan pembangunan desa yang menguntungkan rakyat kecil hanya bisa tercapai melalui usaha bersama antara pemerintah dengan semua petani, bukan hanya dengan petani kaya saja. adapun langkah pertama dalam usaha bersama ini adalah pemberian dan perbaikan hak-hak pengguna tanah kepada masing-masing petani. Karena apabila petani tidak mempunyai tanah maka petani tersebut jatuh miskin secara perlahan karena hutang yang menumpuk serta tidak mempunyai penghasilan.

c. Kebijakan-kebijaksanaan Penunjang

Seluruh keuntungan dari pembangunan usaha tani kecil tidak akan bisa dicapai jika pemerintah tidak menciptakan kebijakan atau sistem kelembagaan yang menunjang. Sedangkan penataan kembali pola pemilikan tanah adalah

sangat penting, tetapi mungkin tidak akan bisa efektif jika tidak ada perubahan yang sesuai dengan lembaga-lembaga pedesaan yang dapat menunjang produksi, pelayanan-pelayanan yang menunjang, dan kebijaksanaan pemerintah dibidang harga untuk *input* maupun *output* pertanian.

2. Pengertian Pertanian Organik

Secara sederhana, pertanian organik didefinisikan sebagai sistem pertanian yang mendorong kesehatan tanah dan tanaman melalui berbagai praktek seperti pendaur ulangan unsur hara dari bahan-bahan organik, rotasi tanaman, pengolahan tanah yang tepat serta menghindarkan penggunaan pupuk dan pestisida sintetis (IASA dalam Gribaldi, 2009:19). Sedangkan pengertian pertanian organik menurut Peraturan Menteri Pertanian nomor 64 tahun 2013 tentang Sistem Pertanian Organik adalah Sistem manajemen produksi yang *holistic* untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan agroekosistem, termasuk keragaman hayati, siklus biologis dan aktivitas biologis tanah. Pertanian organik menekankan penerapan praktek-praktek manajemen yang lebih mengutamakan penggunaan input dari limbah kegiatan budidaya di lahan, dengan mempertimbangkan daya adaptasi terhadap keadaan/kondisi setempat. Jika memungkinkan hal tersebut dapat dicapai

dengan penggunaan budaya, metoda biologi dan mekanik, yang tidak menggunakan bahan sintetis untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam sistem.

Pertanian organik didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut (IFOAM dalam Gribaldi, 2009:20): Prinsip kesehatan, ekologi, keadilan, dan perlindungan. Pertanian organik harus didasarkan pada sistem dan siklus ekologi kehidupan. Bekerja meniru dan berusaha memelihara sistem dan siklus ekologi kehidupan. Pertanian organik harus melestarikan dan meningkatkan kesehatan tanah, tanaman, hewan, manusia dan bumi sebagai satu kesatuan dan tak terpisahkan. Pertanian organik harus membangun hubungan yang mampu menjamin keadilan terkait dengan lingkungan dan kesempatan hidup bersama. Pertanian organik harus memberikan kualitas hidup yang baik bagi setiap orang yang terlibat, menyumbang bagi kedaulatan pangan dan pengurangan kemiskinan. Keadilan memerlukan sistem produksi, distribusi dan perdagangan yang terbuka, adil, dan mempertimbangkan biaya sosial dan lingkungan yang sebenarnya.

Adapun tujuan dari pertanian organik menurut Agus Kardinan (2016 : 8) pertanian organik bertujuan untuk menciptakan agroekosistem yang optimal dan lestari berkelanjutan baik secara sosial, ekologi maupun ekonomi dan etika. Sistem pertanian organik dirancang untuk :

- Mengembangkan keanekaragaman hayati
- Meningkatkan aktivitas biologi tanah.

- Menjaga kesuburan tanah dalam jangka panjang.
- Mendaur-ulang limbah asal tumbuhan dan hewan untuk mengembalikan nutrisi ke dalam tanah sehingga meminimalkan penggunaan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui.
- Mengandalkan sumber daya yang dapat diperbaharui pada sistem pertanian yang dikelola secara local.
- Meningkatkan penggunaan tanah, air dan udara secara baik, serta meminimalkan semua bentuk polusi yang dihasilkan dari kegiatan pertanian.

Menurut Agus Kardinan (2016 : vi) setidaknya ada tiga alasan mengapa memerlukan pertanian organik. Pertama harga bibit/benih dan pupuk yang semakin hari semakin meroket harganya (mahal), hal ini disebabkan benih/bibit yang digunakan tidak dihasilkan sendiri oleh petani. Sehingga para petani tidak memiliki nilai tawar terhadap harga benih/bibit. Demikina juga dengan penggunaan pupuk, merupakan hasil pabrikasi dengan metode kimia yang dijual dengan harga melambung terlampaui tinggi. Kedua, minimnya pengetahuan petani dalam pengelolaan lahan pertanian. Mulai dari pengetahuan penyiapan lahan, system hidrologi (air), pola tanam, karakter lahan, cuaca dan kecenderungan pasar. Ketiga, menghilangnya pengetahuan dan kearifan lokal dalam mengelola lahan pertanian.

Jadi dari pengertian diatas maka alasan mengapa memerlukan pertanian organik karena harga yang sangat mahal dari benih sampai pupuk, sumber daya manusia petani yang masih kurang terhadap pengetahuan pengelolaan lahan yang baik.



BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian dibutuhkan metode penelitian yang harus disesuaikan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, Sugiyono (2016:2). Berdasarkan konsep ini, penelitian mempunyai tiga kegiatan yang tampaknya dilakukan secara berurutan yaitu, mengumpulkan data, mengolah data dan menyajikan data secara sistematis dan objektif.

Selain itu analisis penelitian dibutuhkan dalam melakukan penelitian karena dengan metode yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti mampu menemukan data yang relevan dan akurat.

A. Jenis Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, sedangkan jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan bagaimana implementasi kebijakan sistem pertanian organik di Kabupaten Jombang. Menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti dapat mengetahui faktor-faktor

pendukung dan faktor-faktor penghambat Dinas Pertanian dalam implementasi kebijakan sistem pertanian organik di Kabupaten Jombang.

Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif agar dapat mendiskripsikan keadaan subjek atau objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan. Sumber data primer di dapat dari pejabat struktural dan staf yang langsung turun ke lapangan untuk mengawasi sistem pertanian organik. Lalu teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

B. Fokus Penelitian

Menurut Sugiyono (2013 :32) mengungkapkan bahwa fokus penelian kualitatif bersifat *holistic* (menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan) sehingga penelitian kualitatif menetapkan penelitiannya berdasarkan keseluruhan situasi sosial yang diteliti yang meliputi aspek tempat, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis.

Adapun yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah:

1. Impelementasi Kebijakan Sistem Pertanian Organik di Kabupaten Jombang berdasarkan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang meliputi :
 - a) Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan.
 - b) Sumber Daya
 - c) Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana.

2. Bentuk kegiatan dari kebijakan sistem pertanian organik pada Dinas Pertanian Kabupaten Jombang meliputi :

- 2.1 Bentuk Kegiatan dalam Mendukung Sistem Pertanian Organik.

- a) Bentuk Kegiatan program daya dukung lahan, air dan lingkungan
- b) Bentuk kegiatan program pengelolaan lahan pertanian.

- 2.2 Bentuk Kegiatan dalam Pelaksanaan Sistem Pertanian Organik.

Bentuk Kegiatan Sistem Pertanian Organik.

3. Faktor-faktor pendukung serta faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan sistem pertanian organik di Kabupaten jombang.
 - a. Faktor Pendukung
 - 1) Internal
 - 2) Eksternal .
 - b. Faktor Penghambat
 - 1) Internal
 - 2) Eksternal

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan tema masalah serta fokus penelitian yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini lokasi yang dipilih adalah Kabupaten Jombang.

Alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini didasari oleh pertimbangan sebagai berikut :

1. Kabupaten Jombang memiliki area lahan persawahan yang masih luas sekitar 119.459 ha (*sumber Dinas Pertanian Kabupaten Jombang*), serta masih banyak para petani yang menanam tanaman pangan seperti padi, jagung, ubi dan lain-lain. Kabupaten Jombang juga menargetkan hasil pertanian sebagai pemasukan anggaran daerah.
2. Lokasi yang dipilih karena Dinas yang bersangkutan telah membuat kebijakan yang memudahkan kebutuhan dari seluruh petani di Kabupaten Jombang, serta Kabupaten Jombang juga sudah mendapatkan banyak penghargaan dari Pemerintah Pusat terkait program maupun kebijakan lainnya yang berkaitan dengan pertanian.

Situs penelitian menunjukan dimana sebenarnya peneliti dapat menangkap keadaan dari obyek yang akan diteliti, sehingga data-data yang diperoleh benar-benar relevan dan akurat. Situs penelitian ini adalah: Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, Jl. Soekarno-Hatta nomor 170, Mojongapit, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam proses pengumpulan data di lapangan, peneliti berusaha memperoleh data yang akurat dari narasumber dan dapat menjadi pegangan akan keakuratan dan hasil penelitian. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, data ini diamati dan dicatat untuk pertama kalinya oleh peneliti. Data primer bisa juga disebut dengan data asli atau data baru. Jadi untuk memperoleh data atau informasi yang sesuai dengan fokus penelitian, dapat dilakukan dengan wawancara secara langsung dengan pihak yang bersangkutan.

Adapun sumber data yang digunakan adalah :

- a. Rudi Priono S. P. selaku Fungsional Penyuluh
- b. Sumiran S. P. selaku PPL Pertanian
- c. Haris Khusuma selaku Petugas Pertanian Kecamatan Bareng
- d. Pak Aspandi selaku Ketua Gabungan Kelompok Tani Desa Banjarsari
- e. Bu Nanik Saryati selaku Anggota Petani Organik
- f. Pak Wartono selaku Anggota Petani Organik

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari data pendukung, yaitu melalui dokumen-dokumen yang memuat informasi yang bisa mendukung penelitian. Adapun sumber data sekunder atau pendukung penelitian ini didapat dari dokumen-dokumen (Rencana Strategis Dinas

Pertanian Kabupaten Jombang Tahun 2014-2019), laporan-laporan, arsip (Majalah Humus edisi 53 Tahun V 2016) serta Permentan nomor 64 tahun 2013 tentang Sistem Pertanian Organik pada Dinas Pertanian Kabupaten Jombang dan dari petani yang menjadi obyek penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data.

Dalam mengumpulkan data di lapangan, teknik atau metode pengumpulan data mempermudah dalam mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan fokus penelitian. Teknik atau metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah :

1. Wawancara

Wawancara adalah salah satu cara yang paling banyak digunakan untuk menghimpun data penelitian kualitatif. Wawancara dilakukan beberapa kali sesuai dengan keperluan penulis untuk mendapatkan kejelasan dan kemantapan masalah yang sedang diteliti. Sedangkan alat yang digunakan dalam wawancara adalah *interviewguide* sebagai panduan yang berisikan pokok-pokok pertanyaan yang telah dikembangkan di lapangan. Wawancara dilakukan secara terbuka atau terstruktur dengan pertanyaan yang terfokus pada permasalahan, sehingga informasi yang dikumpulkan cukup lengkap dan mendalam. Keterbukaan yang mengarah pada kelonggaran informasi ini dilakukan guna memperoleh obyektivitas dan kejujuran informan untuk memberitahukan apa yang sebenarnya.

Diawali dengan dilakukannya wawancara dengan bagian Penyuluh Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, PPL Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, Petugas Pertanian Kecamatan Bareng, hingga melakukan wawancara dengan Ketua dan Anggota Petani Organik di Desa Banjarsari Kecamatan Bareng.

2. Observasi

Metode ini merupakan cara pengumpulan dan menggunakan seluruh alat indera untuk melihat implementasi sistem pertanian organik. observasi disini diharapkan dengan adanya pengamatan akan memberikan gambaran terkait faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi sistem pertanian organik. penelitian kali ini peneliti mencoba untuk melakukan observasi dari Dinas Pertanian . Selain itu peneliti mencoba untuk observasi pada sawah yang dijadikan media organik

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar-gambar atau karya-karya monumental dari seorang. Bentuk teknik dokumentasi yang dilakukan peneliti dengan melihat beberapa data dari website resmi Dinas Pertanian Kabupaten Jombang. selanjutnya peneliti juga mendapatkan majalah-majalah tentang pertanian organik . peneliti juga mengambil gambar terkait rangkaian kegiatan yang dilakukan Dinas Pertanian

Kabupaten Jombang untuk melaksanakan sistem pertanian organik. peneliti juga mengambil gambar yang ada pada Desa Banjarsari yaitu kegiatan petani organik didalam pertanian organik.

F. Instrumen Penelitian.

Instrumen penelitian yang dikembangkan menjadi beberapa indikator yang digunakan untuk mengambil data. Instrumen yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut :

1. Pedoman wawancara, instrument ini diperlukan agar selama kegiatan pengumpulan data, peneliti mendapatkan data dari narasumber yang relevan, akurat dan tidak melenceng dari tujuan penelitian yang telah ditetapkan.
2. Pedoman observasi, instrument ini dibutuhkan karena peneliti harus mengamati langsung bagaimana peran dari Dinas Pertanian terhadap Program Pertanian Terpadu terhadap para petani.
3. Dokumentasi, Instrumen ini dibutuhkan sebagai alat bantu kegiatan wawancara agar pelaksanaan wawancara dapat berjalan dengan baik, selain itu dokumentasi juga bermanfaat sebagai alat pendukung dalam kegiatan pengumpulan data.

G. Analisis Data

Menurut Bogdan dalam Sugiyono (2016:244) mengatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan di pelajari, dan membuat keputusan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah model interaktif oleh Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2016:246-253) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas di dalam analisis data menurut Miles dan Huberman yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. Penjabaran analisis data dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data

semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data akan dibantu dengan peralatan elektronik seperti Laptop, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

2. *Data condensation*

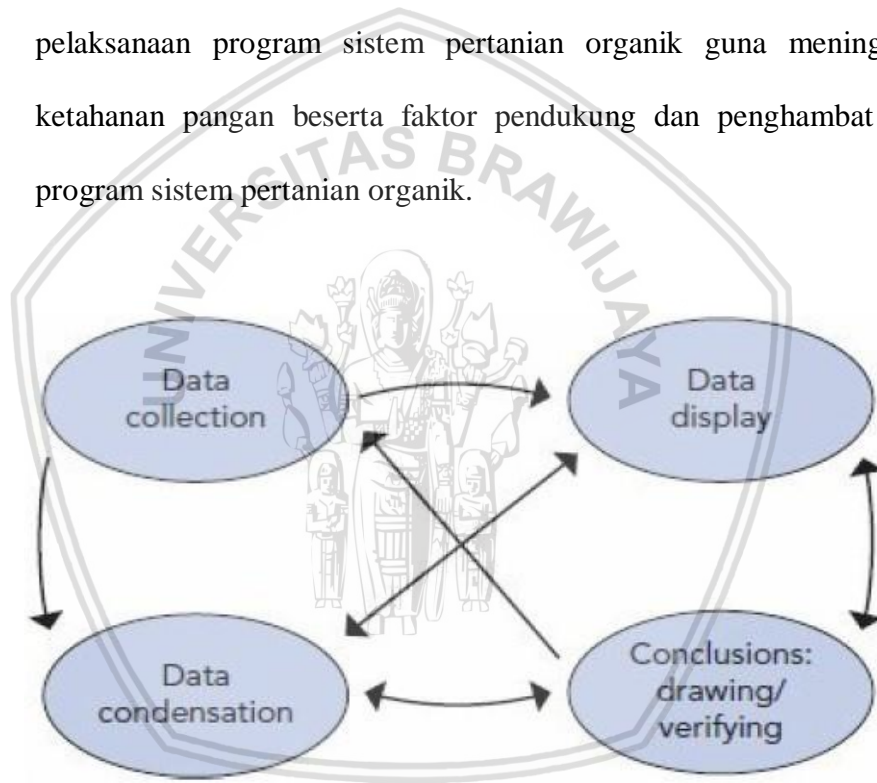
merupakan proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan atau merubah data yang telah ditemukan di lapangan berdasarkan catatan lapangan, hasil interview, dokumen, dan fakta di lapangan. Dengan kondensasi data, data akan menjadi lebih kuat.

3. Penyajian data atau display data

secara umum berarti mengorganisasi, menyusun data atau informasi sehingga memudahkan peneliti memahami makna dan suatu data yang telah didapat. Dengan mendisplay data, peneliti mendapatkan keuntungan berupa kemudahan yaitu dengan cara data yang telah diperoleh di lapangan, disederhanakan oleh peneliti dan disajikan dalam bentuk paparan data (secara paratif), gambar, dan bukan angka.

4. Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap terakhir dari model analisis data. Dalam proses ini data yang telah dikondensasi dan dirangkaikan secara sistematis (di-display) selanjutnya diambil benang merahnya sebagai kesimpulan. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini ialah kesimpulan yang berhubungan dengan fokus penelitian. Yaitu pelaksanaan program sistem pertanian organik guna meningkatkan ketahanan pangan beserta faktor pendukung dan penghambat dalam program sistem pertanian organik.



Gambar 2. Komponen Analisis Data Model Interaktif

Sumber: Miles, Huberman, dan Saldana, 2014.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Jombang

1. Gambaran Umum Kabupaten Jombang

Kabupaten Jombang adalah sebuah Kabupaten yang terletak di bagian tengah Provinsi Jawa Timur. Luas wilayahnya 1.159,50 km², dan jumlah penduduknya 1.201.557 jiwa (2010), terdiri dari 597.219 laki-laki, dan 604.338 perempuan. Pusat pemerintahan Kabupaten Jombang terletak di tengah-tengah wilayah kabupaten, memiliki ketinggian 44 meter di atas permukaan laut, dan berjarak 79 km (1,5 jam perjalanan) dari barat daya Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Jombang memiliki posisi yang sangat strategis, karena berada di persimpangan jalur lintas utara, dan selatan Pulau Jawa (Surabaya-Madiun-Solo-Yogyakarta), jalur Surabaya-Tulungagung, serta jalur Malang-Tuban.)

Jombang juga dikenal dengan sebutan Kota Santri, karena banyaknya sekolah pendidikan Islam (pondok pesantren) di wilayahnya. Bahkan ada pameo yang mengatakan Jombang adalah pusat pondok pesantren di tanah Jawa karena hampir seluruh pendiri pesantren di Jawa pasti pernah berguru di Jombang. Di antara pondok

pesantren yang terkenal adalah Tebuireng, Denanyar, Tambak Beras, Pesantren Attahdzib (PA), dan Darul Ulum (Rejoso).

Gambar 3

Peta Kabupaten Jombang



sumber: Wikipedia Kabupaten Jombang

2. Letak dan Kondisi Geografis Kabupaten Jombang

Luas wilayah Kabupaten Jombang adalah 115.950 Ha : 1.159,5 Km². Secara geografi Kabupaten Jombang terletak membentang antara 7.20' dan 7.45' .Lintang Selatan 5.20° - 5.30 ° Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Jombang berbatasan dengan wilayah kabupaten/kota :Sebelah Utara : Kabupaten LamonganSebelah Selatan : Kabupaten KediriSebelah Timur : Kabupaten MojokertoSebelah Barat :

repository.ub.ac.id

Kabupaten Nganjuk. Administrasi Pemerintahan terdiri dari 21 Kecamatan dan 301 desa, 5 kelurahan. Kecamatan yang terluas adalah kecamatan Kabuh (13.233 Ha) dan yang terkecil Kecamatan Ngusikan (34,980 Ha). Curah hujan terbesar antara 1750 s/d 2500 mm pertahun.

3. Visi Misi Kabupaten Jombang

a. VISI

" JOMBANG SEJAHTERA UNTUK SEMUA "

b. MISI

- 1) Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial dan Beragama.
- 2) Mewujudkan Layanan Dasar yang Terjangkau.
- 3) Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Merata.
- 4) Menyediakan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan.
- 5) Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik dan Bersih.

4. Lambang daerah Kabupaten Jombang

Gambar 4

Lambang Kabupaten Jombang



Penjelasan lambing Kabupaten Jombang :

a. Bentuk :

Berbentuk perisai, didalamnya berisi gambar : padi dan kapas, gerbang Mojopahit dan benteng, Balai Agung (Pendopo Kabupaten Jombang), menara dan bintang sudut lima di atasnya berdiri pada beton lima tingkat, gunung, dua sungai satu panjang satu pendek.

b. Arti Gambar :

- 1) Perisai mengandung arti alat untuk melindungi diri dari bahaya.
- 2) Padi dan Kapas berarti kemakmuran, sebagai harapan masyarakat jombang, khususnya bangsa Indonesia umumnya.
- 3) Gerbang Mojopahit berarti jaman dahulunya Jombang wilayah kerajaan Mojopahit wewengkon krajan sebelah barat.

- 4) Benteng berarti jaman dulunya Jombang merupakan benteng Mojopahit sebelah barat, hal ini menyebabkan masyarakat bermental kuat, dinamis dan kritis.
- 5) Balai Agung berarti para pejabat daerah dalam membimbing masyarakat bersifat mengayomi seperti tugas balai yang tetap berdiri tegak dan kukuh, guna memelihara persatuan/kesatuan rakyat di dalam daerahnya.
- 6) Tangga Beton Lima Tingkat berarti terus tetap berpegang teguh pada landasan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, demi persatuan kesatuan bangsa dan negara Republik Indonesia. Warna Putih berarti dalam menjalankan tugas tetap berpegang pada kesucian, sepi ing pamrih rame ing gawe.
- 7) Bintang Sudut Lima dan Menara berarti Ketuhanan Yang Maha Esa. Jombang terkenal di segala penjuru tanah air sebagai tempat yang banyak Pondok Pesantren. Pondok-pondok tersebut adalah Tebuireng, Rejoso, Denanyar, Tambak Beras dan sebagainya.
- 8) Gunung berarti Jombang selain terdiri dari daerah rendah, sebagian terdiri dari tanah pegunungan. Warna Hijau berarti banyak membawa kemakmuran.
- 9) Dua sungai berarti Kesuburan Jombang dialiri oleh 2 (dua) sungai yaitu Sungai Brantas dan Sungai Konto yang banyak membawa kemakmuran bagi daerah Jombang.

c. Arti Warna

- 1) Hijau dan Merah tua adalah warna dari perisai berarti perpaduan 2 warna Jo dan Bang (Ijo dan Abang) sama dengan Jombang.
- 2) Hijau melambangkan kesuburan, ketenangan, kebaktian kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 3) Merah melambangkan keberanian, dinamis dan kritis. Biru Langit Cerah, juga berarti kecerahan wajah rakyat yang optimis.
- 4) Coklat melambangkan warna Tanah Asli, segala sesuatu menampakkan keasliannya.
- 5) Kuning melambangkan warna keagungan dan kejayaan.
- 6) Putih melambangkan kesucian.

B. Gambaran Umum Dinas Pertanian

1. Profil

Dinas Pertanian adalah sebuah instansi pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan dan menyusun kebijakan di bidang pertanian dan melakukan pengawasan terhadap segala yang berkaitan tentang pertanian di Kabupaten Jombang. Dinas Pertanian Kabupaten Jombang terletak pada jalan Jl. Soekarno-Hatta nomor 170 dan saling berdekatan atau satu wilayah dengan Dinas Pertenakan dan Dinas Perikanan yang saling berkait satu dengan yang lainnya.

Pada tahun 2018 terdapat 210 orang/ Aparatur Sipil Negara yang mempunyai golongan berbeda. Terdapat Golongan II : 12 orang Golongan III: 78 orang Golongan IV : 12 orang Honorer : 21 orang. PPL-TBPP : 87 orang yang memiliki tugas berbeda.

usulan organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Jombang terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat membawahi (sub Bagian Umum, Sub bagian keuangan dan sub bagian penyusunan program dan pelaporan). Bidang Produksi dan Perlindungan tanaman membawahi (seksi peningkatan produksi padi dan palawija, seksi perlindungan tanaman, dan seksi peningkatan produksi hortikultura). Bidang usaha tani, sarana dan prasarana yang membawahi (seksi usaha tani dan pemasaran, seksi sarana dan prasarana dan seksi pengolahan lahan dan air). Bidang penyuluhan yang membawahi (seksi sarana dan prasarana penyuluhan, seksi pemberdayaan penyuluhan dan seksi kelembagaan jabatan fungsional). Kelompok jabatan Fungsional.

2. Visi dan Misi

Adapun visi dari Dinas Pertanian Kabupaten Jombang adalah “ Mewujudkan Petani Sejahtera Melalui Pertanian Berkelanjutan”. Arti yang terkandung di dalam pernyataan visi tersebut, ialah :

- 1) Mewujudkan adalah suatu perbuatan yang menjadikan dan sasaran yang ingin di capai benar-benar ada/ terealisasi.

- 2) Petani adalah orang yang menjalankan rangkaian kegiatan di bidang pertanian utamanya dalam berusahatani.
- 3) Sejahtera adalah kondisi dimana orang-orang yang berada di dalamnya dalam keadaan lebih baik/makmur.
- 4) Melalui adalah jalan yang harus ditempuh untuk mencapai rencana dan sasaran.
- 5) Pertanian adalah rangkaian kegiatan di bidang pertanian mulai dari hulu sampai hilir dalam upaya pembudidayaan tanaman (segala hal yang berkaitan dengan tanam-menanam), produksi dan pengolahan hasil produksinya.
- 6) Berkelanjutan adalah pelaksanaan sistem yang terintegrasi antara praktek produksi dengan pemanfaatan sumberdaya secara efisien.

Adapun misi dari Dinas Pertanian Kabupaten Jombang antara lain:

- 1) Meningkatkan kualitas Agroekosistem
- 2) Memantapkan Kelembagaan Petani dan kegiatan Penyuluhan
- 3) Meningkatkan Efisiensi Usaha Tani
- 4) Meningkatkan Ketersediaan Prasarana dan Sarana Pertanian.

3. Tujuan, Sasaran dan Strategi

Tujuan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang antara lain:

- 1) Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap petani serta aparatur tentang pentingnya pertanian organik.

- 2) Mewujudkan kelembagaan petani dan aparatur sebagai basis kegiatan petani dan aparatur.
- 3) Meningkatkan produksi melalui inovasi teknologi dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam.
- 4) Meningkatkan infrastruktur penunjang usaha tani memfasilitasi penguatan modal bagi petani dan memfasilitasi pemasaran hasil produksi petani, untuk mendapatkan harga yang layak.

Sasaran dari Dinas Pertanian Kabupaten Jombang merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai dinas pertanian selama kurun waktu jangka menengah lima tahun sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai berikut:

- 1) Sumber daya manusia petani dan aparatur memahami pertanian organik.
- 2) Berfungsinya kelembagaan kelompok tani dan aparatur.
- 3) Meningkatkan produksi dan kelestarian sumber daya alam.
- 4) Tersedia dan berfungsinya infrastruktur penunjang sesuai kebutuhan usaha tani.
- 5) Tersedianya akses bagi petani dalam memperoleh modal usaha.
- 6) Terbangunnya jaringan pemasaran hasil pertanian.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Pertanian menerapkan beberapa strategi, adalah :

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya lahan dan air
- 2) Melakukan penguatan kelembagaan kelompok tani dan penyuluhan pertanian.
- 3) Meningkatkan kemampuan SDM petani dan petugas.
- 4) Mengembangkan inovasi teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi.
- 5) Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana penunjang.

4. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan jenjang pendidikan aparatur sipil Negara yang ada pada Dinas Pertanian Kabupaten Jombang terdapat Sarjana S2 sebanyak 8 orang, Sarjana S1 sebanyak 105 orang, Diploma 3 sebanyak 33 orang, SMA sederajat sebanyak 59 orang dan SD sederajat 2 orang. Total keseluruhan sebanyak 210 aparatur sipil Negara. Berdasarkan golongan terdapat 210 orang yang dibagi sebagai berikut:

- 1) Golongan II : 12 orang
- 2) Golongan III: 78 orang
- 3) Golongan IV : 12 orang
- 4) Honorer : 21 orang.
- 5) PPL-TBPP : 87 orang.

5. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pertanian sudah ditetapkan dengan adanya Peraturan Bupati (Perbup) nomor 34 tahun 2016 yaitu tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pertanian Kabupaten Jombang diantaranya :

Pasal 5

Tugas pokok Dinas Pertanian adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang di bidang pertanian.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Pertanian mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penyusunan rencana program dan kegiatan dalam rangka penetapan kebijakan teknis di bidang pertanian;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pertanian;
- c. Pelaksanaan usaha pencegahan dan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman pangan dan hortikultura;
- d. Penyusunan dan pelaksanaan pengembangan, konservasi, rehabilitasi dan pemanfaatan lahan;

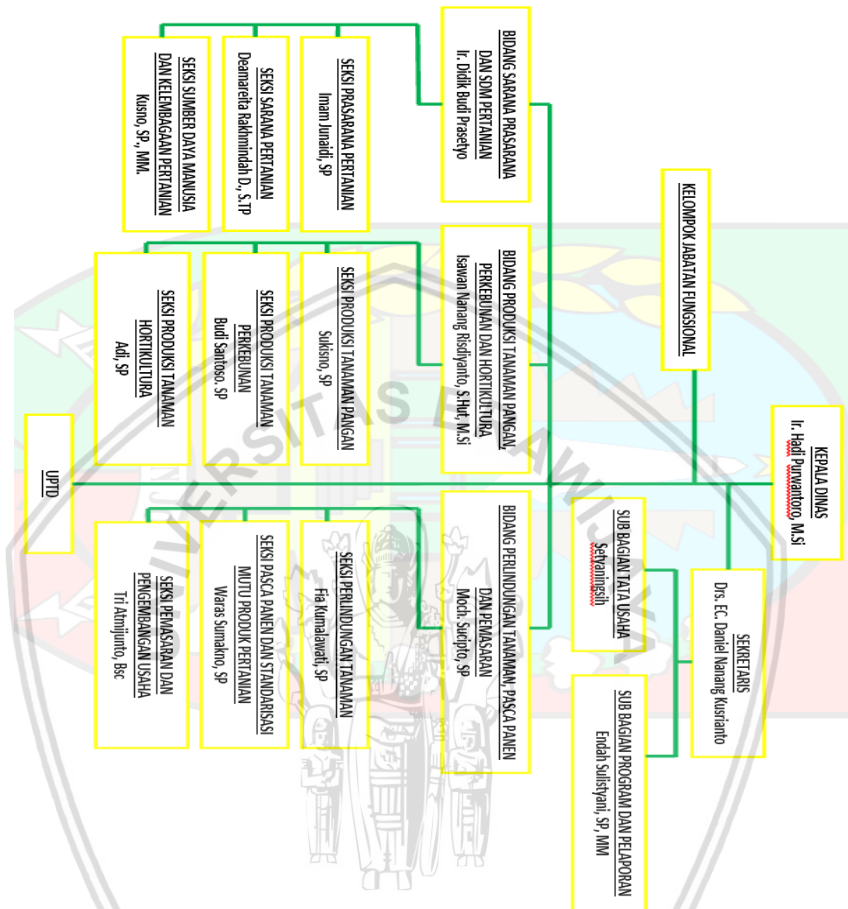
- e. Pelaksanaan pemetaan, pengelolaan, pengaturan, pengawasan, penerapan tataguna lahan pertanian dan kawasan pertanian terpadu;
- f. Penetapan sentra komoditas pertanian, sasaran areal tanam dan luas baku lahan pertanian sesuai kemampuan sumberdaya lahan;
- g. Peningkatan pengelolaan air irigasi dan konservasi sumber-sumber air;
- h. Pelaksanaan bimbingan pengembangan dan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Perkumpulan Petani Pemakai Air Tanah (P3AT);
- i. Pengawasan peredaran, pengadaan, penggunaan, pengamanan, penyaluran sarana dan prasarana produksi pertanian;
- j. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan usaha disektor pertanian;
- k. Pelaksanaan bimbingan, pengembangan, pemberdayaan, pengendalian dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit agribisnis;
- l. Pelaksanaan bimbingan penerapan pedoman/kerja sama kemitraan usaha hasil tanaman pangan dan hortikultura;
- m. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis peningkatan produksi usaha tani dan perlindungan tanaman;

- n. Pelaksanaan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengelolaan hasil pertanian;
- o. Pelaksanaan bimbingan pemasaran, lomba produk pertanian dan penyebaran informasi pasar hasil tanaman pangan dan hortikultura;
- p. Pelaksanaan penyusunan statistik dan penerapan sistim informasi tanaman pangan dan hortikultura;
- q. Pelaksanaan dan pengembangan laboratorium penguji sektor pertanian;
- r. Pelaksanaan perencanaan, penerapan, kebijakan, pedoman kelembagaan dan pengembangan penyuluhan, serta persyaratan sertifikasi/akreditasi dan mutasi pejabat penyuluh pertanian;
- s. Pelaksanaan penyebaran dokumentasi dan informasi standarisasi sektor pertanian;
- t. Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan di bidang pertanian;
- u. Pengelolaan tugas kesekretariatan

6. Struktur Organisasi

Gambar 5

Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Jomban



sumber <http://pertanian.jombangkab.go.id/profil-dinas/struktur-dinas> diakses pada
selasa 16 januari 2016 pukul 20.32

C. Penyajian Data

1. Implementasi Kebijakan Sistem Pertanian Organik di Kabupaten Jombang

Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tujuan kebijakan sistem pertanian organik adalah untuk menjadikan seluruh area persawahan di Kabupaten Jombang menjadi petani organik, dengan pertanian organik petani mampu meningkatkan kesejahteraan petani organik serta melindungi area persawahan dengan memberikan landasan hukum yaitu berupa sertifikat organik. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Rudi Priono S. P. selaku fungsional penyuluh bahwa,

“terkait sistem pertanian organik, pemerintah Kabupaten Jombang khususnya Dinas Pertanian mengetahui bagaimana petani masih mempunyai pemikiran yang tidak berkepanjangan, artinya petani hanya mengoptimalkan hasil panen dimasa sekarang ketimbang memperhatikan kelestarian lingkungannya. Sebab kalau dibiarkan terus menerus maka area persawahan di Kabupaten Jombang akan mengalami krisis kesuburan tanahnya” (wawancara pada 15 Januari 2018 Dinas Pertanian Kabupaten Jombang)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem pertanian organik adalah suatu kebijakan yang mana kebijakan tersebut dirasa mampu untuk mengubah pola pikir petani untuk beralih ke pertanian organik sehingga apabila petani sudah beralih ke organik maka kelestarian dan kesuburan area persawahan dapat terjaga. Dengan adanya kebijakan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah diharapkan pengimplementasian dalam

sistem pertanian organik di Kabupaten Jombang dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang ada. Sedangkan implementasi yang sudah dihasilkan menurut wawancara dengan Rudi Priono S. P. selaku fungsional penyuluh mengatakan bahwa,

“menurut saya, sistem pertanian organik sudah terimplementasikan dengan baik, hal ini dapat kita lihat sampai tahun 2018 sudah ada dua kecamatan yang mau menerapkan sistem pertanian organik yaitu kecamatan Bareng dan Kecamatan Bandar Kedungmulyo. Awalnya pada tahun 2016 masih satu kecamatan yaitu Kecamatan Bareng setelah dua tahun berjalan alhamdulillah Bandar Kedungmulyo mulai menerapkan pertanian organik.” (wawancara pada 15 Januari 2018 Dinas Pertanian Kabupaten Jombang)

Implementasi kebijakan sistem pertanian organik di Kabupaten Jombang dapat dilihat sudah terimplementasikan dengan baik walaupun masih dua kecamatan yang menerapkan pertanian organik. Awalnya hanya satu kecamatan yang menerapkan kebijakan tersebut sejak tahun 2016 akan tetapi sudah dua tahun berjalan ada dua kecamatan yang menerapkan pertanian organik yaitu Kecamatan Bareng dan Kecamatan Bandar Kedungmulyo.

a) Ukuran-Ukuran Dasar dan Tujuan-Tujuan Kebijakan

Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan dalam menentukan keberhasilan dan berjalannya suatu implementasi kebijakan merupakan tujuan dan sasaran yang harus diidentifikasi karena implementasi tidak dapat dikatakan berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan tersebut tidak dipertimbangkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Rudi Priono S. P. selaku fungsional penyuluh mengatakan bahwa,

“yang menjadikan landasan kami adalah permentan nomor 64 tahun 2013 yaitu tentang sistem pertanian organik. sedangkan yang menjadikan ukuran dasar dalam pertanian organik ini yang pertama menjadikan semua sawah di Kabupaten Jombang menggunakan sistem pertanian organik, yang kedua dengan pertanian organik maka diharapkan mampu untuk meningkatkan kesejahteraan petani, lalu yang ketiga dapat melindungi area persawahan di Kabupaten Jombang dengan lisensi sertifikat organik” (wawancara pada 15 Januari 2018 Dinas Pertanian Kabupaten Jombang)

Pernyataan diatas juga didukung dengan pernyataan Sumiran S. P.

selaku PPL Dinas Pertanian Kabupaten Jombang yang mengatakan bahwa,

“ ada beberapa hal yang membuat kami untuk menerapkan kebijakan tersebut yaitu benar apa yang dikatakan beliau, saya hanya menambahkan target sasaran dari pertanian organik ini adalah yang pertama mereka petani yang dinamis, responsive terhadap teknologi baru, pro aktif dan bertempat tinggal dalam satu desa yang berdekatan dan diusulkan oleh kepala desa, yang kedua kelompok tani yang masih aktif dan mempunyai kepengurusan yang lengkap yaitu minimal ada ketua, sekretaris dan bendahara, lalu yang ketiga kelompok tani penerima bantuan, memiliki rekening yang masih aktif di bank pemerintah sedangkan yang belum memiliki harus membuka rekening terlebih dahulu” (wawancara pada 17 Januari 2018 Kantor Kecamatan Bareng)

Dari hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa didalam mengukur implementasi kebijakan ada ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan. Yang menjadikan ukuran-ukuran dasar yaitu Permentan nomor 64 tahun 2013 yang bertujuan untuk menjadikan semua area persawahan di Kabupaten Jombang menggunakan pertanian organik, lalu dengan menggunakan pertanian organik maka diharapkan petani mampu meningkatkan kesehjateraannya serta dapat melindungi area persawahan dengan memberikan landasan hukum berupa sertifikasi organik. Sedangkan

target sasaran dari sistem pertanian organik ini adalah meraka petani yang dinamis, responsiif terhadap teknologi baru, pro aktif dan bertempat tinggal dalam satu wilayah yang berdekatan dan diusulkan oleh kepala desa, lalu kelompok tani tersebut masih aktif dan mempunyai kepengurusan yang lengkap yaitu minimal ada ketua, sekretaris dan bendahara, dan yang terakhir petani yang mempunyai nomor rekening pada bank pemerintah.

b) Sumber Daya

Sumber-sumber kebijakan merupakan hal terpenting di dalam melakukan pengimplemntasian suatu kebijakan. Karena berkenaan dengan ketersediaan tenaga pendukung yang berupa sumber daya manusia, anggaran yang digunakan serta alat pendukung lainnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Rudi Priono S. P. selaku fungsional penyuluh mengatakan bahwa,

“ sumber anggaran untuk pertanian organik ada tiga yang pertama dari dana APBN, dana APBN digunakan untuk melakukan pendampingan kegiatan selama satu tahun serta tentang keperluan sertifikasi, yang kedua dari dana APBD, dana APBD juga sama pengeluarannya yaitu digunakan untuk kepentingan selama pertanian organik dan dibuat untuk sejumlah pelatihan kepada petugas penyuluh, dan yang ketiga dari pihak Swasta yang memberikan sejumlah bantuan. Bantuan yang diberikan dari pihak swasta bervariasi ada yang berupa pupuk khususnya pupuk organik, alat pertanian, sampai berupa pelatihan terhadap petani. sedangkan sumber manusia yaitu petugas yang menjalankan pertanian organik maupun dari Dinas Pertanian yang diwakilkan oleh PPL, penyuluh pertanian, maupun petani organik” (wawancara pada 15 Januari 2018 Dinas Pertanian Kabupaten Jombang)

Pernyataan diatas diperkuat kembali oleh Sumiran S. P. selaku PPL

Dinas Pertanian Kabupaten Jombang yang mengatakan bahwa,

“ untuk alat pendukung lainnya yaitu berupa lahan, irigasi, bibit, maupun alat yang digunakan untuk pertanian organik ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti bibit, bibit yang digunakan adalah bibit berasal dari tanaman dibudidayakan secara organik, namun apabila benih tidak tersedia, maka diperkenankan untuk menggunakan benih yang bukan berasal dari tanaman organik, tetapi bukan benih yang berasal dari hasil rekayasa genetik, sedangkan alat yang digunakan untuk keperluan di sawah harus alat yang baru sehingga nanti pada saat mengelola sawah organik tidak tercampur oleh alat yang sudah dipakai untuk pertanian konvensional. Serta irigasi area persawahan juga berbeda dengan konvensional, sawah yang organik harus benar benar bersih dari residu kimia, yaitu dengan cara ditanami kangkung ataupun enceng gondok untuk menyerap residu tersebut.”
(wawancara pada 17 Januari 2018 di Kantor Kecamatan Bareng)

Dari kedua pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Sumber-Sumber kebijakan untuk mensukseskan sistem pertanian organik ada tiga yaitu yang pertama sumber anggaran yang digunakan yaitu dari dana APBN, APBD serta dari pihak swasta yang berupa pupuk organik, bibit, alat pertanian, maupun pelatihan yang diberikan kepada petani organik. yang kedua sumber manusia, sumber manusia yang dikerahkan yaitu dari Dinas Pertanian dan Petani organik itu sendiri. Yang ketiga dari alat pendukung yaitu yang berupa lahan, irigasi, bibit/benih, maupun alat yang digunakan didalam pertanian organik.

c) Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksana

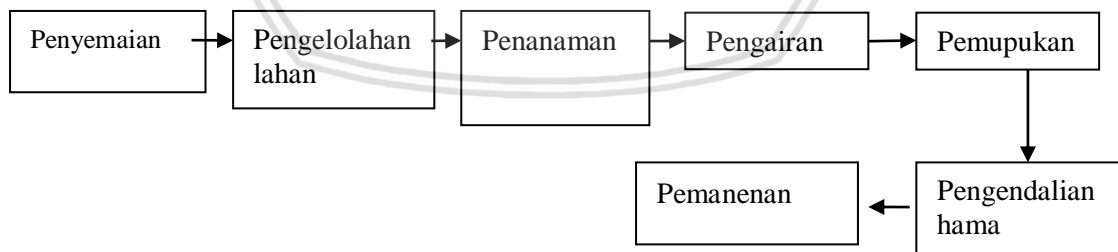
Dalam kebijakan terdapat kebijakan tersebut dikomunikasikan kepada organisasi atau publik dan sikap serta tanggapan dari pihak yang terlibat. Organisasi tersebut ialah Dinas Pertanian Kabupaten Jombang sedangkan sikap serta tanggapan dari pihak yang terlibat adalah kelompok

petani. Pada sistem pertanian organik Dinas Pertanian menyampaikan tujuan ataupun manfaat dari pertanian organik, tanggapannya petani memahami apa yang dimaksudkan oleh Dinas Pertanian. Berdasarkan hasil wawancara dengan Rudi Priono S.P selaku fungsioal penyuluh mengatakan bahwa,

“ kami (Dinas Pertanian) menyampaikan maksut dan tujuan serta manfaat yang didapatkan oleh petani didalam pertanian organik. kami mendantangi kantor kecamatan bareng yang pesertanya adalah kelompok tani. Ada dua kelompok tani yang mendatangi sosialisasi kami, dan kelompok tani Desa Banjarsari merupakan yang tertarik untuk mengikuti. Serta mereka paham dengan maksut kami” (wawancara pada 15 Januari 2018 di Dinas Pertanian Kabupaten Jombang)

Gambar 6

**Proses Alur Sistem Pertanian Organik Tentang Masa Tanam
Sampai Masa Panen**



sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Jombang

Pernyataan diatas didukung kembali oleh pernyataan Pak Aspandi selaku ketua kelompok tani Desa Banjarsari yang mengatakan bahwa,

“ proses penanaman padi konvensional dengan padi organik hampir sama yaitu pertama dilakukan penyemaian, langkah pertama yang harus dilakukan ialah melakukan penyemian terhadap benih padi. Sebelumnya, benih perlu diseleksi untuk mendapatkan benih terbaik dengan merendam didalam air. Benih yang baik apabila direndam selama 24 jam maka benih tersebut tenggelam. Setelah merendam benih lalu ditiriskan selama 2-3 hari. Setelah itu benih dapat disemai pada media tanah yang diberikan pupuk kompos sebanyak 10 kg. jika umur benih sudah 7 hingga 12 hari maka benih siap ditanam. Tahap kedua pengolahan lahan yaitu dengan cara dibajak dan dicangkul yang dibedakan dengan alat bekas konvensional. Biasanya dilakukan dua kali pembajakan. Total pengolahan lahan biasanya sekitar 2-3 hari setelah itu direndam dengan air selama 1 hari. Langkah ketiga dilakukan penanaman sebelum dilakukan penanaman terlebih dahulu dilakukan pencaplukan yaitu pembuatan jarak tanam sekitar 25 x 25 cm atau 30 x 30 cm. pada saat menanam padi jangan terlalu dalam karena akar tidak bisa tumbuh dengan leluasa bergerak. Langkah ke empat dilakukan pengairan pada pertanian organik menjaga aliran air supaya sawah tidak tergenang terus menerus namun lebih pada pengaliran air saja, untuk itu setiap hari petani biasanya melakukan kontrol dan menutup serta membuka pintu air secara teratur. Langkah ke lima yaitu pemupukan, pemupukan dilakukan secara 3 bertahap yaitu pemupukan pertama dilakukan pada usia 7-14 hari setelah tanam, pemupukan kedua dilakukan pada usia 20-30 hari setelah tanam, pemupukan ketiga dilakukan pada usia 40-45 hari setelah tanam. Tentunya pupuk yang digunakan adalah pupuk organik. langkah ke tujuh yaitu pengendalian hama, pertanian organik sudah aman dari hama tanaman akan tetapi kami tetap berjaga-jaga yaitu menggunakan agen hijau. Di area persawahan kita memiliki pagupon dan burung hantu untuk memangsa tikus, sedangkan wareng kami berjaga-jaga menggunakan tanaman yang tinggi yang ditanam di sekitar area persawahan. Langkah ke delapan yaitu pemanenan. Padi mulai berbunga pada umur 2-3 bulan dan biasanya dipanen rata-rata pada umur sekitar 3,5 sampai 6 bulan, tergantung jenis varietesnya.” (wawancara pada 19 Januari 2018 di Desa Banjarsari)

Dari pernyataan-pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi merupakan hal sangat penting didalam kebijakan karena

komunikasi yang baik antar organisasi dan target sasaran akan dapat menciptakan kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik. Terbukti dengan Dinas Pertanian memberikan pengantar tentang pertanian organik yang diikuti oleh petani dan Dinas Pertanian menjelaskan bagaimana cara mengelola pertanian organik. Petani organik sendiri juga dapat memahami apa yang dimaksudkan oleh Dinas Pertanian yaitu petani mampu menerapkan pertanian organik dari penyemaian benih hingga panen yang tentunya diawasi oleh Dinas Pertanian.

2. Bentuk Kegiatan Dari Kebijakan Sistem Pertanian Organik Pada Dinas Pertanian Kabupaten Jombang

2.1 Bentuk Kegiatan dalam Mendukung Sistem Pertanian Organik

Upaya implementasi yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Jombang dalam mengatasi permasalahan pertanian yang ada adalah dengan sistem pertanian organik. Di dalam Sistem Pertanian Organik terdapat 2 program yang mendukung sistem pertanian organik yaitu program peningkatan daya dukung lahan, air dan lingkungan pertanian serta program pengolahan lahan tanaman pertanian. Dari kedua program tersebut sangat mendukung untuk menciptakan kesuburan tanah dan kelestarian lingkungan. Hal ini diungkapkan oleh Rudi Priono S. P. selaku fungsional penyuluh bahwa,

“didalam sistem pertanian organik terdapat dua program untuk mendukung dari sistem pertanian organik itu sendiri yaitu yang pertama program peningkatan daya dukung lahan, air dan lingkungan pertanian serta yang kedua yaitu program pengelolaan tanaman pertanian. Sistem pertanian organik merupakan sistem untuk menyuburkan tanah dan melestarikan lingkungan sedangkan 2 program tadi adalah program untuk mendukung terciptanya sistem pertanian organik.” (wawancara pada 15 Januari 2018 Dinas Pertanian Kabupaten Jombang)

a) Bentuk Kegiatan Program daya dukung lahan, air, dan lingkungan.

Bentuk kegiatan dari program daya dukung lahan, air, dan lingkungan adalah peningkatan daya dukung lahan pertanian yang memiliki dampak untuk meningkatnya kesuburan lahan pertanian. Hal ini diungkapkan oleh Rudi Priono S.P. selaku fungsional penyuluh bahwa.

“kegiatan yang dilakukan oleh petugas terhadap program daya dukung lahan, air, dan lingkungan pertanian adalah menjauhkan ketiga media tersebut dari unsur-unsur kimia yang dapat mempengaruhi sistem pertanian organik. karena sistem pertanian organik itu sendiri tidak dapat berkembang baik apabila terdapat unsur-unsur kimia didalamnya. Tentunya program ini untuk meningkatkan kesuburan tanah.” (wawancara pada 15 Januari 2018 Dinas Pertanian Kabupaten Jombang)

Pernyataan diatas sesuai dengan temuan peneliti yang ada di lapangan berdasarkan renstra Dinas Pertanian Kabupaten Jombang yaitu bentuk kegiatan dari program daya dukung lahan, air, dan lingkungan adalah peningkatan daya dukung lahan pertanian. Adapun untuk mensukseskan program daya dukung lahan, air dan lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang menyediakan Anggaran dan Sumber daya Manusia

dari Dinas Pertanian. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sumiran S.P selaku penyuluh pertanian lapangan bahwa,

“seluruh program pada Dinas pertanian sumber anggaran untuk mensukseskan program adalah dari APBN serta APBD. Anggaran tersebut digunakan dan harus terealisasi. Serta untuk menjalankan program tersebut perlu adanya sumber manusia untuk menjalankan program tersebut. Tentunya sumber manusia yang mensukseskan program tersebut dari Dinas Pertanian dan mempunyai komitmen yang tinggi” (wawancara pada 15 Januari 2018 Dinas Pertanian Kabupaten Jombang).

Jadi untuk mensukseskan program daya dukung lahan, air dan lingkungan adalah dari sumber anggaran yang diberikan serta sumber daya manusia yang mempunyai komitmen dan mendukung berlangsungnya pertanian organik.

b) Bentuk kegiatan Program pengelolaan lahan pertanian.

Di dalam renstra bentuk kegiatan dari program pengelolaan lahan pertanian adalah fasilitasi pengelolaan lahan dan air tanaman pangan yang memiliki dampak terwujudnya Jalan Usaha Tani (JUT) kondisi baik. Hal ini sesuai dengan pernyataan Rudi Priono S.P. selaku fungsional penyuluh bahwa,

“didalam program pengelolaan lahan pertanian bentuk kegiatannya adalah memberikan fasilitas untuk pengelolaan lahan dan air untuk memberikan kesuksesan sistem pertanian organik. fasilitas yang diberikan Dinas Pertanian adalah memberikan pelatihan untuk membuat pupuk organik dan memberikan pengetahuan terkait saluran irigasi yang baik untuk pertanian organik. Dampak yang dirasakan oleh petani adalah untuk keberhasilan JUT bagi petani organik di masa yang akan datang atau jangka panjangnya.” (wawancara pada 15 Januari 2018 Dinas Pertanian Kabupaten Jombang)

Hal ini sesuai dengan temuan peneliti dilapangan bahwa Dinas Pertanian didalam memberikan sejumlah bantuan atau fasilitas untuk mensukseskan program pengelolaan lahan pertanian. Fasilitas itu berupa alat pemotong kotoran hewan (coper) dan pembangunan irigasi pertanian. Didalam program pengelolaan lahan pertanian terdapat anggaran dan sumber daya manusia untuk melaksanakan program tersebut. Sumber anggaran yang digunakan adalah dari dana APBN dan APBD serta sumber daya manusia dari Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, hal ini sesuai dengan pernyataan Rudi Priono S. P. selaku fungsional penyuluh bahwa,

“ hampir sama dengan program daya dukung lahan, air dan lingkungan didalam program pengelolaan lahan pertanian sumber anggaran dari dana APBN dan APBD serta sumber daya manusia dari petugas Dinas Pertanian Kabupaten Jombang yang tentunya memiliki komitmen untuk mendukung adanya sistem pertanian organik” (wawancara pada 15 Januari 2018 Dinas Pertanian Kabupaten Jombang)

Jadi untuk mensukseskan program pengelolaan lahan tanaman pertanian adalah dari sumber anggaran yang diberikan serta sumber daya manusia yang mempunyai komitmen dan mendukung berlangsungnya pertanian organik.

2.2. Bentuk kegiatan dari Pelaksanaan Sistem Pertanian Organik

Adapun bentuk kegiatan dari pelaksanaan sistem pertanian organik terdiri dari

4 kegiatan yaitu :

1) Pengelompokan Petani

Langkah awal sebelum melaksanakan Sistem Pertanian Organik adalah melakukan pengelompokan petani. Dinas Pertanian melakukan pengelompokan tani bertujuan untuk mengetahui target sasaran dari program tersebut serta berlokasikan Dusun Banjarsari Desa Bareng Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang. hal ini sesuai dengan pernyataan Rudi Priono S. P. selaku fungsional penyuluh pertanian,

“langkah awal sebelum melakukan sosialisasi adalah pengelompokan petani sebanyak 1 kelompok hal ini dilakukan untuk mengetahui target sasaran dari sistem pertanian organik. kami mengajak para petani di desa Banjarsari untuk melakukan perubahan agar petani dapat hidup lebih sejahtera dengan adanya sistem pertanian organik.”(wawancara pada 15 Januari 2018 Dinas Pertanian Kabupaten Jombang)

Hal ini diperkuat kembali dengan pernyataan dari ketua kelompok tani yang ada di desa Banjarsari,

“Kelompok kami menerima informasi dari pak sumiran yang ada di kantor kecamatan tentang adanya sistem pertanian organik dan tertarik untuk mencobanya. Karena kelompok kami mempunyai peternak sapi yang kotorannya juga dapat digunakan sebagai pupuk organik yang dijadikan andalan dari program ini serta dari pak sumiran bahwa sistem pertanian organik ini juga dapat menekan biaya selama musim tanam. Itulah alasan kami mengapa tertarik untuk mengikuti program tersebut.” (wawancara pada 15 janurai 2018 desa Banjarsari Kecamtan bareng Kabupaten Jombang)

Dari dua pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan Dinas Pertanian yang melakukan pengelompokan petani memiliki fungsi yaitu siapa target sasaran dari adanya Sistem Pertanian Organik yang digagas oleh Dinas

Pertanian Kabupaten Jombang. Adapun jumlah anggota dalam kelompok tani Desa Banjarsari terdapat 12 anggota yaitu:

Tabel 4

Nama Anggota Petani Organik Kelompok Tani Desa Banjarsari

| Nomor | Nama Petani | Jabatan |
|-------|---------------|-------------|
| 1 | Aspandi | Ketua |
| 2 | Agus Suherman | Wakil Ketua |
| 3 | Wiwik | Sekretaris |
| 4 | Edi Junadi | Bendahara |
| 5 | Nur Hidayati | Anggota |
| 6 | Nanik Saryati | Anggota |
| 7 | Wartono | Anggota |

Sumber : Kantor Kecamatan Bareng

2) Sosialisasi Sistem Pertanian Organik.

Sosialisasi merupakan suatu tindakan atau upaya yang dilakukan oleh Dinas Pertanian terhadap petani guna meningkatkan kesadaran tentang pentingnya merawat lingkungan dalam jangka panjang melalui organik. Kegiatan Sosialisasi ini sangat dibutuhkan terhadap kelompok tani untuk pemahaman yang masih belum mengerti tentang pentingnya menjaga lingkungan dalam jangka panjang melalui pertanian organik dan pada akhirnya melalui organik juga petani akan dapat merasakan banyak hal dari

keuntungan. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Rudi Priono S. P. selaku fungsional penyuluh pertanian,

“setelah melakukan pengelompokan terhadap petani untuk sistem pertanian organik ini kami selaku dinas pertanian yang menjadi pengawas daripada petani di Kabupaten Jombang melakukan penyuluhan terhadap petani, tepatnya kelompok tani yang ada di Dusun Banjarsari Desa Bareng Kecamatan Bareng dijadikan sebagai percontohan kelompok tani organik yang ada di Jombang. Sosialisasi dilakukan sebanyak 3 kali secara bertahap. Tahap pertama Dinas Pertanian melakukan pemahaman terkait kesuburan tanah dan menjaga kelestarian lingkungan. Sosialisasi ke dua dilakukan untuk memahami pertanian organik. Sosialisasi yang ketiga dilakukan untuk memantapkan tentang pertanian organik. Tujuan adanya sosialisasi adalah untuk memahamkan para petani akan pentingnya untuk menjaga kesuburan tanah, yang mana dengan meningkatnya kesuburan tanah akan menghasilkan jumlah produksi padi meningkat, dengan catatan tidak menggunakan bahan kimia” (wawancara pada 15 Januari 2018 Dinas Pertanian Kabupaten Jombang)

Pernyataan dari pihak dinas pertanian diperkuat dengan pernyataan dari ketua gabungan kelompok tani yang di jadikan percontohan yaitu Pak Aspandi bahwa,

“benar mas, dinas pertanian melakukan sosialisasi pada desa kami dan tujuan dari dinas pertanian adalah untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan terutama kesuburan tanah, yang mana dari pemahaman tentang kesuburan tanah yang berjangka panjang akan menimbulkan produksi tanaman padi meningkat. Sebenarnya sosialisasi yang dilakukan oleh dinas pertanian ada dua desa akan tetapi yang tertarik untuk mengikuti sistem pertanian organik hanya kami”(wawancara pada 15 Januari 2018 Dinas Pertanian Kabupaten Jombang)

Dari dua pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi dilakukan sebanyak tiga kali dan secara bertahap. Pada kesempatan sosialisasi yang pertama Dinas Pertanian lebih memfokuskan tentang

pentingnya menjaga kesuburan tanah dan menjaga lingkungan. Pada kesempatan yang kedua Dinas Pertanian memfokuskan tentang pertanian organik lalu pada tahap ketiga Dinas Pertanian memfokuskan kepada pemahaman tentang pertanian organik. sangat penting karena sebagai tahap awal untuk kelancaran pertanian organik dan diharapkan dari tahap awal ini dapat membantu tentang pemahaman para petani untuk pentingnya menjaga kelestarian lingkungan terutama kesuburan tanah dengan tidak memberikan pupuk kimia

Gambar 7



Keterangan: proses sosialisasi di Kecamatan Bareng

3) Diklat Sistem Pelatihan Organik.

Diklat mempunyai arti penyelenggaraan proses belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas dan jabatan tertentu. Kebutuhan diklat yang dibutuhkan oleh seorang pemegang jabatan atau pelaksana pekerjaan tiap jenis jabatan atau unit organisasi untuk

meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap dalam melaksanakan tugas. Hal ini diperkuat dengan pernyataan yang diberikan oleh Pak Aspandi selaku Ketua kelompok tani bahwa,

“pelatihan yang diberikan dinas pertanian selama 3 hari 2 malam yang mana pada hari pertama diberikan sejumlah pemahaman terkait pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan dilanjutkan dengan diberikan pelatihan tentang pengolahan pupuk organik dan pupuk hijau. Pada pembekalan pengolahan pupuk organik dan pupuk hijau mempunyai tujuan yaitu agar petani mampu memproduksi sendiri dan tidak bergantung pada pihak lain serta dapat menghemat pengeluaran dengan membuat pupuk sendiri.”(wawancara pada 15 Januari 2018 Dinas Pertanian Kabupaten Jombang)

Dari pernyataan Pak Aspandi selaku Ketua kelompok tani dapat diperkuat dengan pernyataan Sumiran S. P. selaku PPL pertanian Kecamatan Bareng bahwa,

“diklat dilakukan untuk pembekalan terhadap petani yang dulunya konvensional (an-organik) dijadikan petani organik. Peserta diklat adalah salah satu perwakilan yang ada pada kelompok tani biasanya yang ditunjuk adalah ketua kelompok tani. Akan tetapi apabila ketua berhalangan maka dapat digantikan dengan yang lainnya. Pembekalan dilakukan di Malang selama 3 hari. Yang mana petani difokuskan untuk membuat pupuk dari bahan-bahan yang mudah didapat seperti kotoran sapi non-sentrat hanya dierinya maka rumput saja dan sampah rumah tangga yang masih dapat diolah kembali.”(wawancara pada 1 Februari 2018)

Kedua pernyataan diatas dapat diartikan bahwa kegiatan Diklat merupakan bagian penting dari program pertanian organik. Karena diklat sendiri memberikan sejumlah pelatihan kepada petani untuk dapat membuat pupuk sendiri dan utamanya dari kegiatan diklat ini adalah untuk dijadikan

sebagai petani yang mandiri. Pada diklat yang dilaksanakan di Malang yang dikirim untuk mengikuti diklat hanya perwakilan saja.

Gambar 8



Keterangan: Diklat pembuatan pupuk organik.

4) Sertifikasi

Sertifikasi pada pertanian organik adalah bagian terpenting, karena sertifikasi merupakan tujuan yang didapatkan oleh petani organik agar dapat diakui secara nasional maupun internasional. Petani sudah mampu menerapkan sistematis pertanian organik akan tetapi belum mendapatkan sertifikat dari lembaga sertifikasi organik (LSO) maka petani tersebut belum dapat dikatakan sebagai petani organik. Hal ini diperkuat oleh pernyataan salah satu petugas penyuluh lapangan yaitu Sumiran S. P. bahwa,

“Hal tersulit menjadi petani organik adalah dapat diakui secara nasional maupun internasional, secara hukum diakui sebagai petani organik maka harus mendapatkan sertivikat organik yang sulit di dapatkan. Walaupun petani tersebut mampu mengerjakan sawahnya secara organik dan tidak menggunakan bahan kimia sedikitpun akan tetapi tidak mempunyai sertivikat maka padi yang dipanen bukan dikatakan beras organik, akan tetapi beras sehat. Kalau petani sudah mendapatkan sertivikat maka hanya berlaku selama 3 tahun dan petani tersebut dapat dikatakan sebagai petani organik. Apabila petani tersebut sudah habis masa berlakunya dan tidak mengurus lagi maka tidak dikatakan sebagai petani organik lagi.”(wawancara pada 15 Januari 2018 Dinas Pertanian Kabupaten Jombang)

Adapun proses untuk mendapatkan sertifikat dari LSO menurut Rudi Priono S. P. selaku fungsional penyuluh pertanian adalah

“langkah pertama yaitu pengajuan permohonan sertifikasi produk organik oleh pelaku usaha bisa melalui pendaftaran secara online ataupun langsung datang ke LSO sekaligus menyertakan lingkup sertifikasi yang diinginkan oleh petani. Selanjutnya LSO akan memberikan formulir pendaftaran yang harus diisi dan dikirimkan kembali oleh petani ke LSO untuk dilakukan audit kecukupan oleh LSO. Langkah ketiga apabila hasil audit menyatakan cukup dan layak, maka LSO akan memberikan penawaran biaya sertifikat sekaligus memberikan jadwal dan nama petugas inspector yang melakukan inspeksi. Langkah ke empat pelaksanaan inspeksi dilakukan dari dua kegiatan antara lain pelaksanaan audit dokumen dan inspeksi lapang. Tugas utama dari inspector adalah memotret dan merekam semua proses sistem organik yang dilakukan oleh petani. Apabila ada hal –hal yang kurang sesuai maka akan dicatat dalam lembaran ketidaksesuaian dan diberikan kepada petani untuk diperbaiki. Langkah kelima hasil inspeksi di sawah dan tindakan perbaikan oleh petani akan dipersentasikan oleh inspector di sidang komisi sertifikasi untuk mendapatkan keputusan lulus atau tidaknya proses sertifikasi dari petani. Apabila komisi sertifikasi meluluskan, maka LSO akan menerbitkan sertifikat kelulusan yang berlaku tiga tahun dan sertifikasi tersebut akan diserahkan oleh pimpinan LSO kepada petani sekaligus pemberian hak penggunaan logo organik Indonesia. Sertifikat organik berlaku selama tiga tahun.” (wawancara pada tanggal 15 Janurai 2018 pada Dinas Pertanian)

Dari pernyataan diatas maka dapat di simpulkan kegiatan sertifikasi merupakan bagian terpenting dalam pertanian organik. Karena sertifikasi adalah sebagai payung hukum yang mampu melindungi dan di akui secara hukum dengan adanya petani yang memiliki sertifikat.

Didalam pengimplementasian sistem pertanian organik mempunyai beberapa prinsip-prinsip serta tujuan dari pertanian organik. Adapun prinsip-prinsip pertanian organik adalah prinsip kesehatan, ekologi, keadilan, dan siklus ekologi kehidupan, sedangkan tujuan-tujuan yang dilihat dari sisi pertanian organik adalah mengembangkan keanekaragaman hayati, meningkatkan aktivitas biologi tanah, menjaga kesuburan tanah dalam jangka panjang, mendaur ulang limbah asal tumbuhan dan hewan untuk mengembalikan nutrisi kedalam tanah sehingga meminimalkan penggunaan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui, mengandalkan sumber daya yang dapat diperbaharui pada sistem pertanian yang dikelola secara lokal, meningkatkan penggunaan tanah,air udara secara baik, serta meminimalkan semua bentuk polusi yang dihasilkan dari kegiatan pertanian.

Hal ini ada beberapa yang sesuai dengan pernyataan Rudi Priono S.P. selaku fungsional penyuluh yang mengatakan bahwa,

“ada beberapa yang sesuai dengan pertanyaan mas nya terkait prinsip pertanian organik itu sendiri seperti kesehatan, didalam pertanian organik yang ada di Kabupaten Jombang kesehatan lingkungan merupakan salah satu perhatian yang penting. Oleh sebab itu kami menggunakan sistem pertanian organik yang salah satu tujuannya

adalah untuk tidak memakai bahan kimia yang dapat mencemari lingkungan tanah. Dengan menggunakan pupuk organik yang terbuat dari kotoran hewan dan limbah rumah tangga maka dapat dikatakan sebagai keadilan karena dengan menggunakan pupuk organik yang terbuat dari kotoran hewan dan limbah rumah tangga tentunya tidak memerlukan biaya ekstra untuk pupuk yang dibutuhkan. Terkait ekologi lingkungan tentunya dengan menggunakan pertanian organik yang mengurangi polusi pada tanah maka ekologi lingkungan akan tetap terjaga” (wawancara dilakukan pada 15 Januari 2018 di Dinas Pertanian Kabupaten Jombang)

Dari pernyataan yang disampaikan oleh Rudi Priono S. P. dilanjutkan oleh Sumiran S. P. yang mengatakan bahwa,

“dari beberapa tujuan yang disampaikan oleh anda ada beberapa yang sesuai didalam implementasi pertanian organik yaitu yang pertama mengembangkan keanekaragaman hayati, di Kabupaten jombang yang sudah menerapkan pertanian organik ada tiga jenis tanaman yaitu padi, kopi dan coklat, tapi di Kecamatan Bareng hanya padi saja. Yang kedua dan ketiga untuk meningkatkan aktivitas biologi tanah dan menjaga kesuburan tanah dalam jangka panjang yaitu dengan cara menggunakan pupuk organik maka akan mengurangi kerusakan pada tanah yang disebabkan oleh pupuk kimia maupun pestisida yang digunakan oleh petani selama ini. Yang ke empat dengan mendaur ulang limbah maka petani organik mampu menekan biaya untuk membeli pupuk. Petani organik dibekali untuk mandiri yaitu mengolah limbah rumah tangga yang berupa sampah tumbuhan ataupun kotoran sapi yang diolah untuk dijadikan pupuk organik.” (wawancara pada 1 Februari 2018 pada Kantor Kecamatan Bareng)

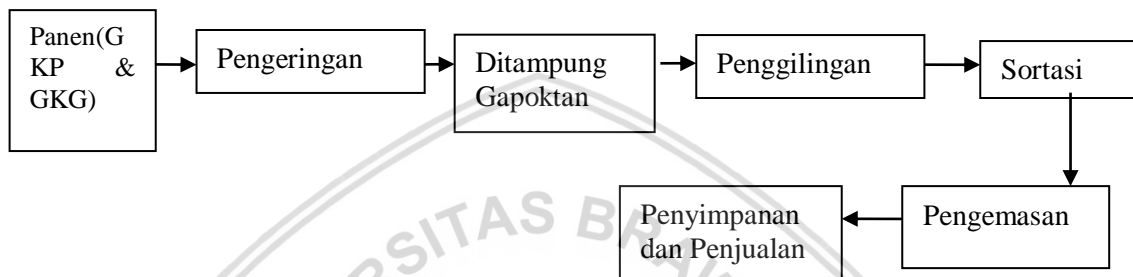
Dari kedua pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa didalam pertanian organik mempunyai prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan yang berguna untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Untuk implementasi sistem pertanian organik maka diperlukan apa saja yang ada pada sitem pertanian organik yaitu :

1) Proses dari pelaksanaan Sistem Pertanian Organik

Gambar 9

**Proses Alur Sistem Pertanian Organik Tentang Masa Panen
Sampai Penjualan**



sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Jombang

Pelaksanaan Sistem Pertanian Organik pada Dinas Pertanian terkait masa panen sampai penjualan diawali dengan panen dari hasil GKP (Gabah Kering Panen) maupun GKG (Gabah Kering Giling), setelah itu dilanjutkan dengan pengeringan hasil panen tersebut dan ditampung pada Gapoktan. Selanjutnya dilakukan penggilingan atau biasa dikenal dengan *selep*. Setelah melakukan pemisahan gabah langkah selanjutnya yaitu melakukan sortasi atau pemisahan mutu. Langkah selanjutnya dilakukan pengemasan, penyimpanan dan penjualan. Hal ini diungkapkan Rudi Priono S. P selaku Fungsional Penyuluh Pertanian bahwa,

“tahap awal yang dilakukan petani oranganik setelah melakukan penanaman adalah panen, panen dapat dibedakan menjadi 2 hal yaitu GKP (Gabah Kering Panen) dan GKG (Gabah Kering Giling). Ini

merupakan tindakan awal sebelum penanganan pasca panen dimulai. Pada umumnya, pemanenan dapat dilakukan ketika tanaman sudah dewasa dan terlihat ada perubahan. Pemanenan harus dilakukan pada waktu yang tepat. Waktu pemanenan yang tidak tepat akan mengurangi hasil maupun mutu suatu produk.” (wawancara pada 15 Januari 2018 Dinas Pertanian Kabupaten Jombang)

Hal ini diperkuat dengan salah satu petani organik yang ada di Kecamatan Bareng Nanik Saryati bahwa,

“gabah dari hasil panen umurnya harus diperhatikan karena pemanenan pada buah yang masih muda rata-rata akan menyebabkan keriput, sedangkan pemanenan pada buah yang tua justru mengakibatkan buah menjadi kecambah”(wawancara pada 1 Februari 2018)

Gambar 10



Keterangan: proses panen beras organik di Kecamatan

Bareng

Dari dua pernyataan diatas bahwa dapat disimpulkan bahwa panen merupakan tahap pertama yang memiliki peran penting didalam Sistem Pertanian Organik untuk tahap-tahap selanjutnya. Setelah melakukan panen langkah selanjutnya dilakukan proses pengeringan yang bertujuan untuk mengurangi kandungan air di dalam gabah. Hal ini diperkuat dengan penjelasan Rudi Priono S. P selaku Fungsional Penyuluhan Pertanian bahwa,

“Pengeringan merupakan salah satu kegiatan pascapanen yang penting, dengan tujuan agar kadar air gabah aman dari kemungkinan berkembangbiaknya serangga dan mikroorganisme seperti jamur dan bakteri, pengeringan harus segera mungkin dilaksanakan sejak saat panen. Apabila pengeringan tidak dapat dilangsungkan maka usahakan agar gabah yang basah tidak di tumpuk tetapi ditebarkan untuk menginbdari kemungkinan terjadinya fermentasi”(wawancara pada 15 Januari 2018 Dinas Pertanian Kabupaten Jombang)

Hal ini diperkuat dengan salah satu petani organik yang ada di Kecamatan Bareng Pak Aspandi selaku ketua kelompok organik bahwa,

“proses pengeringan sangat penting, apabila masih ada gabah yang basah menyebabkan timbulnya retak-retak pada gabah dan sebaliknya gabah kalau terlalu kering maka akan mengakibatkan pecah saat digiling, saat dalam kondisi terlalu basah juga kurang baik untuk penyimpanan pada gudang sebab gampang terserang hama gudang, cendawan, dan jamur. Tujuan dari pengeringan bukan hanya menekan biaya transportasi akan tetapi menambah kualitas dari beras organik tersebut.”(wawancara pada 1 Februari 2018 pada Dinas Pertanian Kabupaten Jombang)

Dari dua pernyataan dapat disimpulkan bahwa proses pengeringan yang tepat akan menjadikan beras organik lebih berkualitas dan dapat tahan dari hama serta mencegah untuk berferemntasi beras organik tersebut. Setelah

dilakukan pengeringan maka langkah selanjutnya adalah beras tersebut di tampung pada Gapoktan. Tujuan dari adanya ditampung kepada Gapoktan adalah agar petani organik mampu merawat agar kondisi dari beras organik tersebut kualitasnya masih terjaga. Hal ini disampaikan oleh Rudi Priono selaku Fungsional Penyuluh Pertanian bahwa,

“tujuan dari ditampung pada kelompok tani adalah agar mereka tetap menjaga beras organik untuk menjaga kualitasnya tetap bagus. Setelah dilakukan proses selanjutnya sampai penjualan kualitas dari beras organik masih terjaga.”(wawancara pada 15 Januari 2018 Dinas Pertanian Kabupaten Jombang)

Pernyataan diatas diperkuat dengan temuan peneliti yang ada di lapangan yaitu banyaknya karung-karung beras organik yang sudah di jemur dan siap penggilingan. Dari pernyataan diatas serta temuan peneliti di lapangan maka dapat disimpulkan bahwa setelah dilakukan pengeringan maka tahap selanjutnya adalah beras organik ditampung pada kelompok tani Desa bareng untuk melakukan perawatan agar dapat mempertahankan dari kualitas beras organik

Gambar 11



Keterangan: beras organik yang ditampung oleh Gapoktan.

Setelah beras organik diserahkan pada kelompok tani maka langkah selanjutnya adalah penggilingan beras organik yang berfungsi untuk memisahkan bulir padi dengan kulitnya. Hal ini diperkuat oleh Rudi Priono S. P. selaku Fungsional Penyuluh Pertanian bahwa,

”mesin penggilingan padi diperuntukan untuk mempermudah proses pemisahan bulir beras dengan kulitnya, dengan tetap mempertahankan mutu beras dan meminimalisist kehilangan yang sering terjadi pada penggilingan atau pemisahan bulir beras dari kulitnya yang dilakukan secara manual, untuk itu mesin penggilingan padi sangat penting untuk proses pembentukan beras yang berkualitas.”(wawancara pada 15 Januari 2018 Dinas Pertanian Kabupaten Jombang)

Pernyataan diatas diperkuat kemabali oleh Sumiran S. P. selaku Penyuluh Pertanian Lapangan bahwa,

“selep pada beras organik harus benar-benar dibedakan antara konvensional dan organik, selep yang digunakan juga harus berbeda. Akan tetapi bila Cuma satu selep yang digunakan maka selep tersebut harus terjadwal sehingga tetap dapat digunakan pada pertanian

organik.”(wawancara pada 1 Februari 2018 Dinas Pertanian Kabupaten Jombang)

Gambar 12



Keterangan: proses penggilingan

Dari pernyataan-pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa gabah organik harus dilakukan penggilingan untuk memisahkan dari bulir beras terhadap kulitnya. Dan menggunakan alat untuk menggiling atau memisahkan bulir beras dengan kulitnya menggunakan mesin agar kualitas dari beras organik tetap terjaga. Langkah selanjutnya setelah melakukan penggilingan adalah sortasi. Sortasi dilakukan untuk memisahkan produk yang baik dengan yang buruk walaupun cacat dari segi mekanis ataupun alami. Hal ini diperkuat dari pernyataan Sumiran S. P. selaku Penyuluh Pertanian Lapangan Kecamatan Bareng bahwa,

“sortasi adalah bentuk kegiatan yang dilakukan petani untuk melakukan pemisahan antara produk yang baik maupun rusak, entah dari segi mekanis pada saat penggilingan ataupun alami. Penentuan mutu bulir padi dapat dilihat dari kebersihan produk, ukuran, bobot, warna, bentuk, kesegaran dan lain-lain. Sortasi dapat dilakukan melalui mesin ataupun manual.”(wawancara pada 15 Januari 2018 Dinas Pertanian Kabupaten Jombang)

Pernyataan diatas diperkuat kembali oleh pernyataan Haris Khusuma selaku Petugas Pertanian Kecamatan Jombang bahwa,

“dalam proses mensortasi ada 2 bentuk yaitu manual dan mekanisme. Sortasi manual dilakukan dengan menggunakan indera manusia contohnya sortasi warna dan tingkat kerusakan bulir beras dilihat dengan mata, sedangkan sortasi mekanis dapat dilakukan menggunakan mesit atau alat tertentu contohnya sortasi menurut ukuran atau berat yang diukur dengan timbangan.” (wawancara pada 15 Januari 2018 Dinas Pertanian Kabupaten Jombang)

Gambar 13



Keterangan: proses sortasi yang dilakukan oleh ketua kelompok tani.

Dari dua pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk mendapatkan bulir padi yang bermutu maka perlu adanya tahap sortasi karena pada tahap sortasi petani organik mampu untuk memisahkan bulir padi organik yang baik dan buruk. Selanjutnya setelah dilakukannya tahap sortasi langkah selanjutnya adalah pengemasan. Pengemasan dilakukan petani untuk memasarkan produk beras organik. Pada tahap pengemasan petani dibantu dengan Dinas Pertanian untuk melakukan desain dari produk tersebut agar mampu menarik perhatian. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Rudi Priono selaku Fungsional Penyuluh Pertanian bahwa,

“pada saat pengemasan petani dibantu dengan pihak kami melakukan desain untuk produk kami. Desain tersebut harus menarik agar pembeli tertarik untuk membeli produk kami. Kota Jombang identik dengan *Ringin Contong*nya oleh sebab itu kami kepikiran untuk membuat *Ringin Contong* tersebut untuk dijadikan desain kami dan tak lupa disertai dengan logo sertifikasi dari LSO untuk dapat diakui dalam skala nasional maupun internasional” (wawancara pada 15 Januari 2018 Dinas Pertanian Kabupaten Jombang)

Gambar 14



Keterangan: proses pengemasan beras organik.

Dari pernyataan Rudi Priono diperkuat dengan temuan peneliti lapangan bahwa desain yang digunakan benar menggunakan desain Ringin Contong dan disertai logo dari LSO yang mempunyai fungsi untuk dapat diakui secara nasional maupun internasional. Tahap terakhir setelah dilakukan pengemasan adalah penyimpanan dan penjualan. Pada tahap ini petani dan dinas pertanian setelah melakukan pengemasan maka petani menyimpan produk tersebut pada gudang ataupun rumah Pak Aspandi selaku Ketua kelompok tani organik Kecamatan Bareng. Dinas Pertanian berperan untuk memasarkan dari hasil beras organik tersebut. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Rudi Priono selaku Fungsional Penyuluh Pertanian bahwa,

“pada tahap terakhir yaitu penyimpanan dan penjualan tugas dari petani organik adalah untuk menyimpan hasil tersebut yang mempunyai tujuan apabila dinas pertanian maupun warga yang ingin membeli maka dapat langsung ke rumah Pak Aspandi. Sedangkan pihak Dinas Pertanian berusaha untuk memasarkan beras organik tersebut. Sudah ada beberapa swalayan akan tetapi kami tidak sanggup untuk memenuhi permintaan swalayan tersebut. Akan tetapi kami sudah menjualkan hasil organik tersebut kepada KUD-KUD yang ada disekitar Kabupaten Jombang terakhir KUD Kota Kediri dan Mojokerto minta untuk dikirim”(wawancara pada 15 Januari 2018 Dinas Pertanian Kabupaten Jombang)

Dari pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pada tahap penyimpanan dan penjualan terdapat bagi tugas yang mana pada saat penyimpanan petani organik menyimpan beras organik yang sudah di kemas di rumah ketua kelompok petani organik yaitu Pak Aspandi dan pihak Dinas Pertanian melakukan Penjualan kepada pihak-pihak luar. Dari kedua bentuk

kerjasama yang dilakukan petani organik dengan Dinas Pertanian yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan petani organik.

2) Output dari pelaksanaan Sistem Pertanian Organik

Output dari adanya sistem pertanian organik adalah untuk menciptakan hasil produk-produk dan lahan persawahan yang telah disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Organik (LSO) yang berpusat di Kota Mojokerto. Hal ini diperkuat dengan pernyataan oleh Rudi Priono, S. P. selaku fungsional penyuluh petani bahwa,

“dengan adanya sistem pertanian organik tentu saja untuk melindungi produk serta lahan perlu adanya sertifikasi. Sertifikasi dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Organik yang paling dekat dengan Jombang adalah Mojokerto, oleh sebab itu kami mengundang mereka untuk melakukan sertifikasi. Sertifikasi pada kabupaten jombang khususnya lahan yang telah ditetapkan di daerah kecamatan Bareng sudah di sertifikasi cukup lama yaitu sekitar tahun 2011”(wawancara pada 15 Januari 2018 Dinas Pertanian Kabupaten Jombang)

Dengan adanya sertifikasi tentu saja dapat menjadi perhatian khusus dari petani karena dapat membantu untuk proses penjualan dengan adanya sertifikasi sebagai perlindungan produk di pasaran dengan memasang logo organik Indonesia pada setiap kemasan produk organik.

Gambar 15



Keterangan: Sertifikat organik yang diberikan kepada kelompok tani desa Banjarjari

Pernyataan diatas juga diperkuat oleh salah satu petani organik yaitu Wartono bahwa,

“dari segi pemasaran kita dibantu oleh adanya logo dari organik Indonesia, sehingga produk dari organik dapat bersaing di pasaran. Akan tetapi kami masih belum siap dalam jumlah yang besar sesuai permintaan pasar yaitu 125 kg perminggu, karena jumlah beras organik yang terbatas.”(wawancara pada 1 Februari 2018 Dinas Pertanian Kabupaten Jombang)

Kedua Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program pertanian organik ini sangat dirasakan betul bagi petani organik yang sudah disertifikasi yaitu berupa lebel organik yang banyak manfaatnya. Petani organik terbantu dengan adanya sertifikasi yang di ajukan oleh Dinas

Pertanian terhadap Lembaga Sertifikasi Organik yang ada di Mojokerto, sehingga para petani tidak perlu repot-repot untuk mendaftarkan lahan serta produknya ke Lembaga Sertifikasi Organik cabang Mojokerto.

3) Outcome dari pelaksanaan Sistem Pertanian Organik

a) Manfaat Jangka Pendek

Manfaat secara langsung yang dirasakan oleh petani organik adalah dapat menekan biaya produksi dengan cara memanfaatkan limbah organik disekitar dan dijadikan sebagai pupuk organik. Hal ini diperkuat lagi oleh pernyataan dari Rudi Priono S. P. selaku Fungsional penyuluh petani bahwa,

“Manfaat yang didapatkan petani dalam jangka pendek adalah dapat menekan biaya produksi dan memanfaatkan kotoran hewan atau limbah yang dijadikan sebagai pupuk organik dimana mereka mendapatkan bahannya secara murah bahkan cuma-cuma.”(wawancara pada 15 Januari 2018 Dinas Pertanian Kabupaten Jombang)

Pernyataan diatas diperkuat lagi dari pernyataan Pak Aspandi selaku Ketua Kelompok Tani Organik di Desa Bareng bahwa,

“benar mas, dengan adanya sistem pertanian organik kami dapat menekan biaya pengeluaran produksi terutama dalam pembelian pupuk, karena pada saat diklat kami dilatih untuk membuat pupuk dari kotoran sapi. Serta di desa kami banyak yang ternak sapi sehingga memudahkan kami untuk membelinya. Cukup dengan Rp.150.000,00 kami dapat memborong sekitar 5 ton kotoran sapi yang siap dijadikan pupuk”(wawancara pada 15 Januari 2018 Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang)

Dari pernyataan-pernyataan diatas maka dapat di simpulkan bahwa manfaat yang didapat dari pertanian organik khususnya manfaat jangka pendek adalah dapat menekan biaya pengeluaran produksi dengan cara memanfaatkan limbah ataupun kotoran ternak yang diolah kembali dan dijadikan pupuk sendiri.

b) Manfaat Jangka Menengah

Manfaat jangka menengah yang diberikan dengan adanya pertanian organik adalah kualitas dari produk organik lebih bagus ketimbang konvensional, meningkatnya nilai jual serta hasil produksi yang meningkat dari tahun pertama. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Rudi Priono S. P. selaku Fungsional penyuluh petani bahwa,

“ada 3 manfaat jangka menengah yang dirasakan petani organik yaitu kualitas yang unggul dari pada produk biasa dan dapat dibuktikan sendiri bahwa nasi dari hasil organik apabila dibiarkan selama 3 hari tidak basi, meningkatnya nilai jual di pasaran. Harga dari produk organik ini per 5 kg sebesar Rp. 60.000,00. Produksi yang meningkat dilihat dari tahun pertama sebab pada tahun pertama masih proses pengalihan dari an-organik ke organik”(wawancara pada 15 Januari 2018 Dinas Pertanian Kabupaten Jombang)

Pernyataan diatas juga diperkuat oleh pernyataan Pak Aspandi selaku Ketua Gabungan Kelompok Tani bahwa,

“yang kami rasakan selama ini adalah kualitas dari organik dapat bertahan lebih lama serta dari tanaman padi sawah sebelah di serang hama wereng tapi sawah kami tetap aman. Harga dari beras organik juga dapat meningkatkan kesejahteraan petani organik karena berkisar

di antara Rp. 60.000,00 per 5kg nya. Padahal harga beras biasa berkisar Rp. 50.000,00 sampai dengan Rp. 60.000,00 itupun membutuhkan biaya yang lebih besar. Hasil produksi meningkatkan akan tetapi stabil dikisaran 4-5,5 ton per hektare”(wawancara pada 15 Januari 2018 Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang)

Dapat disimpulkan dari dua pernyataan diatas bahwa manfaat yang didapat khususnya manfaat jangka menengah adalah kualitas produk lebih maksimal, dapat mendongkrak nilai penjualan serta produksi pertanian organik dapat bersaing dengan pertanian konvensional

c) Manfaat Jangka Panjang

Manfaat jangka panjang yang dirasakan oleh petani organik adalah dengan menggunakan pupuk organik maka petani organik mampu menjaga kelestarian alam khususnya dalam menjaga kesuburan tanah serta dapat menjadikan petani yang mandiri dengan memproduksi pupuk organik sendiri. Hal ini di dukung oleh pernyataan Rudi Priono S. P. selaku Fungsional penyuluh petani bahwa,

“manfaat yang didapatkan petani yaitu dengan tidak menggunakan pupuk kimia maka kelestarian tanah terjaga sehingga dengan terjaganya kelestarian tanah tersebut maka hasil produksi jelas mengalami kenaikan. Faktor tanah lah yang mempengaruhi banyak atau tidaknya produksi dari tanaman pangan. setelah itu petani dengan membuat pupuk sendiri dengan memanfaatkan kotoran hewan dan limbah maka jelas petani tidak bergantung pada pihak lain yang menawarkan harga pupuk kimia yang di subsidi”(wawancara pada 15 Januari 2018 Dinas Pertanian Kabupaten Jombang)

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa manfaat jangka panjang yaitu dengan tidak menggunakan pupuk kimia maka kelestarian tanah pun terjaga sehingga dapat menaikkan hasil produksi tanaman pangan serta petani organik tidak bergantung dengan adanya pupuk bersubsidi yang disediakan oleh pemerintah, karena petani organik mampu membuat pupuk dari bahan yang mudah didapatkan dan terjangkau.

4) Dampak dari pelaksanaan Sistem Pertanian Organik

Dampak dari sistem pertanian organik ini sangat dapat dirasakan oleh petani organik dan Dinas Pertanian. Karena sistem pertanian organik merupakan salah satu tujuan Dinas Pertanian yang menjadikan Kabupaten Jombang sebagai petani organik serta dapat mensejahterakan petani lewat pertanian organik dan tidak ada dampak negative yang dirasakan oleh petani organik. Hal ini di perkuat dengan pernyataan Rudi Priono S. P. selaku Fungsional penyuluh petani bahwa,

“dengan adanya sistem pertanian organik ini yang merasa dirugikan adalah justru kios-kios atau pihak swasta yang menyediakan pupuk kimia, sehingga kami tahan tidak diberikan kepada petani organik. Kalau mau bekerjasama dengan kami maka pihak swasta maupun kios-kios menyediakan pupuk organik itupun dengan harga yang murah, akan tetapi sampai saat ini belum ada yang berani untuk menyediakan pupuk organik dengan harga yang murah. Kalau dampak positif banyak sekali yang didapatkan, hampir sama dengan manfaat jangka pendek, menengah maupun jangka panjang”(wawancara pada 15 Januari 2018 Dinas Pertanian Kabupaten Jombang)

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dampak positif dari pelaksanaan Sistem Pertanian Organik cukup dirasakan oleh Dinas Pertanian maupun petani organik. Selain tercapainya tujuan dari Dinas Pertanian, pertanian organik juga mampu menjual produk-produk organik lebih mudah dan mampu menarik perhatian masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bagi petani organik.

3. Faktor-Faktor Pendukung Serta Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Sistem Pertanian Organik.

Pelaksanaan Sistem Pertanian Organik dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik dan lancar karena peran dari Dinas Pertanian yang mendukung segala aspek sehingga petani organik merasa dimudahkan dan terbantu. Akan tetapi perlu adanya evaluasi secara mendasar untuk menyikapi faktor pendukung serta penghambat agar Sistem Pertanian Organik ini dapat berjalan dengan lebih baik lagi. Berikut adalah faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan sistem pertanian organik, yaitu :

a. Faktor Pendukung Internal.

1. Dinas Pertanian Menyediakan Sarana-Prasarana.

Dalam Sistem Pertanian Organik, Dinas Pertanian menyediakan sarana prasarana dalam mensukseskan pertanian organik tersebut. Ada beberapa bantuan dan fasilitas yang diberikan Dinas Pertanian yaitu diantaranya memberikan pelatihan, memberikan alat

bantu Coper, menyediakan agen hijau sebagai pemberantas hama tikus, sampai pemasaran. Hal ini disampaikan Rudi Priono S. P. selaku Fungsional Penyuluh Pertanian bahwa,

“kami dari dinas pertanian memberikan banyak sekali bantuan kepada petani, diantaranya memberikan pelatihan selama 3 hari kepada petani organik, memberikan bantuan berupa mesin chopper untuk menggiling kotoran hewan agar menjadi halus, memberikan bantuan agen hijau yaitu berupa pagupon yang ditinggali oleh burung hantu sebagai pemangsa tikus, sampai pasca panen, kami membantu petani organik untuk memasarkan produk hasil dari organik kepada dinas koperasi yang ada di kabupaten jombang dan membantu petani yang mendaftarkan sertivikat organik untuk diajukan ke provinsi”(wawancara pada 15 Januari 2018 Dinas Pertanian Kabupaten Jombang)

Hal ini diperkuat dengan beberapa temuan peneliti yang ada di lapangan dengan adanya mesin coper yang ada di ruang pertemuan serta adanya beberapa pagupon yang disebar di daerah persawahan organik milik Pak Aspandi.

Lab terpadu merupakan fasilitas yang menunjang tentang adanya program sistem pertanian organik. Lab terpadu digunakan dinas pertanian untuk melakukan penelitian terkait kandungan apa saja yang ada di dalam tanah, air maupun hasil dari tanaman organik. Untuk menggunakan lab ini, Dinas Pertanian bekerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Organik guna menentukan layak tidaknya lahan dan hasil produksi dikatakan sebagai organik. Hal ini juga diperkuat

dari pernyataan Rudi Priono S. P. selaku Fungsional Penyuluh Pertanian bahwa,

“Lab terpadu merukan fasilitas penunjang bagi kami dan sangat membantu untuk program ini. Lab terpadu digunakan untuk melihat kandungan apa saja yang ada di dalam tanah, air dan hasil produksi organik. Terutama pada bagian airnya, lab ini berfungsi untuk mengetahui apakah kandungan air memiliki residu yang banyak atau tidak karena air sangat penting di dalam pertanian. Kami di bantu oleh LSO untuk melakukan penelitian karena pihak LSO lah yang mengerti tentang standart kandungan residu dan kimia yang ada di dalam tanah dan air sehingga dapat dikatakan sebagai organik”(wawancara pada 15 Januari 2018 Dinas Pertanian Kabupaten Jombang)

Artinya dengan adanya lab terpadu pada Dinas Pertanian dapat membantu untuk menetapkan layak atau tidaknya lahan serta hasil produksi dapat dikatakan sebagai organik. Karena dari hasil lab dapat mengetahui standart kandungan yang ada di tanah, air dan hasil produksi. Serta pihak LSO juga berkaitan dengan Lab terpadu ini karena LSO lah yang menetapkan standart tersebut.

2. Komitmen Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanian Untuk Mengembangkan Sistem Pertanian Organik.

Dinas Pertanian Kabupaten Jombang sebagai pihak yang berwenang di dalam Sistem Pertanian Organik tentunya diperlukan Sumber Daya Manusia yang berkomitmen dan berkompeten. Hal ini disampaikan oleh Rudi Priono S. P. selaku Fungsional Penyuluh Pertanian bahwa,

“dinas pertanian mempunyai pegawai sekitar 200 orang yang mana semua petugas tentunya sangat mendukung dan memahami betul tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Semua petugas mampu menguasai tupoksi yang sudah ditetapkan sehingga dalam program ini petugas mampu dan berkompeten untuk mensukseskan program pertanian organik.” (wawancara pada 15 Januari 2018 Dinas Pertanian Kabupaten Jombang)

Hal ini tidak sesuai dengan apa yang ada dilapangan, hanya beberapa pegawai yang paham terkait sistem pertanian organik ini.

b. Faktor Pendukung Eksternal.

1. Potensi Sumber Daya Alam yang Melimpah.

Sumber daya alam yang ada di Kabupaten Jombang sangatlah berlimpah terutama pada lahan persawahan. Karena sawah yang ada di Kabupaten Jombang merupakan media yang paling tepat dengan adanya Sistem Pertanian Organik ini. Hal ini ditunjang dengan pendapat Rudi Priono S. P. selaku Fungsional Penyuluh Pertanian bahwa,

“potensi dari Sumber Daya Alam yang ada di Kabupaten Jombang sangatlah besar serta sawah merupakan media yang tepat apabila diterapkannya pertanian organik, oleh sebab itu dengan adanya Sistem Pertanian Organik sangatlah menunjang apabila diterapkan pada Kabupaten Jombang. Akan tetapi dari besarnya potensi area persawahan yang ada di Kabupaten Jombang hanya 3 hektare saja luas lahan yang dijadikan sebagai pertanian organik.” (wawancara pada 15 Januari 2018 Dinas Pertanian Kabupaten Jombang)

Hal ini diperkuat dengan adanya data yang peneliti peroleh terkait luas lahan sawah dan pekarangan pada tahun 2015 pada kabupaten Jombang

Tabel 4

Luas Lahan Sawah, Tegal, dan Pekarangan Tahun 2015

| No | Kecamatan | Lahan Sawah | | | | | | | Tegal | Pekarangan |
|---------------|------------|----------------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------|--------------|----------|---------------|---------------|
| | | Irigasi teknis | Irigasi 1/2 teknis | Irigasi sederhana | Irigasi desa/ non PU | Tadah hujan | Pasang surut | Lebak | | |
| 1 | Bandar KM | 2,116 | - | - | - | - | - | - | 2,116 | 46 |
| 2 | Perak | 2,015 | - | - | - | - | - | - | 2,015 | 247 |
| 3 | Gudo | 2,584 | - | - | - | - | - | - | 2,584 | 397 |
| 4 | Diwek | 2,961 | - | - | - | - | - | - | 2,961 | 547 |
| 5 | Ngoro | 3,051 | - | - | - | 41 | - | - | 3,092 | 235 |
| 6 | Mojowarno | 3,848 | - | - | - | - | - | - | 3,848 | 536 |
| 7 | Bareng | 3,182 | - | - | - | 10 | - | - | 3,192 | 1,528 |
| 8 | Wonosalam | 488 | - | - | - | - | - | - | 488 | 646 |
| 9 | Mojoagung | 2221 | - | - | - | - | - | - | 2,221 | 1,275 |
| 10 | Sumobito | 3284 | - | - | - | - | - | - | 3,284 | 695 |
| 11 | Jogoroto | 1749 | - | - | - | - | - | - | 1,749 | 565 |
| 12 | Peterongan | 1,902 | - | - | - | - | - | - | 1,902 | 736 |
| 13 | Jombang | 1,655 | - | - | - | 38 | - | - | 1,693 | 1,041 |
| 14 | Megaluh | 1,853 | - | - | - | - | - | - | 1,853 | 127 |
| 15 | Tembelang | 2,260 | - | - | - | - | - | - | 2,260 | 694 |
| 16 | Kesamben | 3,768 | - | - | - | - | - | - | 3,768 | 391 |
| 17 | Kudu | 1,045 | - | - | - | 497 | - | - | 1,542 | 972 |
| 18 | Ngusikan | 353 | - | - | - | 871 | - | - | 1,224 | 200 |
| 19 | Ploso | 618 | - | - | - | 1,393 | - | - | 2,011 | 220 |
| 20 | Kabuh | - | - | - | - | 2579 | - | - | 2,579 | 190 |
| 21 | Planda | 980 | - | - | - | 1345 | - | - | 2,325 | 300 |
| JUMLAH | | 41,933 | 0 | 0 | - | 6,774 | - | - | 48,707 | 11,588 |

sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Jombang

2. Pasar Menerima Hasil dari Produk Organik.

Hasil produksi dari pertanian organik adalah kualitas yang sangat unggul dan jumlahnya yang terbatas. Banyak permintaan pasar yang tertarik dengan hasil produksi dari pertanian organik akan tetapi dari permintaan pasar yang meningkat petani belum sanggup untuk memenuhi target pasar yang diminta. Hal ini diperkuat dengan

pernyataan dari Rudi Priono S. P. selaku Fungsional Penyuluh Pertanian bahwa,

“banyak sekali mas permintaan pasar terkait produk pertanian ini, kita selaku dinas pertanian menjebatani antara petani dengan pihak pihak yang ingin mendapatkan dari hasil organik. Pada tahun kemaren superindo kabupaten jombang tertarik untuk dijadikan distributor hasil dari beras organik. Pihak superindo meminta 125 kg perminggunya, setelah kami dan pak Aspandi hitung-hitung maka stok yang kami punya tidak mencukupi persyaratan yang diminta oleh superindo dan akhirnya kami mengundurkan diri. Akhirnya kami hanya melayani melalui contact pribadi saja dan sebagian di taruh pada KUD jombang”(wawancara pada 15 Januari 2018 Dinas Pertanian Kabupaten Jombang)

Artinya peran dari Dinas Pertanian belum selesai setelah masa panen, Dinas pertanian menjebatani antara petani dan pembeli dari hasil pertanian organik. Sehingga dengan peran dari Dinas Pertanian ini mampu membantu petani untuk menjualkan atau menawarkan produk dari organik ke pasaran.

c. Faktor Penghambat Internal.

1. Masih Adanya Petugas Bermain Curang.

Dengan adanya komitmen yang sudah dilakukan oleh semua petugas Dinas Pertanian akan tetapi masih ada beberapa oknum-oknum yang bermain curang. Hal ini disampaikan langsung oleh Rudi Priono S. P selaku Fungsional Penyuluh Pertanian bahwa,

“masih terdapat petugas bermain curang dalam hal ini, sebagai contohnya masih adanya pelaku atau oknum pns yang menjual pupuk kimia kepada petani konvensional maupun organik

sehingga banyaknya petani yang gagal mendapatkan sertivikat dari LSO karena masih ada beberapa kandungan kimia di dalamnya. Ibarat dokter pasti mempunyai apotek sendiri hal ini sama saja dengan pns kami yang masih mempunyai kios-kios penjual pupuk kimia. Akan tetapi sekarang apabila ada oknum yang berbuat curang maka kami akan berbuat tegas kepada oknum tersebut”(wawancara pada 15 Januari 2018 Dinas Pertanian Kabupaten Jombang)

Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi oleh pihak Dinas Pertanian adalah adanya beberapa oknum yang melakukan kecurangan. Oknum dengan sengaja menjual pupuk kimia kepada petani konvensional maupun organik demi kepentingan individu. Oknum yang tertangkap basah melakukan kecurangan akan dikenakan sanksi ringan sampai berat tergantung pada kecurangan apa yang dilakukan.

d. Faktor Penghambat Eksternal.

1. Mengubah Perilaku Petani yang Sulit.

Mengubah perilaku petani adalah hal yang tersulit dalam melaksanakan pertanian organik ini. Dari sikap petani yang sulit untuk dirubah, pengetahuan tentang pentingnya menjaga kelestarian alam serta menjadikan petani lebih terampil lagi merupakan hal tersulit didalam mensukseskan program pertanian organik ini. Hal ini disampaikan oleh Rudi Priono S. P selaku Fungsional Penyuluh Pertanian bahwa,

“ yang paling sulit dalam hal ini adalah merubah sikap petani konvensional untuk dijadikan petani organik karena menurut

mereka dengan melihat hama wereng yang berjatuh setelah disemprot pestisida adalah suatu kepuasan tersendiri padahal di dalam penggunaan pestisida yang berlebihan akan berdampak buruk pada lingkungan sekitar. Selanjutnya mengubah pola pikir petani juga sulit mereka takut untuk beralih pada organik karena pasti mengalami penurunan pada tahun pertama organik akan tetapi selanjutnya pasti akan menguntungkan petani tersebut entah dari hasil yang meningkat sampai kesuburan tanah. Ditambah lagi petani konvensional enggan untuk repot repot membuat pupuk organik sendiri, mereka lebih memilih membeli pupuk yang sudah tersedia pada kios-kios.”(wawancara pada 15 Januari 2018 Dinas Pertanian Kabupaten Jombang)

Pernyataan diatas diperkuat lagi oleh Pak Aspandi selaku

Ketua kelompok Tani bahwa,

“sulit mas untuk mengajak mereka beralih pada organik, karena mereka khawatir dengan gagal panen pada saat tahun pertama. Saya sendiri di Kabupaten Jombang ibarat babat alas untuk pertanian organik di Kabupaten Jombang, akan tetapi sekarang sudah ada beberapa petani yang beralih ke organik akan tetapi berada pada kecamatan bandarkedungmulyo.”(wawancara pada 15 Januari 2018 Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang)

Dari pernyataan-pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa hambatan yang sulit untuk ditangani adalah mengubah perilaku dari petani serta wawasan tentang pentingnya menjaga kelestarian alam. Apabila petani sudah mengetahui tentang pentingnya menjaga kelestarian alam maka dampak positif yang didapatkan petani sangatlah banyak. Hal ini Dinas Pertanian harus mampu melakukan penyuluhan atau sosialisasi secara berkala tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.

2. Masih Banyaknya Masyarakat Belum Mengetahui Adanya Produk Organik.

Wawasan masyarakat tentang pertanian organik sendiri juga masih sangat minim. Banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya beras organik yang memiliki kualitas unggul dari pada beras biasa. Hal ini disampaikan oleh Rudi Priono S. P. selaku Fungsional Penyuluh Pertanian bahwa,

“masih banyaknya masyarakat yang belum mnegerti tentang adanya beras organik ini, padahal dari segi kualitas jelas lebih unggul beras organik dari pada beras biasa, hal ini dapat dibuktikan bahwa nasi yang sudah dimasak dibiarkan selama 3 hari tidak basi, dari segi kandungan nutrisi juga berbeda, apabila kita sarapan pakai nasi biasa maka jam 10-11 sudah merasa lapar lagi, berbeda dengan nasi organik apabila kita sarapan pakai nasi organik maka dapat bertahan sampai jam 12-1 siang. Hal ini disebabkan beras biasa banyak mengandung residua tau bahan kimia yang telah disemprotkan petani dan masuk ketubuh kita berbeda dengan organik yang tidak memakai bahan kimia. Oleh sebab itulah beras organik dapat bertahan lama dan tidak merasa cepat lapar. Beras organik juga cocok bagi orang yang melakukan diet.”(wawancara pada 15 Januari 2018 Dinas Pertanian Kabupaten Jombang)

Artinya masih banyak masyarakat belum mengetahui tentang adanya produk dari pertanian organik. Hal ini diperkuat dengan temuan-temuan peneliti di luar lapangan bahwa tidak semua masyarakat mengetahui adanya beras organik yang lebih menguntungkan apabila dikonsumsi oleh masyarakat itu sendiri.

D. Analisis Data

Didalam pertanian organik itu sendiri pasti memiliki prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan yang berguna untuk menjaga kelestarian lingkungan. Menurut IFOAM dalam Gribaldi, 2009:20 mengatakan bahwa pertanian organik didasarkan pada prinsip-prinsip yaitu prinsip kesehatan, ekologi, keadilan dan perlindungan. Pada implementasi sistem pertanian organik terdapat beberapa prinsip-prinsip yang sudah diterapkan antara lain prinsip kesehatan, keadilan dan perlindungan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Rudi Priono S. P. dan Sumiran S. P. yang mengatakan bahwa kesehatan yang dimaksud adalah kesehatan tanah yang diperbaiki, karena menurut sumber yang ada selama ini petani memakai bahan-bahan yang mengandung kimia seperti pupuk dan juga pemberantas hama. Dari pernyataan diatas maka sama dengan prinsip kesehatan yang menyatakan bahwa pertanian organik harus melestarikan dan meningkatkan kesehatan tanah, tanaman, hewan, manusia dan bumi sebagai satu kesatuan dan tak terpisahkan.

Sedangkan keadilan menurut sumber yang ada mengatakan bahwa manusia selama ini telah mengeksploitasi tanah dengan menggunakan pupuk kimia untuk meningkatkan hasil dari produksi yang mencapai maksimal. Resikonya dengan menggunakan pupuk kimia maka dapat merusak lingkungan, oleh sebab itu maka dengan menggunakan pertanian organik untuk tetap melestarikan lingkungan dan menghasilkan bagi manusia maka terwujudlah keadilan bagi manusia dan lingkungan. Hal ini sesuai dengan prinsip pertanian organik yang menyatakan bahwa

pertanian organik harus membangun hubungan yang mampu menjamin keadilan terkait dengan lingkungan dan kesempatan hidup bersama. Prinsip yang ketiga yaitu perlindungan, menurut sumber yang ada mengatakan bahwa dengan adanya pertanian organik maka petani organik mampu menekan biaya selama produksi padi dalam masa tanam sampai masa panen. Serta hasil dari pertanian organik memiliki nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan dengan beras biasa. Dari pernyataan diatas maka hal ini sesuai dengan prinsip pertanian organik tentang perlindungan yang menyatakan bahwa pertanian organik harus memberikan kualitas hidup yang baik bagi setiap orang yang terlibat, menyumbang bagi kedaulatan pangan dan pengurangan kemiskinan.

Adapun tujuan-tujuan dari pertanian organik menurut Agus Kardinan (2016:8) adalah mengembangkan keanekaragaman hayati, meningkatkan aktivitas biologi tanah, menjaga kesuburan tanah, mendaur-ulang limbah pertanian dan hewan untuk mengembangkan nutrisi dalam tanah sehingga meminimalkan penggunaan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui, mengandalkan sumber daya yang dapat diperbaharui pada sistem pertanian yang dikelola secara lokal, dan meningkatkan penggunaan tanah, air udara, secara baik, serta meminimalkan semua bentuk polusi yang dihasilkan dari kegiatan pertanian. Sedangkan didalam pertanian organik pada Dinas Pertanian Kabupaten Jombang terdapat beberapa tujuan yang sama dengan tujuan pertanian organik menurut Agus Kardinan yaitu mengembangkan keanekaragaman hayati, menurut narasumber pada Kabupaten Jombang yang sudah

menggunakan pertanian organik terdapat tiga jenis tanaman yaitu padi, kopi, dan coklat. Akan tetapi dari ketiga jenis tanaman tersebut tidak di tanam pada area persawahan yang sama melainkan terpisah. Tujuan yang kedua dan ketiga yaitu meningkatkan aktivitas tanah dan menjaga kesuburan tanah dalam jangka panjang, menurut Rudi Priono S. P. mengatakan bahwa dengan menggunakan pupuk organik maka kondisi tanah akan semakin subur pada jangka waktu yang panjang, dengan menggunakan pupuk organik juga yang terbuat dari kotoran hewan dan limbah rumah tangga maka terdapat aktivitas tanah yang mengakibatkan kesuburan tanah terjadi, akan tetapi membutuhkan waktu yang cukup lama.

Tujuan yang keempat yaitu mendaur-ulang limbah hal ini sudah sesuai dan diterapkan oleh pertanian organik yang ada pada Kecamatan Bareng yaitu dengan mengolah kotoran hewan dan limbah rumah tangga dalam artian sayuran, buah yang busuk, dan dedaunan didaur ulang dan dijadikan sebagai pupuk organik. Tujuan yang kelima yaitu meminimalkan semua bentuk polusi yang dihasilkan dari kegiatan pertanian sudah diterapkan pada pertanian organik yang ada pada Kecamatan Bareng, menurut Sumiran S. P. mengatakan dengan tidak menggunakan pestisida kimia pada pertanian organik maka polusi pada tanah dan air dapat ditekan. Alat yang digunakan untuk membajak sawah juga dicek betul apakah ada kebocoran bahan bakar sehingga tidak sampai bahan bakar tersebut tercampur pada tanah yang digunakan sebagai pertanian organik dan petani juga dilarang untuk merokok pada saat melakukan aktivitas pertanian.

Dari pernyataan diatas dan hasil pengamatan peneliti maka dapat dikatakan bahwa prinsip-prinsip dan tujuan dari implementasi kebijakan sistem pertanian organik yang ada pada Kecamatan Bareng sudah sesuai dengan teori yang ada, akan tetapi tidak semua prinsip-prinsip dari pertanian organik terpenuhi seperti prinsip ekologi.

1) Implementasi Kebijakan Sistem Pertanian Organik di Kabupaten Jombang

Kebijakan sistem pertanian organik merupakan kebijakan yang telah diterapkan dan menjadi kesepakatan antara Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, Dinas Pengairan, Aparat, serta petani menjadi objek yang dilandasi oleh Peraturan Menteri Pertanian nomor 64 Tahun 2013 tentang sistem pertanian organik. Hal ini sesuai dengan penjelasan teori pengertian implementasi kebijakan dalam arti seluas-luasnya, implementasi sering dianggap sebagai bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggara aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama diantara beragam pemangku kepentingan (*stakeholders*), aktor, organisasi (publik atau privat), prosedur, dan teknik secara sinergis yang digerakkan untuk bekerjasama guna menerapkan kebijakan kearah tertentu yang dikehendaki (Wahab, 2012:133).

Model proses implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (2012:158-159) menawarkan suatu model dasar, model yang mereka tawarkan mempunyai enam variabel yang membentuk kaitan (*linkage*) antara kebijakan dan kinerja (*performance*). Model seperti ini diungkapkan oleh Van Meter dan Van Horn, tidak hanya menentukan hubungan-hubungan antar variabel – variabel bebas dan variabel terikat mengenai kepentingan-kepentingan, tetapi juga menjelaskan hubungan-hubungan antara variabel-variabel bebas. Variabel tersebut dijelaskan oleh Van Meter dan Van Horn sebagai berikut ;

a. Ukuran-Ukuran Dasar dan Tujuan-Tujuan Kebijakan.

Variabel ini didasarkan pada kepentingan utama terhadap faktor-faktor yang menentukan kinerja kebijakan. menurut Van Meter dan Van Horn, identifikasi indikator-indikator kinerja merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan. ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan dalam menentukan studi implementasi merupakan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran suatu program yang dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak dipertimbangkan (Winarno, 2012:159-161).

Hal ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Dinas Pertanian kabupaten Jombang yaitu mendeskripsikan yang menjadi tujuan-tujuan kebijakan sistem pertanian organik yaitu menjadikan semua

area persawahan di Kabupaten Jombang dengan pertanian organik, dengan pertanian organik petani mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan melindungi area persawahan di Kabupaten Jombang dengan memberikat sertifikat organik sebagai landasan hukumnya, serta yang menjadikan ukuran dasar kebijakan sistem pertanian organik ini adalah Peraturan Menteri Pertanian nomor 64 Tahun 2013 tentang sistem pertanian organik.

b. Sumber Daya

Proses implementasi kebijakan yang selanjutnya menurut Van Mater dan Van Horn adalah sumber-sumber yang tersedia. Sumber-sumber layak mendapat perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. sumber-sumber yang dimaksud mencakup dana atau perangsang (*incentive*) lain yang mendorong dan mempelancar implementasi yang efektif. (Winarno, 2012: 161).

Hal ini telah sesuai yaitu didalam pengimplemntasian sistem pertanian organik, Dinas Pertanian Kabupaten Jombang telah menyiapkan untuk keberhasilan dari kebijakan tersebut. Anggaran yang digunakan untuk pertanian organik bersumber dari dana APBN, APBD serta dari pihak swasta. Sedangkan sumber daya manusia yang dikerahkan untuk melancarkan kebijakan tersebut adalah sumber daya

manusia dari Dinas Pertanian, Dinas Pengairan, Aparat, serta petani yang memiliki pola pikir yang baik. Serta pendukung lainnya yaitu Dinas Pertanian telah menyiapkan lahan, benih, air serta alat yang digunakan untuk sistem pertanian organik.

c. Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksana.

Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi yang berhasil sering kali membutuhkan mekanisme-mekanisme dan prosedur-prosedur lembaga. Hal ini sebenarnya akan mendorong kemungkinan yang lebih besar bagi pejabat-pejabat (atasan) untuk mendorong pelaksana (pejabat bawahan) bertindak dalam suatu cara yang konsisten.

Dalam hal ini Dinas Pertanian melakukan persiapan terhadap kelompok tani yang memperkenalkan sistem pertanian organik di kantor Kecamatan Bareng. Dinas Pertanian memberikan sejumlah materi tentang pertanian organik. kelompok tani Desa Banjarsari tertarik untuk mengikuti kebijakan tersebut. Komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Jombang terhadap kelompok tani dapat dikatakan berhasil karena kelompok tani Desa Banjarsari telah mampu menerapkan sistem pertanian organik yang awalnya sangat rumit. Dari proses penyemaian, pengolahan lahan,

penanaman, pengairan, pemupukan, pengendalian hama dan proses panen kelompok tani telah melaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan sudah dijelaskan oleh Dinas Pertanian pada saat memperkenalkan Sistem Pertanian Organik.

2) Bentuk Kegiatan Dari Kebijakan Sistem Pertanian Organik Pada Dinas Pertanian Kabupaten Jombang

Di dalam sistem pertanian organik terdapat dua program yang mendukung, yaitu program pengelolaan lahan pertanian serta program peningkatan daya dukung lahan, air dan lingkungan pertanian. Menurut Priono S. P. selaku fungsional penyuluh menyatakan bahwa kedua program tersebut sangat mendukung di dalam keberhasilan sistem pertanian organik. hal ini sesuai dengan pendapat IFOAM dalam Gribaldi (2009:20) mengatakan bahwa pertanian organik harus melestarikan dan meningkatkan kesehatan tanah, tanaman, hewan, manusia dan bumi sebagai satu kesatuan dan tak terpisahkan. Implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979), menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa, "Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-

pedoman kebijakan publik yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.” (Wahab, 2012:135-136).Sistem Pertanian Organik mempunyai beberapa bentuk kegiatan dari sumber daya yang digunakan dan telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Jombang yaitu, Pengelompokan Tani, Sosialisasi Sistem Pertanian Organik, Diklat atau Pelatihan Sistem Pertanian Organik, dan Sertifikasi. Kegiatan-kegiatan tersebut memiliki berbagai bentuk kegiatan yang berbeda namun kegiatan-kegiatan didalam Sistem Pertanian Organik saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya.

Pada sistem pertanian organik terdapat beberapa input yaitu anggaran yang digunakan didalam pertanian organik bersumber dari dana APBN dan APBD serta pihak swasta, sumber daya manusia yang terdiri dari Dinas Pertanian dan Petani organik, bahan yang digunakan yaitu pupuk organik serta bibit yang digunakan dari organik juga, cara yang digunakan didalam kebijakan ini adalah menggunakan pertanian organik, dan mesin yang digunakan hampir sama dengan pertanian konvensional akan tetapi alat yang sudah digunakan pada pertanian konvensional maka tidak bisa digunakan pada pertanian organik. Hal ini sesuai dengan pernyataan Fayol dalam Ngusmanto (2015: 58) menegaskan bahwa administrasi itu pada hakikatnya

menyelenggarakan, mengatur, melaksanakan dan mewujudkan apa yang menjadi tujuan organisasi menggunakan pendekatan *tools of management* yang terdiri dari 6 M yaitu *Man, Money, Materials, Methode, Machine* dan *Market*.

Kebijakan yang baik tentu didalamnya terdapat proses secara runtut. Pada Sistem Pertanian Organik tentu mempunyai proses secara runtut dari awal sampai akhir. Proses di dalam Sistem Pertanian Organik tentang panen sampai penjualan melalui beberapa bentuk kegiatan. Tahap pertama diawali dengan panen, pengeringan, ditampung oleh Gapoktan, penggilingan, sortasi, pengemasan, penyimpanan dan penjualan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/ lembaga untuk mencapai sasaran/ tujuan.

Kebijakan yang telah dibuat tentu memiliki hasil yang telah ditentukan. Hasil adalah sesuatu yang diadakan dan dicapai dengan usaha. Hasil dari sistem pertanian organik adalah hasil dari produk-produk pertanian dan area persawahan organik yang telah diberikan sertifikat oleh Lembaga Sertifikasi Organik. Fungsi dari adanya sertifikasi adalah untuk memudahkan petani organik, mendapatkan

landasan hukum serta diakui secara nasional. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ripley dan Franklin dalam Winarno (2014: 148) di dalam variabel isi kebijakan terdapat komponen suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible Output*).

Manfaat jangka pendek dari sistem pertanian organik adalah dapat menekan biaya produksi, dimana dari kesimpulan wawancara menekan biaya produksi adalah petani mampu memproduksi pupuk organik sendiri sehingga tidak mengeluarkan biaya lebih untuk membeli pupuk pada distributor. Petani organik membuat pupuk dengan cara memanfaatkan limbah disekitar lingkungannya. Limbah tersebut adalah limbah dedaunan dan kotoran hewan yang diolah dijadikan pupuk organik. Manfaat jangka menengah dari sistem pertanian organik adalah kualitas dan hasil produksi yang meningkat, berdasarkan hasil wawancara dengan adanya manfaat jangka pendek bahwa menggunakan pupuk organik maka kualitas tanah menjadi semakin subur. Dengan kesuburan tanah maka kualitas dan hasil produksi pada musim tanam kedua mengalami kenaikan. Lalu manfaat jangka panjangnya dengan memakai pupuk organik maka dalam jangka panjang kesuburan tanah mencapai titik puncak karena tidak memakai bahan kimia dan kelestarian lingkungan terjaga sehingga dapat mengalami kenaikan produksi padi yang dalam jangka lama

dapat menciptakan ketahanan pangan serta mampu menjadikan petani yang mandiri.

Manfaat-manfaat yang didapat dari Sistem Pertanian Organik tentu akan mendapatkan dampak yang dirasakan oleh petani organik dan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang. Bagi Dinas Pertanian Kabupaten Jombang dengan adanya Sistem Pertanian Organik mampu di jadikan sebagai salah satu tujuan Dinas Pertanian yang menjadikan Kabupaten Jombang sebagai petani organik serta dapat mensejahterakan petani lewat pertanian organik. Sedangkan bagi petani organik dengan adanya Sistem Pertanian Organik mampu menjual produk-produk organik lebih mudah dan mampu menarik perhatian masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bagi petani organik. Penjelasan tersebut juga sesuai dengan pernyataan Grindle dalam Nugroho (2014:664) didalam variabel isi kebijakan terdapat poin yang mengatakan derajat perubahan yang diinginkan. Artinya, derajat perubahan yang diinginkan mempunyai makna bahwa setelah diadakan pertanian organik maka yang terlibat merasakan perubahan yang diinginkan

3) Faktor-Faktor Pendukung Serta Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Sistem Pertanian Organik.

Adanya permasalahan-permasalahan pasti memiliki faktor yang mempengaruhi berjalannya suatu program. Begitu pula dengan implementasi Sistem Pertanian Organik terdapat beberapa faktor yang bersifat mendukung dan menghambat berjalannya Sistem Pertanian Organik pada Dinas Pertanian Kabupaten Jombang.

a) Faktor Pendukung Internal

1) Dinas Pertanian Menyediakan Sarana-Prasarana.

Dinas Pertanian Kabupaten Jombang pada Sistem Pertanian Organik menyediakan sarana-prasarana bagi petani organik yang ada di Dusun Banjarsari Desa Bareng Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang. Sarana dan prasarana yang diberikan antara lain Dinas Pertanian Kabupaten Jombang memberikan pelatihan kepada petani organik, menyediakan alat pemotong kotoran hewan (Coper) yang dijadikan pupuk kompos, menyediakan agen hijau untuk memberantas hama, serta mempunyai lab terpadu yang berguna untuk kepentingan pertanian yang ada di Kabupaten Jombang.

Menurut Harjanto (2011:95-97) dalam Strategi Modernisasi Pertanian terdapat perubahan teknologi dan inovasi yang mana untuk mempengaruhi peningkatan hasil-hasil pertanian dengan carapengenalan terhadap petani dengan peralatan untuk menghemat

tenaga seperti traktor serta alat mesin penunjang lainnya. Pada dasarnya, Dinas Pertanian Kabupaten Jombang memberikan kemudahan bagi petani organik untuk mensukseskan pertanian organik.

2) Komitmen dan Kompeten Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanian Untuk Mengembangkan Sistem Pertanian Organik.

Keberhasilan pelaksanaan Sistem Pertanian Organik tidak lepas dari peran Dinas Pertanian yang mempunyai sumber daya manusia yang berkomitmen dan berkompeten. Menurut Grindle dalam Nugroho (2014:664) salah satu faktor implementasi berbicara tentang kepatuhan dan daya tanggap

Artinya, bahwa keberhasilan suatu program dapat dilihat dari aparatur sipil negara yang memiliki daya tanggap serta kepatuhan didalam menjalankan tugasnya. Apabila petugas mempunyai daya tanggap dan kepatuhan yang tinggi maka di dalam melaksanakan program tersebut petugas mampu melaksanakan dengan baik. Petugas pada Dinas Pertanian yang melaksanakan Sistem Pertanian Organik sudah mempunyai daya tanggap serta kepatuhan terhadap tugas yang diberikan, akan tetapi masih terdapat beberapa yang kurang memiliki daya tanggap dan kepatuhan.

b) Faktor Pendukung Eksternal

1) Sumber Daya Alam yang Melimpah

Lahan persawahan merupakan media yang digunakan untuk mengimplementasikan Sistem Pertanian Organik. Kabupaten Jombang mempunyai area lahan persawahan yang terbilang masih sangat luas. Menurut Harjanto (2011:95-97) dalam model pengembangan pertanian *The High Payoff Input Model* terdapat poin meningkatkan sumber daya alam yang dimiliki

Hal ini sesuai dengan apa yang ada dilapangan bahwa sumber daya alam yang ada di Kabupaten Jombang khususnya lahan persawahan merupakan media yang digunakan untuk mengimplementasikan program Sistem Pertanian Organik dengan memaksimalkan lahan persawahan yang ada di Kabupaten Jombang.

2) Pasar Menerima Hasil dari Produk Sistem Pertanian Organik

Petani organik mempunyai tujuan dengan adanya Sistem Pertanian Organik diantaranya dapat menjual produk-produk organik yang diterima pada dunia pasar. Hal ini adalah peran dari Dinas Pertanian untuk memasarkan hasil dari produk-produk organik. Sehingga petani organik tidak terlalu memikirkan tentang hasil penjualan. Peran dari Dinas Pertanian merupakan faktor penting dalam sebuah keberhasilan dalam melakukan pemasaran.

Menurut Grindle di dalam Nugroho (2014:664) di dalam variabel isi kebijakan terdapat komponen (siapa) pelaksana program.

Artinya didalam sebuah pelaksanaan suatu program yang dapat dikatakan berjalan dengan sukses maupun tidak tergantung dari adanya pembuat suatu program tersebut. Penjelasan diatas sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Jombang yaitu dengan melakukan pemasaran terhadap hasil dari produk-produk organik yang meringankan petani organik.

c) **Faktor Penghambat Internal**

1) Masih Adanya Petugas Bermain Curang

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pertanian organik maka dapat dilihat dari ciri-ciri tingkah laku aparatur sipil negara yang terlibat didalam pengimplementasian. Pada Sistem Pertanian Organik yang menjadi penghambat adalah masih adanya beberapa oknum aparatur sipil negara yang masih bermain curang. Menurut Van Matter & Van Horn dalam Nugroho (2014:664) didalam salah satu faktor yang menentukan keberhasilan implementasi terdapat poin yang menyatakan bahwa karakteristik dari agen pelaksana/implementator.

Artinya bahwa ciri-ciri dari pelaksana program akan menentukan keberhasilan program tersebut. Apabila pelaksana

program tersebut mempunyai komitmen yang kuat maka program tersebut dapat berjalan dengan lancar. Sementara itu pada Dinas Pertanian Kabupaten Jombang terdapat beberapa oknum yang belum mempunyai komitmen cukup kuat. Hal ini dapat dilihat dari beberapa oknum tersebut mempunyai kios-kios pupuk kimia yang dijual kepada petani.

d) Faktor Penghambat Eksternal

1) Mengubah Perilaku Petani yang Sulit

Masih banyak petani konvensional yang belum beralih ke petani organik karena pola pikir mereka yang sangat terbatas. Petani konvensional mengkhawatirkan hasil produksi tanaman padi yang menurun apabila beralih ke petani organik. Kurangnya usaha dari Dinas Pertanian yang melakukan pemahaman-pemahaman terhadap petani konvensional sehingga mereka enggan beralih ke petani organik. Perlu adanya usaha dari Dinas Pertanian untuk mampu meyakinkan agar mereka berpindah ke petani organik karena kebanyakan pola berfikir serta sumber daya manusianya yang masih rendah.

2) Masih Banyaknya Masyarakat Belum Mengetahui Adanya Produk dari Organik.

Selain untuk petani organik, pertanian organik yang diprakarsai oleh Dinas Pertanian juga melibatkan masyarakat untuk mensukseskan sistem pertanian organik. Masyarakat merupakan konsumen dari produk-produk pertanian organik. Dengan keunggulan dari beras organik yang mampu bertahan 5 hari tidak basi menjadikan daya tarik tersendiri agar masyarakat membeli beras produk organik. akan tetapi, mayoritas masyarakat belum mengetahui hasil dari beras pertanian organik ini.

Menurut Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau masyarakat dikoordinasikan oleh instansi. Berdasarkan Undang-Undang tersebut maka Dinas Pertanian Kabupaten Jombang pada bentuk kegiatan yaitu tahap sosialisasi khususnya terhadap masyarakat dan petani masih kurang karena petani masih belum ingin berpindah ke organik dan masyarakat belum mengetahui tentang adanya hasil dari produk organik khususnya beras organik.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertanian Organik terdapat beberapa prinsip-prinsip serta tujuan-tujuan dari adanya pertanian organik. Prinsip pertanian organik antara lain kesehatan, ekologi, keadilan dan perlindungan. Didalam implementasi kebijakan sistem pertanian organik yang ada di Kabupaten Jombang sudah sesuai dengan prinsip pertanian organik akan tetapi prinsip ekologi masih belum dijalankan. Sedangkan tujuan-tujuan pertanian organik meliputi mengembangkan keanekaragaman hayati, meningkatkan aktivitas biologi tanah, menjaga kesuburan tanah dalam jangka panjang, mendaur ulang limbah asal tumbuhan dan hewan untuk mengembalikan nutrisi kedalam tanah sehingga meminimalkan penggunaan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui, dan meningkatkan penggunaan tanah, air, serta udara secara baik, dan meminimalkan semua bentuk polusi yang dihasilkan dari kegiatan pertanian. Didalam implementasi kebijakan sistem pertanian organik pada Kabupaten Jombang sudah sesuai dengan tujuan-tujuan pertanian organik yang mampu menerapkan semua tujuan dari pertanian organik. Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Implementasi kebijakan menurut Van Meter dan van Horn terdapat variabel yang mempengaruhi keberhasilan dari suatu kebijakan yaitu
 - a. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan. Yang menjadikan tujuan dasar dari sistem pertanian organik ada tiga yaitu menjadikan semua area persawahan di Kabupaten Jombang dijadikan pertanian organik, yang kedua dengan pertanian organik petani mampu meningkatkan kesejahteraan, dan yang ketiga melindungi area persawahan di Kabupaten Jombang dengan memberikan sertifikasi organik sebagai landasan hukumnya. Sedangkan yang menjadi ukuran kebijakan sistem pertanian organik adalah Peraturan Menteri Pertanian nomor 64 tahun 2013 tentang sistem pertanian organik.
 - b. Sumber-sumber kegiatan. Dalam pertanian organik yang menjadi sumber-sumber kebijakan ada tiga, pertama pertanian organik mendapatkan sumber anggaran dari APBN, APBD serta pihak swasta, yang kedua sumber daya manusia yang mendukung kelancaran dari sistem pertanian organik. bukan hanya dari Dinas Pertanian saja akan tetapi ada juga dari Dinas Pengairan, Aparat, serta petani organik. lalu yang ketiga terdapat sumber pendukung lainnya yaitu berupa lahan, benih, air, serta alat untuk pertanian organik.
 - c. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana. Pada suatu kebijakan yang terlaksana dengan baik maka diperlukan komunikasi yang jelas. Didalam sistem pertanian organik terjalin

komunikasi yang baik antara Dinas Pertanian dengan petani organik, terbukti dengan petani yang mampu mengimplementasikan dari sistem pertanian organik. Dinas Pertanian sudah menjelaskan bagaimana cara pertanian organik di kantor Kecamatan Bareng. Petani mampu mengerjakan dari tahap penyemaian, pengolahan lahan, penanaman, pengairan, pemupukan, pengendalian hama dan proses panen secara baik. Tentunya Dinas Pertanian juga melakukan pengawasan terhadap petani.

- 2) Implementasi sistem pertanian organik yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Jombang terdapat bentuk-bentuk kegiatan, output proses, outcome serta impact. Didalam pertanian organik terdapat dua program yang mendukung keberhasilan dari pertanian organik yaitu program pengolahan lahan pertanian serta program peningkatan daya dukung lahan, air dan lingkungan pertanian. Kedua program tersebut memiliki bentuk kegiatan yaitu memfasilitasi pengelolaan lahan dan air tanaman pangan serta peningkatan daya dukung lahan pertanian. Sedangkan didalam sistem pertanian organik bentuk kegiatannya meliputi pengelompokan petani, sosialisasi, diklat serta sertifikasi. output dari pertanian organik adalah hasil-hasil produk beras serta lahan yang telah disertifikasi oleh lembaga LSO sedangkan proses sistem pertanian organik tentang masa panen sampai penjualan diawali dengan panen, pengeringan, ditampung gapoktan, penggilingan, sortasi, pengemasan,

penyimpanan dan penjualan. Manfaat dari adanya pertanian organik dibedakan menjadi 3 yaitu jangka pendek yang berupa petani dapat menekan biaya produksi, jangka menengah kualitas lebih unggul dan meningkatkan nilai jual, serta jangka panjang tanah menjadi subur dan kelestarian lingkungan terjaga. Impact dari sistem pertanian organik untuk Dinas Pertanian Kabupaten Jombang menjadikan sebagai salah satu tujuan Dinas Pertanian yang menjadikan Kabupaten Jombang sebagai petani organik serta dapat mensejahterakan petani lewat petani organik, sedangkan untuk petani dengan adanya pertanian organik mampu menjual produk-produk organik lebih mudah dan mampu menarik perhatian masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bagi petani organik.

- 3) Dalam sistem pertanian organik terdapat faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung pertanian organik antara lain :
- Dinas Pertanian menyediakan sarana-prasaran kepada petani organik berupa mesin coper (penggiling kotoran), mesin pembajak sawah, pagupon, agen hijau lab terpadu dan lain-lain.
 - Komitmen untuk mengembangkan sistem pertanian organik
 - Potensi sumber daya alam yang melimpah, dan
 - Pasar menerima hasil dari produk sistem pertanian organik.

Sedangkan faktor penghambat sistem pertanian organik antara lain

:

- Masih adanya petugas yang bermain curang
- Mengubah perilaku petani konvensional
- Masih banyaknya masyarakat belum mengetahui adanya produk organik.



B. Saran

- 1) Menurut Van Meter dan Van Horn terdapat enam variabel yang dapat mempengaruhi suatu kebijakan dapat dikatakan baik atau tidak yaitu antara lain ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan dasar, sumber-sumber kebijakan, komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana, karakteristik badan pelaksana, kondisi ekonomi, sosial dan politik serta kecenderungan pelaksana. Dari ke enam variabel tersebut sistem pertanian organik sudah mengimplemntasikan dengan baik terbukti dengan adanya kelompok tani Desa Banjarsari yang mengikuti pertanian organik, dan pada tahun ini juga kecamatan Bandar Kedungmulyo juga mulai mengimplementasikannya. Akan tetapi di Kabupaten Jombang memiliki 21 Kecamatan dan masih memeiliki area persawahan yang luas dan hanya dua kecamatan yang bersedia mengikuti pertanian organik. Akan lebih baik lagi agar petugas penyuluh lapangan melakukan gencar-gencarnya pengetahuan tentang benefit yang didapat setelah menggunakan pertanian organik, mengingat target jangka panjang dari Dinas Pertanian Kabupaten Jombang menjadikan seluruh area persaawahan di Kabupaten Jombang dengan pertanian organik.
- 2) Pada bentuk kegiatan khususnya pada tahap sosialisasi diharapkan Dinas Pertanian berusaha lebih keras lagi untuk melakukan sosialiasi terhadap petani organik dan masyarakat. Karena untuk melancarkan pertanian organik tahap sosiliasi merupakan tahap terpenting, agar tujuannya masyarakat mengerti

akan adanya pertanian organik. Terlihat dari adanya faktor penghambat yang masih belum mengerti tentang adanya pertanian organik maka tahap sosialisasi perlu ditekankan lagi. Sistem pertanian organik anggaran yang bersumber dari APBN, APBD, serta pihak swasta. Dana dari pihak swasta digunakan untuk bantuan berupa alat maupun pelatihan. dengan adanya bantuan dana dari pihak swasta sebaiknya Dinas Pertanian juga mengajak kerjasama dengan pihak swasta terkait pemasaran agar mudah melakukan penjualan dari hasil organik.

- 3) Pada faktor pendukung terdapat poin yang menyatakan bahwa komitmen aparat sipil negara Dinas Pertanian untuk mengembangkan Sistem pertanian organik akan tetapi pada faktor penghambat terdapat petugas Dinas Pertanian yang bermain curang. Dari dua pernyataan tersebut maka sebaiknya Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang memberikan pengertian terhadap petugas yang bermain curang untuk membolehkan memiliki usaha kios-kios pupuk akan tetapi tidak menjual pupuk kimia dan dijadikan satu tempat.
- 4) Secara keseluruhan luas area persawahan yang ada di Kecamatan Bareng hampir tiga ribu hektare, akan tetapi yang diterapkan untuk implementasi kebijakan sistem pertanian organik hanya 3 hektare. Tentu saja ini bukan target yang dicapai selama ini oleh Dinas Pertanian Kabupaten Jombang. Oleh sebab itu meningkat target dari Dinas Pertanian adalah mengubah seluruh pertanian yang ada di Kabupaten Jombang menjadi pertanian organik tentu

masih sangat jauh dikatakan berhasil. Dikembangkan lagi sistem pertanian organik mengingat hanya sedikit luas lahan yang menjadi pertanian organik.



DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar Dasar Kebijakan Publik*. Bandung; Alfabeta
- Ali, Faried. 2011. *Teori dan Konsep Administrasi dari Pemikiran Paradigmatik Menuju Redefinisi*. Jakarta; RajaGrafindo Persada.
- Anonim. Sejarah arti lambang keadaan geografis dan iklim cuaca Kabupaten Jombang https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Jombang diakses pada tanggal 7 Januari 2018 pada pukul 16.30
- Enggar Pratiwi, Sagita. 2015. Formulasi Kebijakan Pemerintah kabupaten Jombang Dalam Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian. Vol. 1 Nomor 1, Mei-Agustus 2015. Diambil dari <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapeprs-kmpf91be666c4full.pdf>
- Fermana, Surya. 2014. *Kebijakan Publik: Sebuah Tinjauan Filosofis*. Yogyakarta; Ar- Ruzz Media.
- Gribaldi. 2009. *Pertanian Organik dan Teknologi Pendukungnya*. Vol. 1 Nomor 2, September 2009. Diambil dari <https://agronobisunbara.files.wordpress.com/2012/11/07-hal-gribldi-oke.pdf>
- Harjanto Imam. 2013. *Teori Pembangunan*. Malang; UB Press
- Humus. Sukses Musim Tanam 2016/2017. Edisi 53 tahun V/2016. Jombang

- Ibrahim Kholilulloh, Muhamad. 2013. *Kapabilitas Inovasi Dinas Pertanian Kabupaten Jombang dalam Program Pertanian Terpadu Guna Mewujudkan Ketahanan Pangan*. Vol. 1 Nomor 1, Januari 2013. Diambil dari :https://journal.unair.ac.id/download-fulpapers-17%20Ibrahim_KMP%20V1%20N1%20Jan-April%202013.pdf
- Islamy, Irfan. 2014. *Prinsip Prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*. Jakarta; Bumi Aksara.
- Kardinan, Agus. 2016. *Sistem Pertanian Organik*. Malang ; Intimedia Kelomok Intrans Publishing
- Keban. Yeremias T. 2014. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep Teori dan Isu*. Yogyakarta; Gava Media.
- Miles, Matthew B, A. Michael Huberman and Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysys: A Methods Sourcebook*, Third Edition. Sage Publications, Inc
- Ngusmanto. 2015. *Pemikiran dan Praktik Administrasi Pembangunan*. Jakarta; Mitra Wacana Media
- Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy Edisi 5*. Jakarta; Alex Media Komputindo.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta: Sekretariat Negara

_____.2009. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Lahan Pertanian pangan Berkelanjutan, Jakarta: Sekretariat
Negara

_____.2013. Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2013 tentang
Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi, Jakarta: Sekretariat Negara.

_____.2013. Peraturan Menteri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Sistem Pertanian Organik, Jakarta: Sekretariat Negara.

_____.2015. Peraturan Menteri Nomor 71 Tahun 2015 tentang
Pedoman Harga Pembelian Gabah dan Beras, Jakarta: Sekretariat Negara.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung;
Alfabeta.

Sukidin, Damai Darmadi. 2011. *Administrasi Publik*. Surabaya; Laksbang
Pressindo.

Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta; Media
Presindo.

Zainal Abidin, Said. 2012 *Kebijakan Publik*. Jakarta; Salemba Humanika.

Lampiran I

SURAT IZIN PENELITIAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN

JOMBANG



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Presiden KH. Abdurrahman Wahid No. 151 Telp. (0321) 873333 Faks. (0321) 851733
JOMBANG

SURAT IZIN
Nomor : 072/229/1415.35/2018

TENTANG

IZIN PENELITIAN

- Dasar :
- Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang;
 - Keputusan Bupati Jombang Nomor 188.4/415/31/415.10.3.4/2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang;
 - Surat Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya tanggal 18 Desember 2017 nomor : 19118/UN10.F03.11.11/PN/2017 perihal permohonan Izin Penelitian.

MENGIZINKAN

Kepada

Nama : RIZAL PAHLEVI
NIM : 145030101111044
Program Studi : Fakultas Ilmu Administrasi/Ilmu Administrasi Publik
Perguruan Tinggi : Universitas Brawijaya
Kegiatan : Penelitian
Waktu : 15 Januari s/d 12 Maret 2018
Judul Penelitian : Implementasi Program Pertanian Organik Guna Meningkatkan Ketahanan Pangan
Lokasi : Dinas Pertanian Kab. Jombang

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Membawa manfaat bagi semua pihak;
- Melaksanakan Koordinasi dengan Instansi terkait;
- Mentaati tata tertib sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Tidak melakukan kegiatan di luar kegiatan survey yang dimaksud;
- Menciptakan suasana yang kondusif di tempat kegiatan survey yang dimaksud;
- Bertanggung Jawab atas semua permasalahan yang terjadi akibat kegiatan survey dimaksud.

Demikian untuk dapat di penggunaan sebagaimana mestinya, dan apabila telah menyelesaikan pekerjaan Penelitian supaya melaporkan hasil pekerjaannya pada pemerintah kabupaten jombang melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Ditetapkan di : Jombang
Pada tanggal : 09 JAN 2018



Tembusan, Yth Saudara :

- Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya;
- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Jombang;
- Kepala Dinas Pertanian Kab. Jombang;
- Yang Bersangkutan.



18010801201



PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 64/Permentan/OT.140/5/2013

TENTANG

SISTEM PERTANIAN ORGANIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan pertanian khususnya pertanian organik pada era globalisasi harus mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan produk organik yang memiliki jaminan atas integritas organik yang dihasilkan;
 - b. bahwa dengan memiliki jaminan atas integritas organik, maka dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan sekaligus mendapatkan jaminan atas produk tersebut tanpa mengakibatkan kerugian konsumen;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan untuk menindaklanjuti Pasal 7 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian, dipandang perlu menetapkan Sistem Pertanian Organik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
 2. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran



- Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan lembaran Negara Nomor 5015);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan lembaran Negara Nomor 5063);
 7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5170);
 8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 128, Tambahan lembaran Negara Nomor 3253);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Nomor 3867);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara 4254);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Pangan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
17. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
18. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara jis Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 141);
19. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara juncto Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 142);

20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 380/Kpts/OT.130/ 10/2005 tentang Penunjukan Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian sebagai Otoritas Kompeten (*Competent Authority*) Pangan Organik;
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/Kpts/OT.140/10/2005 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan;
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/8/2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian;
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Pedoman Pengawasan dan Pengujian Keamanan dan Mutu Produk Hewan;
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/OT.140/10/2008 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan;
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/Permentan/PP.340/5/2009 juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/PP.340/8/2009 tentang Pengawasan Keamanan Pangan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan;
26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian;
27. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
28. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah;
29. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.52.0100 Tahun 2008 tentang Pengawasan Pangan Olahan Organik;

Memperhatikan : SNI Sistem Pangan Organik 6729:2010 tentang Sistem Pangan Organik dan revisinya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG SISTEM PERTANIAN ORGANIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pertanian Organik adalah sistem manajemen produksi yang holistik untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan agroekosistem, termasuk keragaman hayati, siklus biologi, dan aktivitas biologi tanah. Pertanian organik menekankan penerapan praktek-praktek manajemen yang lebih mengutamakan penggunaan input dari limbah kegiatan budidaya di lahan, dengan mempertimbangkan daya adaptasi terhadap keadaan/kondisi setempat. Jika memungkinkan hal tersebut dapat dicapai dengan penggunaan budaya, metoda biologi dan mekanik, yang tidak menggunakan bahan sintesis untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam sistem.
2. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lain yang dipergunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
3. Pangan Organik adalah pangan yang berasal dari suatu lahan pertanian organik yang menerapkan praktek pengelolaan yang bertujuan untuk memelihara ekosistem dalam mencapai produktivitas yang berkelanjutan, melakukan pengendalian gulma, hama, dan penyakit, melalui beberapa cara seperti daur ulang sisa tumbuhan dan ternak, seleksi dan pergiliran tanaman, pengelolaan air, pengolahan lahan, dan penanaman serta penggunaan bahan hayati (pangan).

4. Produk Organik adalah suatu produk yang dihasilkan sesuai dengan standar sistem pangan organik termasuk bahan baku pangan olahan organik, bahan pendukung organik, tanaman dan produk segar tanaman, ternak dan produk peternakan, produk olahan tanaman, dan produk olahan ternak (termasuk non pangan).
5. Organik adalah istilah pelabelan yang menyatakan bahwa suatu produk telah diproduksi sesuai dengan standar produksi organik dan disertifikasi oleh lembaga sertifikasi resmi.
6. Otoritas Kompeten Pangan Organik yang selanjutnya disebut OKPO adalah institusi pemerintah yang mempunyai kewenangan atau kekuatan untuk melakukan pengawasan pangan segar organik yang dimasukan dan/atau beredar di wilayah Indonesia.
7. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut SNI adalah standar yang berlaku secara nasional di Indonesia, yang dirumuskan oleh panitia teknis dan ditetapkan oleh BSN.
8. SNI Sistem Pangan Organik adalah SNI 6729:2010 Sistem Pangan Organik dan revisinya.
9. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disebut KAN adalah lembaga akreditasi nasional yang mempunyai tugas untuk memberikan akreditasi kepada lembaga-lembaga sertifikasi dan laboratorium pengujian/kalibrasi.
10. Lembaga Sertifikasi Organik yang selanjutnya disebut LSO adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mensertifikasi bahwa produk yang dijual atau dilabel sebagai “organik” adalah diproduksi, ditangani, dan diimpor menurut Standar Nasional Indonesia Sistem Pangan Organik dan telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. LSO tersebut bisa nasional maupun LSO asing yang berkedudukan di Indonesia.
11. Sarana Produksi adalah pupuk dan pestisida yang dipakai untuk sistem pertanian organik.
12. Bahan Pendukung adalah setiap bahan yang digunakan sebagai masukan untuk menghasilkan produk organik. Bahan yang dimaksud berupa bahan untuk penyuburan tanah (pupuk organik), mencegah/mematikan, menarik, mengusir atau mengontrol organisme pengganggu (pestisida) termasuk spesies tanaman atau binatang yang tidak diinginkan selama produksi dan pengolahan pangan organik.

13. Label Pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.
14. Pelabelan Organik adalah pencantuman/pemasangan segala bentuk tulisan, cetakan atau gambar berisi keterangan/identitas produk tersebut yang tertera pada label, yang menyertai produk pangan, atau dipajang dekat dengan produk pangan, termasuk yang digunakan untuk tujuan promosi penjualan.
15. Logo Organik Indonesia adalah lambang berbentuk lingkaran yang terdiri dari dua bagian, bertuliskan “Organik Indonesia” disertai satu gambar daun di dalamnya yang menempel pada huruf “G” berbentuk bintil akar.
16. Sertifikasi adalah prosedur dimana lembaga sertifikasi pemerintah atau lembaga sertifikasi yang diakui oleh pemerintah, memberikan jaminan tertulis atau yang setara bahwa pangan atau sistem pengendalian pangan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
17. Akreditasi adalah rangkaian pengakuan formal oleh lembaga akreditasi nasional yang menyatakan bahwa suatu lembaga telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi tertentu.
18. Produk Rekayasa Genetika/Modifikasi Genetika adalah organisme dan produknya yang dihasilkan melalui teknik dimana materi genetika diubah dengan cara yang tidak alami. Teknik rekayasa/modifikasi genetika termasuk, tetapi tidak terbatas untuk rekombinasi DNA, fusi sel, injeksi mikro dan makro, enkapsulasi, penghilangan dan penggandaan gen. Organisme hasil rekayasa genetika tidak termasuk organisme yang dihasilkan dari teknik seperti konjugasi, transduksi dan hibridisasi.
19. Produk Asal Hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.

20. Bibit Hewan yang selanjutnya disebut bibit adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.
21. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangkan tanaman.
22. Bahan yang diperbolehkan adalah bahan yang dianjurkan untuk dipergunakan.
23. Bahan yang dibatasi adalah bahan yang boleh digunakan apabila bahan yang diperbolehkan tidak bisa mencukupi atau memadai ketersediaannya.
24. Bahan dilarang adalah bahan yang tidak diperbolehkan digunakan.
25. Unit usaha adalah petani, pelaku usaha, organisasi petani, orang perseorangan lainnya, atau perusahaan yang melakukan usaha organik, baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
26. Tanaman adalah tanaman yang terdiri dari akar, batang, dan daun termasuk didalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.
27. Produk Tanaman adalah semua hasil yang berasal dari tanaman yang masih segar dan tidak mengalami proses pengolahan.
28. Produk Tanaman yang Tidak Dibudidayakan adalah produk tanaman yang tumbuh tanpa atau dengan sedikit pengaruh dari unit usaha dalam pengumpulan produk. Campur tangan manusia hanya pada saat penanaman (*shifting cultivation*) dan pemanenan (pengumpulan) produk atau tindakan untuk melindungi potensi pertumbuhan alami tanaman (perlindungan dari erosi, dan lain-lain).
29. Inspeksi adalah pemeriksaan pangan atau sistem yang digunakan untuk pengendalian pangan, bahan baku, pengolahan, dan distribusinya, termasuk uji produk baik yang dalam proses maupun produk akhirnya, untuk memverifikasi bahwa hal-hal tersebut sesuai dengan persyaratan.
30. Inspektur adalah orang yang melakukan kegiatan inspeksi.

31. Pupuk organik adalah bahan yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri bahan organik yang berasal dari sisa tanaman, hijauan tanaman, kotoran hewan (padat dan cair) kecuali yang berasal dari *factory farming*, berbentuk padat atau cair yang telah mengalami proses dekomposisi dan digunakan untuk memasok hara tanaman dan memperbaiki lingkungan tumbuh tanaman. Pupuk organik sering juga disebut kompos, istilah ini lebih dikenal luas karena telah digunakan oleh petani sejak jaman dahulu. Terdapat beberapa istilah lain seperti pupuk hijau karena mengacu pada bahan yang dipakai yaitu hijauan tanaman seperti orok-orok, sesbania, azolla, turi, pangkasan tanaman pagar/*alley cropping* yang berasal dari tanaman legume atau kacang-kacangan.
32. Pengomposan adalah proses perombakan atau Pestisida untuk sistem pangan organik (pestisida nabati) adalah bahan pengendali organisme pengganggu tanaman (OPT) selain pestisida sintetis, yang terdiri dari bahan mineral/alami, seperti belerang ataupun biopestisida yang terdiri dari pestisida botani (berasal dari tumbuh-tumbuhan) dan pestisida dari agens hayati (*zoologi*) seperti jamur, bakteri, virus dan makhluk hidup lainnya yang diformulasikan menjadi suatu formula atau sediaan yang dapat digunakan sebagai pengendali OPT. Musuh alami seperti parasitoid dan predator termasuk telur, cahaya, suara, panas, CO₂, gas nitrogen ataupun bentuk lainnya tidak termasuk dalam cakupan sediaan/formulasi pestisida untuk sistem pertanian organik, karena dapat langsung digunakan tanpa proses formulasi.
34. Agens Hayati adalah setiap organisme yang dalam perkembangannya dapat dipergunakan untuk keperluan pengendalian hama dan penyakit atau organisme pengganggu tanaman dalam proses produksi, pengolahan hasil pertanian dan berbagai keperluannya.
35. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertanian.

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan sistem pertanian organik.
- (2) Pelaksanaan Sistem Pertanian Organik berpedoman pada SNI Sistem Pangan Organik.

- (3) Tujuan ditetapkan Peraturan ini, sebagai berikut:
- a. mengatur pengawasan organik Indonesia;
 - b. memberikan penjaminan dan perlindungan kepada masyarakat dari peredaran produk organik yang tidak memenuhi persyaratan;
 - c. memberikan kepastian usaha bagi produsen produk organik;
 - d. membangun sistem produksi pertanian organik yang kredibel dan mampu telusur;
 - e. memelihara ekosistem sehingga dapat berperan dalam pelestarian lingkungan; dan
 - f. meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi Budidaya Pertanian Organik, Sarana Produksi dan Pengolahan, Sertifikasi, Pelabelan, Pembinaan dan Pengawasan serta Sanksi dalam penerapan Sistem Pertanian Organik.

Pasal 4

- (1) Unit usaha yang memproduksi, mengolah, memasukkan produk organik untuk tujuan pemasaran atau yang memasarkan produk organik harus sesuai dengan penerapan Sistem Pertanian Organik yang ditetapkan dalam Peraturan ini.
- (2) Penerapan Sistem Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat organik.
- (3) Unit usaha yang telah memiliki sertifikat organik harus mencantumkan logo Organik Indonesia.

BAB II BUDIDAYA PERTANIAN ORGANIK

Pasal 5

- (1) Budidaya pertanian organik untuk produk asal tanaman harus memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

- (2) Budidaya pertanian organik untuk produk asal ternak harus memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Budidaya pertanian organik untuk produk tertentu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Jamur dan produk jamur organik:

- a. lokasi tumbuh jamur harus bebas dari kontaminasi bahan-bahan berbahaya.
- b. sumber air untuk budidaya jamur:
 - 1) berasal dari sumber mata air yang langsung atau dari sumber lain yang tidak terkontaminasi oleh bahan kimia sintetis dan cemaran lain yang membahayakan.
 - 2) air yang berasal selain dimaksud pada angka 1) harus telah mengalami perlakuan untuk mengurangi cemaran.
 - 3) penggunaan air harus sesuai dengan prinsip konservasi air.
- c. tidak diperkenankan menggunakan media tumbuh dan pupuk yang berasal dari bahan kimia sintetis.
- d. dalam pengelolaan organisme pengganggu tidak diperkenankan menggunakan bahan kimia sintetis.
- e. bibit jamur harus berasal dari jamur organik.
- f. apabila tidak tersedia bibit sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka untuk pertama kali budidaya diperkenankan menggunakan bibit yang berasal dari non organik.

Pasal 6

- (1) Produk asal tanaman yang tidak dibudidayakan yang dapat dimakan, tumbuh atau hidup alami di kawasan hutan dan pertanian, dapat dianggap menerapkan Sistem Budidaya Organik apabila:
 - a. produk berasal dari lahan yang jelas batasnya sehingga dapat dilakukan tindakan sertifikasi/inspeksi;

- b. lahan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak mendapatkan perlakuan dengan bahan yang dilarang sebagai penyubur tanah dan bahan yang dilarang penggunaannya dalam pembuatan pestisida selama 3 (tiga) tahun sebelum pemanenan;
 - c. bahan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
 - d. pemanenan tidak mengganggu stabilitas habitat alami atau pemeliharaan spesies didalam lahan koleksi;
 - e. produk berasal dari unit usaha pemanenan atau pengumpulan produk yang jelas identitasnya dan mengenal benar lahan asal produk.
- (2) Pengumpulan/pemanenan produk asal tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dari pemerintah.

BAB III SARANA PRODUKSI

Pasal 7

- (1) Pembuatan pupuk dan pestisida sebagai sarana produksi untuk Sistem Pertanian Organik dilakukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Bahan baru dalam pembuatan pestisida yang akan digunakan sebagai pengendalian organisme pengganggu tanaman harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. sangat diperlukan untuk pengendalian organisme pengganggu atau penyakit khusus yang disebabkan oleh faktor biologi, fisik, atau pemuliaan tanaman alternatif dan/atau tidak dilaksanakannya manajemen yang efektif;
 - b. penggunaannya harus memperhitungkan dampak potensial yang dapat mengganggu lingkungan, ekologi dan kesehatan konsumen;

- c. berasal dari tanaman, hewan, mikroorganisme atau bahan mineral yang dapat melewati proses fisik (mekanik, pemanasan), enzimatis, dan mikrobiologi (kompos, proses pencernaan);
 - d. jika pada kondisi tertentu bahan yang digunakan dalam proses penangkapan atau pelepasan seperti feromon (*pheromones*) maka dipertimbangkan untuk ditambahkan dalam daftar bahan yang diperbolehkan;
 - e. jika bahan sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak tersedia secara alami dalam jumlah yang mencukupi, penggunaan bahan tersebut tidak boleh meninggalkan residu pada produk;
 - f. penggunaan bahan dibatasi pada kondisi, wilayah dan komoditi tertentu.
- (3) Penggunaan bahan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan evaluasi dengan melibatkan pemangku kepentingan.

Pasal 8

Sarana produksi yang diproduksi untuk diedarkan dan dipakai untuk usaha pertanian organik harus mendapatkan ijin edar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV SERTIFIKASI

Pasal 9

- (1) Setiap unit usaha yang telah menerapkan Sistem Pertanian Organik dapat mengajukan sertifikasi kepada Lembaga Sertifikasi Organik yang telah diakreditasi oleh KAN.
- (2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V PELABELAN

Pasal 10

- (1) Semua Produk Organik yang beredar di Indonesia baik produksi dalam negeri maupun pemasukan harus mencantumkan logo organik Indonesia.
- (2) Produk Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah produk yang telah memperoleh sertifikat organik.
- (3) Produk Organik yang mengalami proses pengemasan ulang tidak diperbolehkan mencantumkan Logo Organik Indonesia sebelum dilakukan sertifikasi ulang.

Pasal 11

Pencantuman logo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VI PRODUK ORGANIK ASAL PEMASUKAN

Pasal 12

- (1) Produk Organik asal pemasukan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib:
 - a. melampirkan *transaction certificate*;
 - b. melampirkan *health certificate* atau *certificate of free sale*.
- (2) *Transaction certificate* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh LSO yang melakukan sertifikasi pada unit usaha di negara asal.
- (3) *Health certificate* atau *certificate of free sale* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh institusi yang berwenang di negara asal.

Pasal 13

- (1) LSO sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) harus memperoleh pengakuan dari KAN.
- (2) Untuk memperoleh pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:
 - a. akreditasi KAN;
 - b. perjanjian kerjasama antar Badan Akreditasi; atau
 - c. perjanjian kerjasama regional maupun internasional.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan terhadap penerapan Sistem Pertanian Organik dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan daerah.
- (2) Menteri, gubernur, bupati/walikota melakukan pembinaan terhadap penerapan Sistem Pertanian Organik.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka memberikan penjaminan dan perlindungan kepada masyarakat dari peredaran Produk Organik yang tidak memenuhi persyaratan.
- (4) Pembinaan Sistem Pertanian Organik dapat melibatkan partisipasi dari pihak lain yang kompeten, berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Instansi terkait lingkup pertanian.

Pasal 15

- (1) Pengawasan terhadap produk organik yang beredar, dilakukan oleh Kementerian Pertanian berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Pengawasan terhadap unit usaha yang telah disertifikasi dilakukan oleh LSO.
- (3) LSO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terdaftar di OKPO.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai LSO diatur dengan peraturan perundangan tersendiri.

BAB VIII SANKSI

Pasal 16

Unit usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan ini akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pertanian ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2013

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 770

Tabel 5.2

Rencana Program dan Kegiatan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif

| Kode | Program | Kegiatan | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) | Kondisi Awal | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|--|--|---|--------------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------------|---------------|-----------------|-------------|---|----------------|
| | | | | | | Tahun 2014 | | Tahun 2015 | | Tahun 2016 | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra SKPD | |
| | | | | | | Target Kinerja | Target Rp. | Target Kinerja | Target Rp. | Target Kinerja | Target Rp. | Target Kinerja | Target Rp. | Target Kinerja | Target Rp. | Target Kuantitatif | Pagu Indikatif |
| 3.03.060 | Program Pembangunan Infrastruktur Pengelolaan air Tanaman Pertanian | | Terwujudnya jaringan irigasi kondisi baik | Prosentase jaringan irigasi yang terbangun | | - | - | 11,31% | 13.349.975.500 | 11,07% | 5.824.840.000 | 0 | - | 10% | 250.000.000 | 32,38% | 19.424.815.500 |
| 3.03.070 | Program Rehabilitasi Infrastruktur Pengelolaan Air Tanaman Pertanian | | Terwujudnya jaringan irigasi kondisi baik | Prosentase jaringan irigasi yang ditingkatkan kualitasnya | | - | - | 5% | 5.221.905.000 | 10% | 120.000.000 | 0 | - | 10% | 100.000.000 | 25,00% | 5.441.905.000 |
| 3.03.01.59 | Program Pengelolaan Lahan Tanaman Pertanian | | Terwujudnya JUT kondisi baik | Prosentase JUT dalam kondisi baik | | 0 | 0 | 9,52% | 8.484.202.775 | 2,26% | 3.129.000.000 | 0 | 75.000.000 | 4,81% | 75.000.000 | 7,07% | 11.763.202.775 |
| 3.03.01.59.505 | | Fasilitasi Pengelolaan Lahan dan Air Tanaman Pangan | Terlaksananya movev kegiatan pengelolaan lahan dan air | Jumlah poktan/Gapoktan pelaksana kegiatan pengelolaan lahan dan air | | | | | | | | 53 poktan/ gapoktan | 75.000.000 | 93 poktan/HIPPA | 75.000.000 | | |
| 3.03.01.62 | Program Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Sumur Dangkal | | Terwujudnya jaringan irigasi kondisi baik | Prosentase sarana prasarana air (sumur dangkal) dalam kondisi baik | | 10,40% | 3.426.862.000 | 8,26% | 9.514.500.000 | 2,81% | 2.640.000.000 | 4,38% | 5.945.790.000 | 1,65% | | 1,65% | 5.945.790.000 |
| 3.03.01.62.05 | | Pembangunan/Rehabilitasi Sumur Dangkal Desa Brodot, Kec. Bandar Kedung Mulyo | Terlaksananya pembangunan sumur dangkal | Jumlah pembangunan sumur dangkal tanaman perkebunan (PID) | | | | | | | | 1 paket | 40.000.000 | - | - | | |
| 3.03.01.62.15 | | Pembangunan/Rehabilitasi Sumur Dangkal Desa Brambang, Kec. Diwek | Terlaksananya pembangunan sumur dangkal | Jumlah pembangunan sumur dangkal perkebunan (DAK) | | | | | | | | 1 paket | 120.000.000 | - | - | | |
| 3.03.01.62.23 | | Pembangunan/Rehabilitasi Sumur Dangkal Desa Kayangan, Kec. Diwek | Terlaksananya pembangunan sumur dangkal | Jumlah pembangunan sumur dangkal perkebunan (DAK) | | | | | | | | 1 paket | 120.000.000 | - | - | | |
| 3.03.01.62.28 | | Pembangunan/Rehabilitasi Sumur Dangkal Desa Pandanwangi, Kec. Diwek | Terlaksananya pembangunan sumur dangkal | Jumlah pembangunan sumur dangkal perkebunan (DAK) | | | | | | | | 1 paket | 120.000.000 | - | - | | |
| 3.03.01.62.34 | | Pembangunan/Rehabilitasi Sumur Dangkal Desa Gempol Legundi, Kec. Gudo | Terlaksananya pembangunan sumur dangkal | Jumlah pembangunan sumur dangkal tanaman pangan (PID) | | | | | | | | 1 paket | 80.000.000 | - | - | | |

| Kode | Program | Kegiatan | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) | Kondisi Awal | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|---|--------------|---|------------|----------------|-------------|----------------|-------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|---|----------------|
| | | | | | | Tahun 2014 | | Tahun 2015 | | Tahun 2016 | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra SKPD | |
| | | | | | | Target Kinerja | Target Rp. | Target Kinerja | Target Rp. | Target Kinerja | Target Rp. | Target Kinerja | Target Rp. | Target Kinerja | Target Rp. | Target Kuantitatif | Pagu Indikatif |
| 3.03.01.86 | Program Peningkatan daya Dukung Lahan, Air dan Lingkungan Pertanian | | Meningkatnya kesuburan lahan pertanian | Prosentase kenaikan kandungan Bahan Organik (BO) lahan pertanian | | - | - | 0,14% | 275.000.000 | 0,71% | 345.250.000 | 0,75% | 170.000.000 | 1% | 100.000.000 | 1% | 890.250.000 |
| 3.03.01.86.01 | | Peningkatan daya dukung lahan pertanian | Meningkatnya unsur hara lahan pertanian | Jumlah poktan penerima saprodi untuk penanaman komoditas tanaman yang berpotensi sebagai pupuk hijau | | | | | | | | 6 poktan | 170.000.000 | 3 poktan | 100.000.000 | | |
| 3.03.01.94 | Program Peningkatan Sarana Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | | Terpenuhinya kebutuhan alat mesin pertanian | Prosentase pemenuhan alat mesin pertanian | | - | - | - | - | - | - | 10% | 5.491.446.000 | 12% | 1.267.000.000 | 12,00% | 6.758.446.000 |
| 3.03.01.94.01 | | Penyediaan Sarana Prasarana Produksi Pertanian | Tersedianya peralatan pertanian | Jumlah poktan/gapoktan penerima bantuan alsintan kegiatan PID | | | | | | | | 174 poktan/gapoktan | 5.070.000.000 | 15 poktan | 892.000.000 | | |
| 3.03.01.94.02 | | Pengadaan Sarana Dan Prasarana Teknologi Pertanian Tepat Guna | Tersedianya peralatan pertanian | Jumlah sarana prasarana penunjang usahatani tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang disalurkan | | | | | | | | 54 unit | 281.000.000 | 5 unit | 275.000.000 | | |
| 3.03.01.94.03 | | Penyediaan Sarana Prasarana Produksi perkebunan | Tersedianya peralatan perkebunan | Jumlah poktan penerima sarana dan prasarana perkebunan (pompa air) | | | | | | | | 2 poktan | 10.000.000 | - | - | | |
| 3.03.01.94.04 | | Penyediaan Sarana Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | Tersedianya pupuk bersubsidi | Jumlah poktan yang terfasilitasi pupuk bersubsidi | | | | | | | | 1.211 poktan | 130.446.000 | 1.211 poktan | 100.000.000 | | |
| 3.03.01.96 | Program Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | | Menurunnya serangan hama penyakit pada tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan | Prosentase gangguan OPT | | | | | | | | 5% | 716.054.000 | 4,50% | 550.000.000 | 4,50% | 1.266.054.000 |
| 3.03.01.96.01 | | Pelatihan dan Bimbingan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) | Meningkatnya pengetahuan petani tentang pengendalian OPT | Jumlah poktan/ gapoktan yang mengikuti SLPHT tanaman pangan | | | | | | | | 5 poktan/gapoktan | 127.500.000 | 6 poktan/gapoktan | 150.000.000 | | |
| 3.03.01.96.02 | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengendalian OPT | Tertanganinya serangan OPT | Jumlah poktan/gapoktan penerima bahan dan peralatan pengendalian OPT | | | | | | | | 13 poktan/gapoktan | 440.000.000 | 8 poktan/gapoktan | 250.000.000 | | |





PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG DINAS PERTANIAN

Jln. Soekarno-Hatta 170 Telepon (0321) 861246
Fax. (0321) 875171

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN JOMBANG

NOMOR : 188 / / 415.27 / 2017

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2014 – 2018

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi pemerintahan daerah di bidang pembangunan pertanian, diperlukan rencana strategis sebagai penjabaran dan operasional dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan perencanaan pembangunan jangka menengah sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh dan bertahap;
- b. bahwa agar Rencana Strategis dapat digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan pertanian dipandang perlu untuk menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Jombang Tahun 2014 – 2018 dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang.
- c. bahwa dengan adanya penyesuaian ukuran kinerja dalam RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014 – 2018 maka perlu pula dilakukan perubahan Renstra Dinas Pertanian.
- Memperhatikan: 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2007 tentang Sistem Keuangan Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jombang.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8/D);
15. Peraturan Bupati Jombang Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Jombang.
16. Peraturan Bupati Jombang Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penyesuaian Ukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2014 – 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN JOMBANG TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERTANIAN KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2014 – 2018.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang ini, yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Kabupaten Jombang.
- (2) Kabupaten adalah Kabupaten Jombang.
- (3) Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
- (4) Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
- (5) Rencana Strategik Satuan Kerja Perangkat Daerah DINAS Pertanian Kabupaten Jombang Tahun 2014 – 2018 yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Dinas Pertanian dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah serta memperhatikan RPJM Propinsi dan RPJM Nasional.
- (6) Rencana Kerja yang selanjutnya disebut RENJA adalah penjabaran dari Renstra SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II

KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Renstra SKPD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Dinas Pertanian Kabupaten Jombang.
- (2) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selanjutnya dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang ini.

Pasal 3

Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat daerah.

BAB III

PROGRAM DAN SISTEMATIKA RENSTRA SKPD

Pasal 4

- (1) Program dan kegiatan pembangunan pertanian Kabupaten Jombang tahun 2014 – 2018 dilaksanakan sesuai Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Jombang.
- (2) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :

| | | |
|---------|---|--|
| BAB I | : | PENDAHULUAN |
| BAB II | : | GAMBARAN PELAYANAN SKPD |
| BAB III | : | ISU-ISU STRATEGIS |
| BAB IV | : | VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN |
| BAB V | : | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN |
| BAB VI | : | INDIKATOR KINERJA SKPD |

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai kewenangan yang dimiliki melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Hal – hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang

pada tanggal 8 Februari 2017

**KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN JOMBANG,**

Ir. HADI PURWANTORO, MSi
NIP. 19610623 199403 1 002



Kata Pengantar

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian Kabupaten Jombang Tahun 2014 – 2018 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2014 – 2018 yang memuat visi, misi dan program pembangunan Kabupaten Jombang.

Renstra disusun untuk dipergunakan sebagai acuan dan pegangan dalam rangka melaksanakan pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura dalam menentukan langkah kebijakan dan melaksanakan kegiatan guna mencapai tujuan dan sasaran program yang dapat berjalan sesuai dengan Visi dan Misi Dinas Pertanian Kabupaten Jombang.

Dalam pelaksanaannya pada tahun 2016 ini dilaksanakan review Renstra Dinas Pertanian khususnya review terhadap target-target sasaran program disesuaikan terhadap review target-target sasaran dalam RPJMD Kabupaten Jombang.

Atas kerjasama semua pihak, akhirnya Review Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Jombang Tahun 2014 – 2018 dapat disusun, dan merupakan pedoman dan acuan bagi pelaksanaan pembangunan di Sektor Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Jombang, Pebruari 2017
KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN JOMBANG

Ir. HADI PURWANTORO, MSi

NIP. 19610623 1994 1 002





Daftar Isi

| | |
|--|------------------------------|
| Kata Pengantar..... | ii |
| Daftar Isi..... | iii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2. Landasan Hukum..... | 3 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan..... | 4 |
| 1.4. Sistematika Penulisan | 5 |
| | |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD | 6 |
| 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD | 6 |
| 2.2. Sumber Daya SKPD | 18 |
| 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD | Error! Bookmark not defined. |
| 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD | 29 |
| | |
| BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI..... | 31 |
| 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD..... | 31 |
| 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih | 31 |
| 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra | 41 |
| 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis..... | 43 |
| 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis | 50 |
| | |
| BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN | 51 |
| 4.1. Visi dan Misi SKPD..... | 51 |
| 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD..... | Error! Bookmark not defined. |
| 4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD..... | 50 |



BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK
SASARAN,DAN PENDANAAN INDIKATIF52

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
.....53

BAB VII PENUTUP54





BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan pertanian secara umum telah dan akan terus memberikan sumbangan bagi pembangunan daerah, baik secara langsung dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat, maupun sumbangan tidak langsung melalui penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan hubungan sinergis dengan sektor lain. Pembangunan pertanian merupakan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat tani, yang dicapai melalui investasi teknologi, pengembangan produktivitas tenaga kerja, pembangunan sarana ekonomi, serta penataan dan pengembangan kelembagaan pertanian. Sumber daya manusia bersama-sama dengan sumber daya alam, teknologi dan kelembagaan merupakan faktor utama yang secara sinergis menggerakkan pembangunan pertanian untuk mencapai peningkatan produksi pertanian.

Pembangunan pertanian Kabupaten Jombang dilaksanakan dalam upaya peningkatan produksi, produktivitas dan pendapatan petani dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dalam konsep pembangunan pertanian yang mandiri dan berkelanjutan. Beberapa faktor pendukung untuk mencapai terwujudnya pembangunan pertanian tersebut antara lain, kesiapan SDM, tertatanya kelembagaan, berkembangnya Inovasi teknologi tepat guna spesifik lokasi dan ketersediaan sarana prasarana yang memadai.

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program prioritas. Selain itu Renstra juga merupakan penjabaran gambaran permasalahan Dinas Pertanian yang dihadapi serta indikasi program yang akan dilaksanakan untuk pemecahan permasalahan secara terencana, akomodatif dan sistematis dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan tantangan yang ada.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2014-2018 ini dimaksudkan sebagai arah dan pedoman pembangunan Pertanian di Kabupaten Jombang, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dan terukur.



Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jombang Tahun 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang tahun 2014 – 2018.

Perencanaan Strategis ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2014-2018 secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Renstra SKPD Dinas Pertanian dalam penyusunannya berkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan yang lain. Renstra SKPD dan dokumen perencanaan yang lain bersifat satuan kesatuan dalam penjabarannya, hubungan itu dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Rencana pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN)
Perencanaan pembangunan skala dinasional terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang RPJMN dan perencanaan pembangunan jangka menengah RPJMN. Dokumen ini menjadi acuan dalam penyusunan renstra SKPD Dinas Pertanian yang berkaitan dengan kebijakan pangan nasional.
2. Rencana Strategis Kementerian Pertanian
Rencana Strategis Kementerian Pertanian adalah penjabaran teknis atas RPJMN selama lima tahun. Renstra Kementerian pertanian ini menjelaskan mengenai rencana program kerja dan arah kebijakan sesuai dengan tema yang termuat dalam RPJMN. Dokumen ini menjadi pertimbangan untuk menjadi dasar kebijakan yang harus diambil daerah yang berasal dari rencana strategis nasional.
3. Rencana Strategis Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur.
Renstra propinsi Jawa Timur adalah penjabaran teknis rencana pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur. Renstra ini menjadi pedoman penyusunan Renstra SKPD Dinas Pertanian Jombang agar selaras dengan arah Pertanian di provinsi Jawa Timur.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang



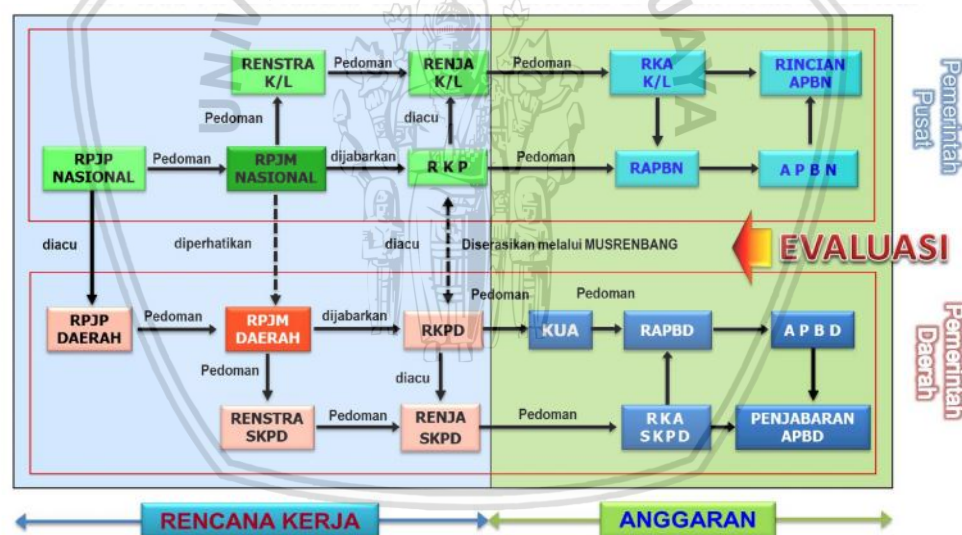
Pedoman perencanaan pembangunan daerah berupa RPJP akan diturunkan dalam RPJMD. RPJMD ini selain memberikan gambaran rencana pembangunan selama lima tahun turunan dari RPJ, juga berisi visi serta misi kepala daerah terpilih dan wakil kepala daerah terpilih. Dokumen ini menjadi pedoman penyusunan Renstra SKPD agar dalam pembangunan Pertanian bisa selaras dengan visi, misi, dan rencana pembangunan yang disusun dalam RPJMD.

5. Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Jombang

Derivasi dari Renstra SKPD Dinas Pertanian berupa rencana kerja yang memberi detail gambaran kerja pertahun termasuk kerangka program dan kerangka anggaran.

Detail hubungan bisa dijelaskan sebagai berikut.

Hubungan Antar Dokumen Perencanaan



Gambar 1.1. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Jombang, 2013

1.2. Landasan Hukum

Landasan dalam penyusunan dokumen Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Jombang adalah :

1. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.



3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
4. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang diubah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang.
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi perangkat Daerah Kabupaten Jombang.
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jombang.
11. Peraturan Bupati Jombang No 26 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Jombang.
12. Peraturan Daerah No 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang 2014-2018

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian ini dimaksudkan untuk :

- a) Memberikan arahan bagi seluruh jajaran pejabat dan staf di Lingkungan Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugas dan pelayanannya kepada masyarakat.
- b) Mewujudkan sinkronisasi pembangunan di daerah khususnya antara target kinerja dalam RPJMD Kabupaten Jombang dengan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Jombang.
- c) Mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dalam urusan pertanian, dalam rangka kelanjutan pembangunan jangka panjang, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Jombang.



Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Pertanian adalah :

- a) Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja pada Dinas Pertanian Kabupaten Jombang.
- b) Memberikan arahan dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah dalam bentuk Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Jombang.

1.4. Sistematika Penulisan

I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
- 2.2 Sumberdaya SKPD
- 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

IV. VISI MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Visi dan Misi SKPD
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
- 4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Dinas Pertanian Kabupaten Jombang berkedudukan sebagai Satuan kerja Perangkat Daerah Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pertanian memiliki tugas secara spesifik dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pertanian. Sebagaimana dalam landasan yuridis di tingkat daerah Dinas Pertanian Kabupaten Jombang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kelembagaan Daerah Kabupaten Jombang dengan diperjelas melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jombang dan mengacu pada restrukturisasi kelembagaan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang menjelaskan bahwa landasan yuridis tersebut memberikan gambaran dan arah kinerja organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Jombang yang secara umum mempunyai tugas penyelenggara pemerintah di bidang Pertanian.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Tugas Dinas Pertanian adalah membantu Bupati melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pertanian. Dalam melaksanakan tugas, Dinas Pertanian mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pertanian;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian;
- e. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintah daerah di bidang pertanian;
- f. Pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan tugas fungsinya.



1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Dinas Pertanian dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, penyusunan program dan evaluasi. Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pengelolaan pelayanan administrasi umum;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- e. Pengelolaan administrasi aset Dinas Pertanian;
- f. Pengelolaan urusan rumah tangga;
- g. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- h. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- i. Pengelolaan kearsipan Dinas Pertanian;
- j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
- k. Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan penyelenggaraan pertanian;
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian;

2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset

Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan data dan informasi guna penyusunan kebijakan teknis dan operasional;
- b. Melaksanakan administrasi Kepegawaian dan Sistem Informasi Pegawai;
- c. Melaksanakan urusan administrasi umum, rumah tangga/ keprotokolan, perjalanan dinas dan perlengkapan, ketatalaksanaan (surat menyurat) dan kearsipan;
- d. Menyusun rencana dan melaksanakan keindahan, kebersihan dan keamanan kantor;
- e. Menyusun rencana kebutuhan meliputi perencanaan pengadaan, perencanaan pemeliharaan, perencanaan pemanfaatan dan perencanaan pemindahtanganan barang;
- f. Melaksanakan pengadaan barang;
- g. Mengatur dan mengelola barang-barang inventaris;



- h. Mengatur dan mengelola barang persediaan dan barang habis pakai serta pendistribusiannya;
- i. Menyusun laporan pengelolaan aset secara berkala;
- j. Melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai Dinas Pertanian;
- k. Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
- l. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- m. Melaksanakan rekonsiliasi internal antara laporan barang dengan laporan keuangan;
- n. Melaksanakan kegiatan kehumasan dan kepustakaan;
- o. Menangani pengaduan masyarakat terkait dengan pelaksanaan tugas;
- p. Memproses Pembuatan Daftar Gaji Pegawai Daerah;
- q. Memproses Surat Keputusan Pemberhentian Pembayaran Gaji (SKPP);
- r. Menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP); dan
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi

Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi, mempunyai tugas:

- a. Menghimpun, mengelola, mengkaji, dan meneliti data dalam rangka penyusunan rencana program dan anggaran satuan kerja;
- b. Melaksanakan kegiatan perencanaan dan penyusunan dokumen pembangunan bidang pertanian;
- c. Melaksanakan koordinasi perencanaan program dan kegiatan anggaran;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka analisis dan penilaian pelaksanaan program dan anggaran;
- e. Melaksanakan kebijakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanian;
- f. Mengkoordinasi dan evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pertanian;
- g. Melaksanakan pembuatan umpan balik hasil penyusunan dan penetapan anggaran guna perencanaan program dan anggaran untuk tahun berikutnya;



- h. Mengelola pengembangan data dan sistem informasi lingkup Perangkat Daerah;
- i. Melaksanakan supervisi, pelaporan evaluasi dan monitoring pelaksanaan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

4. Bidang Produksi Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura

Bidang Produksi Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian di bidang tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura. Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Produksi Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura mempunyai fungsi:

- a. Penanggung jawab program produksi tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura.
- b. Perumusan kebijakan strategis dalam pembinaan dan pengawalan produksi tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura.
- c. Penyusunan dan analisa data sasaran tanam, sasaran panen, produktivitas dan produksi tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura.
- d. Penyedia rakitan teknologi produksi tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura.
- e. Pengawalan proses produksi tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura.
- f. Fasilitasi pengadaan benih dan bibit tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura.
- g. Pelaksanaan standarisasi mutu dan sertifikasi produk pertanian.
- h. Fasilitasi petak percontohan pembangunan pertanian secara terpadu sesuai bidangnya.
- i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan produksi tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura.
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidangnya.

5. Seksi Produksi Tanaman Pangan

Seksi Produksi Tanaman Pangan, mempunyai tugas:

- a. Bertanggung jawab teknis kegiatan produksi tanaman pangan;
- b. Mengumpulkan dan menganalisa data potensi produksi tanaman pangan;



- c. Menyusun peta potensi dan pengembangan sentra produksi tanaman pangan;
- d. Menyusun dan menganalisa data sasaran tanam, sasaran panen, produktivitas dan produksi tanaman pangan;
- e. Menyusun petunjuk teknis program produksi tanaman pangan;
- f. Melaksanakan penyedia rakitan teknologi produksi tanaman pangan;
- g. Mengawal proses produksi tanaman pangan;
- h. Melaksanakan fasilitasi pengadaan benih dan bibit tanaman pangan;
- i. Melaksanakan standarisasi mutu dan sertifikasi produk tanaman pangan;
- j. Melaksanakan fasilitasi petak percontohan pembangunan pertanian secara terpadu komoditas tanaman pangan;
- k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan produksi tanaman pangan;
- l. Melaksanakan penanganan permasalahan lain yang berkaitan dengan produksi tanaman pangan; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura.

6. Seksi Produksi Tanaman Perkebunan

Seksi Produksi Tanaman Perkebunan, mempunyai tugas:

- a. Bertanggung jawab teknis kegiatan produksi tanaman perkebunan;
- b. Mengumpulkan dan menganalisa data potensi produksi tanaman perkebunan;
- c. Menyusun peta potensi dan pengembangan sentra produksi tanaman perkebunan;
- d. Menyusun dan menganalisa data sasaran tanam, sasaran panen, produktivitas dan produksi tanaman perkebunan;
- e. Menyusun petunjuk teknis program produksi tanaman perkebunan;
- f. Menyusun penyedia rakitan teknologi produksi tanaman perkebunan;
- g. Mengawal proses produksi tanaman perkebunan;
- h. Melaksanakan fasilitasi pengadaan benih dan bibit tanaman perkebunan;
- i. Melaksanakan standarisasi mutu dan sertifikasi produk tanaman perkebunan;
- j. Melaksanakan fasilitasi petak percontohan pembangunan pertanian secara terpadu komoditas tanaman perkebunan;



- k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan produksi tanaman perkebunan;
- l. Melaksanakan penanganan permasalahan lain yang berkaitan dengan produksi tanaman perkebunan; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura.

7. Seksi Produksi Hortikultura

Seksi Produksi Hortikultura, mempunyai tugas:

- a. Bertanggung jawab teknis kegiatan produksi tanaman hortikultura;
- b. Mengumpulkan dan menganalisa data potensi produksi tanaman hortikultura;
- c. Menyusun peta potensi dan pengembangan sentra produksi tanaman hortikultura;
- d. Menyusun dan menganalisa data sasaran tanam, sasaran panen, produktivitas dan produksi tanaman hortikultura;
- e. Menyusun petunjuk teknis program produksi tanaman hortikultura;
- f. Menyusun penyedia rakitan teknologi produksi tanaman hortikultura;
- g. Mengawalan proses produksi tanaman hortikultura;
- h. Melaksanakan fasilitasi pengadaan benih dan bibit tanaman hortikultura;
- i. Melaksanakan standarisasi mutu dan sertifikasi produk tanaman hortikultura;
- j. Melaksanakan fasilitasi petak percontohan pembangunan pertanian secara terpadu komoditas tanaman hortikultura;
- k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan produksi tanaman hortikultura;
- l. Melaksanakan penanganan permasalahan lain yang berkaitan dengan produksi tanaman hortikultura; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura.

8. Bidang Sarana Prasarana dan Sumber Daya Manusia Pertanian

Bidang Sarana Prasarana dan SDM Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian bidang Sarana Prasarana dan



Sumber Daya Manusia pertanian. Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Sarana Prasarana dan SDM Pertanian, mempunyai fungsi:

- a. Penanggung jawab dan pelaksana program sarana prasarana dan sumber daya manusia pertanian;
- b. Penyusunan kebijakan strategis pendayagunaan lahan dan pengelolaan air, sarana produksi pertanian, alat mesin pertanian, dan pembiayaan usaha tani;
- c. Penyusunan standart, prosedur dan kriteria di bidang pendayagunaan lahan dan pengelolaan air, sarana produksi pertanian, alat mesin pertanian dan pembiayaan usaha tani;
- d. Pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan dalam pendayagunaan lahan dan pengelolaan air, sarana produksi dan pembiayaan usaha tani;
- e. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian;
- f. Fasilitasi Pembinaan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha pertanian;
- g. Pemberdayaan penyuluh pertanian;
- h. Fasilitasi kegiatan dan sarana penyuluhan pertanian;
- i. Pembinaan dan motivasi kepada para pelaku pembangunan pertanian; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian.

10. Seksi Prasarana Pertanian

Seksi Prasarana Pertanian, mempunyai tugas:

- a. Bertanggung jawab atas teknis kegiatan prasarana pertanian;
- b. Melaksanakan identifikasi, penyusunan serta analisa data lapang;
- c. Melaksanakan penetapan regulasi tentang fasilitasi prasarana pertanian;
- d. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan fasilitasi prasarana pertanian;
- e. Melaksanakan fasilitasi prasarana pertanian berdasarkan perencanaan yang telah disusun;
- f. Melaksanakan pembinaan kepada para penerima manfaat dalam rangka pelestarian, pemanfaatan dan pengembangan prasarana pertanian;
- g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan fasilitasi prasarana pertanian;
- h. Melaksanakan penanganan permasalahan lain yang berkaitan dengan fasilitasi prasarana pertanian; dan



- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Sumber Daya Manusia Pertanian.

11. Seksi Sarana Pertanian

Seksi Sarana pertanian, mempunyai tugas:

- a. Bertanggung jawab atas teknis kegiatan fasilitasi peralatan mesin (Alsintan) dan sarana produksi pupuk bersubsidi;
- b. Melaksanakan identifikasi, penyusunan serta analisa data lapang;
- c. Melaksanakan penetapan regulasi tentang fasilitasi peralatan mesin dan sarana produksi pertanian;
- d. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan fasilitasi peralatan mesin dan sarana produksi pupuk bersubsidi;
- e. Melaksanakan fasilitasi sarana produksi pertanian berdasarkan perencanaan yang telah disusun;
- f. Mengawal dan Mengawasi distribusi pupuk bersubsidi;
- g. Melaksanakan pembinaan kepada para penerima manfaat dalam rangka pelestarian, pemanfaatan dan pengembangan peralatan mesin dan sarana produksi pertanian;
- h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penggunaan peralatan mesin dan sarana produksi pertanian;
- i. Melaksanakan penanganan permasalahan lain yang berkaitan dengan fasilitasi peralatan mesin dan sarana produksi pertanian; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Sumber Daya Manusia Pertanian.

12. Seksi Sumber Daya Manusia Dan Kelembagaan Pertanian

Seksi Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian, mempunyai tugas:

- a. Bertanggung jawab atas teknis kegiatan pengembangan dan pemberdayaan SDM serta kelembagaan pertanian;
- b. Melaksanakan identifikasi, penyusunan dan analisa data pengembangan SDM serta kelembagaan pertanian;
- c. Melaksanakan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia (SDM) pertanian;
- d. Melaksanakan motivasi kerja SDM pertanian;



- e. Melaksanakan fasilitasi petak percontohan pembangunan pertanian secara terpadu;
- f. Melaksanakan pembinaan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha pertanian;
- g. Melaksanakan pemberdayaan penyuluh pertanian;
- h. Melaksanakan fasilitasi kegiatan penyuluhan pertanian;
- i. Melaksanakan penanganan permasalahan lain yang berkaitan dengan Sumber Daya Manusia dan kelembagaan pertanian; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Sumber Daya Manusia Pertanian.

13. Bidang Perlindungan Tanaman, Pasca Panen Dan Pemasaran

Bidang perlindungan Tanaman, Pasca Panen dan Pemasaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian bidang perlindungan tanaman, pasca panen dan pemasaran.

Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Perlindungan Tanaman, Pasca Panen dan Pemasaran, mempunyai fungsi:

- a. Penanggung jawab program perlindungan, pasca panen dan pemasaran produk pertanian;
- b. Perumusan kebijakan strategis perlindungan tanaman, pasca panen dan pemasaran produk pertanian;
- c. Pengumpulan, pengolahan dan analisa data serangan Organisme Pengganggu Tanaman pasca panen dan pemasaran produk pertanian;
- d. Penyedia rakitan teknologi perlindungan tanaman, adaptasi iklim dan pasca panen serta pemasaran produk pertanian;
- e. Pembinaan kelembagaan petani dalam pengendalian OPT dan adaptasi iklim;
- f. Pengembangan kelembagaan usaha pasca panen produk pertanian;
- g. Fasilitasi kegiatan perlindungan tanaman dan asuransi pertanian;
- h. Fasilitasi kerjasama dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha pertanian;
- i. Fasilitasi promosi, publikasi dan informasi produk pertanian;
- j. Fasilitasi pemasaran pelaku usaha pertanian;
- k. Fasilitasi petak percontohan pembangunan pertanian secara terpadu sesuai bidangnya;



- l. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan perlindungan tanaman, pasca panen dan pemasaran produk pertanian; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Pertanian.

14. Seksi Perlindungan Tanaman

Seksi Perlindungan Tanaman, mempunyai tugas:

- a. Bertanggung jawab atas teknis kegiatan perlindungan tanaman;
- b. Menyusun dan menganalisa data iklim serta serangan Organisme Pengganggu Tanaman;
- c. Menyusun peta rawan bencana dan serangan Organisme Pengganggu Tanaman;
- d. Melaksanakan penerbitan dan sosialisasi peringatan dini serangan OPT, bencana dan dampak iklim;
- e. Menyusun dan melaksanakan petunjuk teknis pengendalian OPT, bencana dan dampak perubahan iklim;
- f. Melaksanakan fasilitasi perlindungan tanaman dan asuransi pertanian;
- g. Melaksanakan pengendalian serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan dampak perubahan iklim;
- h. Melaksanakan penyediaan rakitan teknologi perlindungan tanaman dan adaptasi iklim kegiatan pertanian;
- i. Mengawal penggunaan pestisida kimia dan pengembangan teknologi pengendalian ramah lingkungan;
- j. Melaksanakan pembinaan kelembagaan petani dalam pengendalian OPT dan adaptasi iklim;
- k. Fasilitasi petak percontohan pembangunan pertanian secara terpadu melalui perlindungan tanaman; dan
- l. Melaksanakan penanganan permasalahan lain yang berkaitan dengan perlindungan tanaman; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelindungan Tanaman, Pasca Panen dan Pemasaran.

15. Seksi Pasca Panen Dan Standarisasi Mutu Produk Pertanian

Seksi Pasca Panen dan Standarisasi Mutu Produk Pertanian, mempunyai tugas:

- a. Bertanggung jawab atas teknis kegiatan penanganan pasca panen dan standarisasi mutu produk pertanian;



- b. Menyusun database pasca panen dan standarisasi mutu produk pertanian;
- c. Merumuskan kebijakan teknis bidang penanganan pasca panen dan standarisasi mutu produk pertanian;
- d. Menyusun dan Melaksanakan petunjuk teknis penanganan pasca panen dan standarisasi mutu produk pertanian;
- e. Melaksanakan penyediaan rakitan teknologi penanganan pasca panen;
- f. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan peningkatan mutu produk pertanian;
- g. Melaksanakan fasilitasi sertifikasi produk pertanian;
- h. Melaksanakan fasilitasi kelengkapan perijinan usaha, merk, hak paten dan legalitas usaha produk pertanian lain;
- i. Melaksanakan fasilitasi sarana dan prasarana penanganan pasca panen dan standarisasi mutu produk pertanian;
- j. Melaksanakan penanganan permasalahan lain yang berkaitan dengan penanganan pasca panen dan standarisasi mutu produk pertanian;
- k. Melaksanakan pengembangan kelembagaan usaha pasca panen produk pertanian; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Tanaman Pasca Panen dan Pemasaran.

16. Seksi Pemasaran Dan Pengembangan Usaha

Seksi Pemasaran dan Pengembangan Usaha, mempunyai tugas:

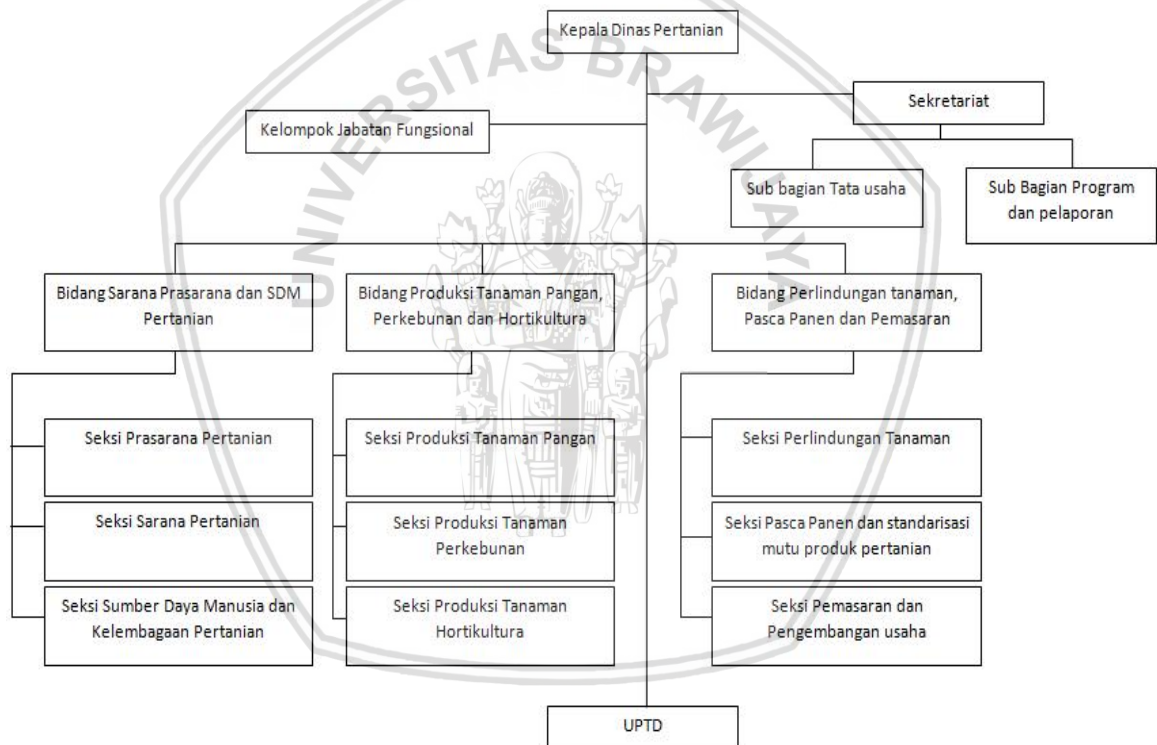
- a. Bertanggung jawab atas teknis kegiatan pemasaran dan pengembangan usaha pertanian;
- b. Menyusun database dan dokumentasi pemasaran produk pertanian;
- c. Menyusun dan pelaksanaan petunjuk teknis pemasaran produk dan pengembangan usaha pertanian;
- d. Melaksanakan pembinaan kepada pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemasaran dan pengembangan usaha pertanian;
- e. Sumber informasi harga pasar produk pertanian;
- f. Melaksanakan fasilitasi pelaku utama dan pelaku usaha dalam memasarkan produk pertanian;
- g. Melaksanakan fasilitasi promosi dan publikasi produk pertanian;



- h. Melaksanakan fasilitasi sarana dan prasarana pemasaran dan pengembangan usaha produk pertanian;
- i. Melaksanakan fasilitasi kerjasama dan kemitraan dalam membangun jejaring pasar, permodalan dan pengembangan usaha lain;
- j. Melaksanakan penanganan permasalahan lain yang berkaitan dengan pemasaran dan pengembangan usaha pertanian; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Tanaman, Pasca Panen dan Pemasaran.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN KABUPATEN JOMBANG

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR : 34 TAHUN 2016
TANGGAL : 3 Oktober 2016



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Jombang
Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, 2016

Dalam melaksanakan tata pemerintahan yang efektif, maka Dinas Pertanian Kabupaten Jombang perlu membuat tata kerja SKPD. Tata kerja ini berfungsi untuk mengatur pola komunikasi dan koordinasi antar aparatur/pegawai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan tata kerja Dinas Pertanian Kabupaten Jombang mengacu pada pasal 21 Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan



Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas. Adapun tata kerja Dinas Pertanian sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan tugas setiap pemangku jabatan struktural dan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, simplifikasi baik dalam lingkungan masing – masing maupun antar perangkat daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan rentang koordinasi Asisten Sekretaris Daerah masing-masing.
2. Setiap pemangku jabatan struktural wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Setiap pemangku jabatan struktural bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
4. Setiap pemangku jabatan struktural wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan langsung masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
5. Setiap laporan yang diterima oleh pemangku jabatan struktural dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
6. Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan langsung, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
7. Dalam melaksanakan tugas setiap pemangku jabatan struktural dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

2.2. Sumber Daya SKPD

a. Sumber Daya Manusia

Demi mewujudkan administrasi pemerintahan yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai perencanaan pembangunan, saat ini Dinas Pertanian Kabupaten Jombang didukung oleh 100 personil.

Apabila diklasifikasikan berdasarkan Golongan menunjukkan bahwa pegawai/aparatur Dinas Pertanian Kabupaten Jombang yang berstatus Golongan



II sebanyak 6 orang, Golongan III sebanyak 82 orang, dan Golongan IV sebanyak 12 orang dari 100 orang pegawai di Dinas Pertanian Kabupaten Jombang (Tabel 2.1).

Tabel 2.1

Komposisi Menurut Golongan/Kepangkatan

| No | Golongan | Jumlah Pegawai |
|--------|--------------|----------------|
| 1 | Golongan I | - |
| 2 | Golongan II | 6 orang |
| 3 | Golongan III | 82 orang |
| 4 | Golongan IV | 12 orang |
| Jumlah | | 100 orang |

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, Januari 2016

Selain itu jika diklasifikasikan berdasarkan Pendidikan menunjukkan bahwa pegawai/aparatur Dinas Pertanian Kabupaten Jombang yang berpendidikan Magister (S2) 4 orang, berpendidikan Sarjana (S1) sebanyak 65 orang, berpendidikan Diploma (D3) sebanyak 9 orang dan berpendidikan SLTA sebanyak 20 orang dari 100 orang pegawai di Dinas Pertanian Kabupaten Jombang

Tabel 2.2 Komposisi Menurut Pendidikan

| No | Pendidikan | Jumlah Pegawai |
|--------|---------------|----------------|
| 1 | S3 | - |
| 2 | S2 | 4 orang |
| 3 | S1 | 65 orang |
| 4 | D4 | - |
| 5 | D3 | 9 orang |
| 6 | D2 | - |
| 7 | D1 | 1 orang |
| 8 | SMA sederajat | 20 orang |
| 9 | SMP sederajat | 1 orang |
| 10 | SD sederajat | - |
| 11 | Tidak sekolah | - |
| Jumlah | | 100 orang |

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, Januari 2016



b. Asset/modal

Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Jombang merupakan pusat kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang dalam melayani masyarakat. Dalam melayani masyarakat Dinas Pertanian Kabupaten Jombang membutuhkan sarana dan prasarana guna mendukung pelayan yang prima, efektif dan efisien. Saat ini Dinas Pertanian Kabupaten Jombang telah dilengkapi asset/modal yang memadai dalam menunjang kinerja pelayan. Berikut adalah asset/modal Dinas Pertanian Kabupaten Jombang beserta jumlah dan kondisi dalam menunjang pelayanan kepada masyarakat:

Tabel 2.3

Asset/Modal Dinas Pertanian Kabupaten Jombang

| No. | Nama Barang | Jumlah | Kondisi | | |
|-----|-------------------------------------|--------|---------|-------------|-------|
| | | | Baik | Kurang Baik | Rusak |
| 1 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 6 | 6 | | |
| 2 | Tanah Bang. Pembibitan | 1 | 1 | | |
| 3 | Tanah Kebun | 2 | 2 | | |
| 4 | Kebun Pembibitan | 1 | 1 | | |
| 5 | Stationary Compressor | 1 | 1 | | |
| 6 | Transportable Generating | 1 | 1 | | |
| 7 | Pompa Lainnya | 4 | 4 | | |
| 8 | Pompa Air | 1 | 1 | | |
| 9 | Station Wagon | 2 | 2 | | |
| 10 | Pick Up | 2 | 2 | | |
| 11 | Sepeda Motor | 22 | 22 | | |
| 12 | Mesin Kompresor | 1 | 1 | | |
| 13 | Perkakas Bengkel Listrik | 1 | 1 | | |
| 14 | Global Positioning System | 1 | 1 | | |
| 15 | Air Conditioning Unit | 5 | 5 | | |
| 16 | Alat Pengolahan Tanah Lainnya | 24 | 24 | | |
| 17 | Alat Laboratorium Pertanian Lainnya | 7 | 7 | | |
| 18 | Alat Pasca Panen Lainnya | 2 | 2 | | |



| No. | Nama Barang | Jumlah | Kondisi | | |
|-----|-----------------------------------|--------|---------|-------------|-------|
| | | | Baik | Kurang Baik | Rusak |
| 19 | Penyemprot Mesin | 7 | 7 | | |
| 20 | Penyemprot Tangan | 13 | 13 | | |
| 21 | Alat Pemeliharaan Tanaman Lainnya | 11 | 11 | | |
| 22 | Alat Pengering (dreyer) | 1 | 1 | | |
| 23 | Almari Besi/Metal | 1 | 1 | | |
| 24 | Rak Besi / Metal | 3 | 3 | | |
| 25 | Rak Kayu | 2 | 2 | | |
| 26 | Brandkas | 1 | 1 | | |
| 27 | Lemari Kaca | 1 | 1 | | |
| 28 | Alat Penyimpanan Lainnya | 1 | 1 | | |
| 29 | Alat Penghancur Kertas | 1 | 1 | | |
| 30 | White Board | 9 | 9 | | |
| 31 | Peta | 1 | 1 | | |
| 32 | Lemari Kayu | 23 | 23 | | |
| 33 | Meja Kayu/ rotan | 34 | 34 | | |
| 34 | Kursi Kayu / Rotan | 12 | 12 | | |
| 35 | Meja Rapat | 20 | 20 | | |
| 36 | Meja Tulis | 50 | 50 | | |
| 37 | Kursi Rapat | 140 | 140 | | |
| 38 | Kursi Putar | 7 | 7 | | |
| 39 | Kursi Biasa | 24 | 24 | | |
| 40 | Meja Komputer | 3 | 3 | | |
| 41 | Meubelair Lainnya | 6 | 6 | | |
| 42 | Korden | 2 | 2 | | |
| 43 | M. Pemotong Rumput | 12 | 12 | | |
| 44 | AC Split | 3 | 3 | | |
| 45 | Kipas Angin | 4 | 4 | | |
| 46 | tabung Gas | 2 | 2 | | |
| 47 | Televisi | 2 | 2 | | |
| 48 | Sound system | 2 | 2 | | |



RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN KABUPATEN JOMBANG



| No. | Nama Barang | Jumlah | Kondisi | | |
|-----|----------------------------------|--------|---------|-------------|-------|
| | | | Baik | Kurang Baik | Rusak |
| 49 | Megaphone | 6 | 6 | | |
| 50 | Unit Power Supply | 1 | 1 | | |
| 51 | Tinag Bendera | 1 | 1 | | |
| 52 | Handy Cam | 1 | 1 | | |
| 53 | Komputer Unit / Jaringan Lainnya | 6 | 6 | | |
| 54 | P.C Unit | 1 | 1 | | |
| 55 | Lap top | 7 | 7 | | |
| 56 | Note Book | 23 | 23 | | |
| 57 | Personal Komputer Lainnya | 3 | 3 | | |
| 58 | CPU | 3 | 3 | | |
| 59 | Printer | 35 | 35 | | |
| 60 | Monitor | 4 | 4 | | |
| 61 | Peralatan Personal Komp. Lainnya | 3 | 3 | | |
| 62 | Peralatan Jaringan Lainnya | 1 | 1 | | |
| 63 | Meja Kerja Pejabat Eselon II | 1 | 1 | | |
| 64 | Meja Kerja Pejabat Eselon III | 1 | 1 | | |
| 65 | Meja Kerja Pejabat Eselon IV | 3 | 3 | | |
| 66 | Meja Kerja Pejabat | 6 | 6 | | |
| 67 | Meja Rapat Pejabat Eselon III | 4 | 4 | | |
| 68 | Kursi Kerja Pejabat Eselon II | 1 | 1 | | |
| 69 | Camera + Attachment | 6 | 6 | | |
| 70 | Proyektor + Attachment | 7 | 7 | | |
| 71 | Telephone Hybrid | 1 | 1 | | |
| 72 | Unintemuptible P.S(Ups) | 2 | 2 | | |
| 73 | Camera Electric | 4 | 4 | | |
| 74 | Megaphone | 1 | 1 | | |
| 75 | Telephone (Pabx) | 8 | 8 | | |
| 76 | Automatic Burette | 1 | 1 | | |
| 77 | Sieve | 1 | 1 | | |
| 78 | Autoclave | 1 | 1 | | |
| 79 | Hydrometer | 3 | 3 | | |



| No. | Nama Barang | Jumlah | Kondisi | | |
|-----|---|--------|---------|-------------|-------|
| | | | Baik | Kurang Baik | Rusak |
| 80 | Destilator | 1 | 1 | | |
| 81 | Haemocytometer | 1 | 1 | | |
| 82 | Mikroskop Binokuler | 1 | 1 | | |
| 83 | Exhaust Fan | 4 | 4 | | |
| 84 | Air Compresos | 1 | 1 | | |
| 85 | Alat Pemadam Kebakaran | 2 | 2 | | |
| 86 | Grinder | 1 | 1 | | |
| 87 | Meja Kerja | 3 | 3 | | |
| 88 | Tabung Detruksi | 18 | 18 | | |
| 89 | Gelas Ukur | 10 | 10 | | |
| 90 | Refrigerator/Freezer | 1 | 1 | | |
| 91 | Gedung Kantor Permanen | 6 | 6 | | |
| 92 | Bangunan Gedung Kantor Lainnya | 23 | 23 | | |
| 93 | Pagar | 1 | 1 | | |
| 94 | Banguna Gudang Lainnya | 1 | 1 | | |
| 95 | Bangunan gedung Tempat Kerja | 5 | 5 | | |
| 96 | Inst.Grd.Distri.Kap.Kecil | 1 | 1 | | |
| 97 | Inst.Grd.Distri.Kap.Sedang | 1 | 1 | | |
| 98 | Instalasi Gardi Listrik Distrbusi Lainnya | 2 | 2 | | |
| 99 | Instalasi Pusat Pengatur Listrik Lainnya | 1 | 1 | | |
| 100 | Jrn.Dstr.Teg.Dibawah 1 K | 1 | 1 | | |
| 101 | Jartel Diatas tnh Kap.Kec | 1 | 1 | | |
| 102 | Peta Lokasi | 1 | 1 | | |

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, 2013

2.3. Kinerja PelayananSKPD

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pertanian merupakan gambaran hasil pelaksanaan pembangunan pertanian yang telah dilaksanakan selama 5 tahun yang lalu. Gambaran pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pertanian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.



RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN KABUPATEN JOMBANG



Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang

| Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Renstra SKPD Tahun ke - | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke - | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke - | | | | |
|---|---|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|--------------|----------|-------------------------------|------|-------|------|------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 3 | 4 | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K |
| Program Peningkatan Kesejahteraan Petani | Pelatihan dan budidaya jamur tiram | 3 unit | 3 unit | 3 unit | 3 unit | 3 unit | 3 unit | 6 unit | 40 unit | 25 unit | 0 unit | 1.00 | 2.00 | 13.33 | 8.33 | 0.00 |
| | Revitalisasi, restrukturisasi dan penilaian kinerja poktan | 1204 poktan | 1204 poktan | 1204 poktan | 1204 poktan | 1204 poktan | 1204 poktan | 1204 poktan | 1204 poktan | 1204 poktan | 0 poktan | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| | Pembinaan dan pendampingan di gapoktan penerima dana PIUAP | 25 gapoktan | 25 gapoktan | 25 gapoktan | 50 gapoktan | 50 gapoktan | 24 gapoktan | 90 gapoktan | 90 gapoktan | 124 gapoktan | gapoktan | 0.96 | 3.60 | 3.60 | 2.48 | 0.00 |
| Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan | Pelatihan dan demplot pemanfaatan pekarangan | 1 unit | 2 unit | 5 unit | 7 unit | 10 unit | 1 unit | 1 unit | 1 unit | 10 unit | 0 unit | 1.00 | 0.50 | 0.20 | 1.43 | 0.00 |
| | Pelatihan petugas pertanian tentang teknologi pertanian tepat | 40 petugas | 40 petugas | 40 petugas | 40 petugas | 40 petugas | 43 petugas | 0 petugas | 40 petugas | 10 petugas | petugas | 1.08 | 0.00 | 1.00 | 0.25 | 0.00 |
| | Pelatihan dan demplot budidaya organik / SRI | 200 hektar | 200 hektar | 200 hektar | 200 hektar | 200 hektar | 105 hektar | 21 unit | 150 hektar | 80 hektar | hektar | 0.53 | 0.11 | 0.75 | 0.40 | 0.00 |
| | Pengadaan bahan kimia dan peralatan laboratorium | 2 paket | 2 paket | 2 paket | 2 paket | 2 paket | 2 paket | 1 paket | 1 paket | 1 paket | paket | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
| | Tersusunnya laporan hasil monitoring dan evaluasi | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | bulan | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |



RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN KABUPATEN JOMBANG



| Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Renstra SKPD Tahun ke - | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke - | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke - | | | | |
|---|---|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 3 | 4 | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K |
| Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan | Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) | 3 poktan | 3 poktan | 3 poktan | 3 poktan | 3 poktan | 6 poktan | 3 poktan | 90 orang | 3 poktan | 0 | 2.00 | 1.00 | 30.00 | 1.00 | 0.00 |
| | Pembinaan HIPPA/P3A pelaksanaan program WISMP | 2 kec. | 2 kec. | 2 kec. | 2 kec. | 2 kec. | 2 kec. | 2 kec. | 1 paket | 1 paket | kec. | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
| | Pelatihan penerapan teknologi pertanian bagi petani dan | 150 orang | 300 orang | 350 orang | 250 orang | 254 orang | 360 orang | 1,120 orang | 370 orang | 160 orang | orang | 2.40 | 3.73 | 1.06 | 0.64 | 0.00 |
| | Penyediaan alat mesin pertanian | 25 unit | 25 unit | 25 unit | 25 unit | 25 unit | 126 unit | 69 unit | 24 unit | 39 unit | unit | 5.04 | 2.76 | 0.96 | 1.56 | 0.00 |
| | Pengawasan distribusi pupuk bersubsidi | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | bulan | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| | Penyediaan bibit hortikultura | 3.000 bibit | 4.000 bibit | 5.000 bibit | 6.000 bibit | 6.000 bibit | 4,935 bibit | 6,400 bibit | 6,400 bibit | 1,600 bibit | bibit | 1.65 | 1.60 | 1.28 | 0.27 | 0.00 |
| | Demplot pengembangan komoditas hortikultura | 3 unit | 3 unit | 3 unit | 3 unit | 3 unit | 3 unit | 2 paket | 6 kec | 4 kec | | 1.00 | 0.67 | 2.00 | 1.33 | 0.00 |
| | Pengumpulan dan analisa data statistik pertanian | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | bulan | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| | Tersedianya bahan baku untuk industri pangan olahan | | | | | | | 5 ha | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | Tersedianya bahan baku untuk industri pangan olahan | | | | | | | | 100 ha | | | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |



RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN KABUPATEN JOMBANG



| Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Renstra SKPD Tahun ke - | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke - | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke - | | | | |
|-------------------|---|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|------------------------------|----------|---------|----------|---------|-------------------------------|-------|------|------|------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 3 | 4 | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K |
| | Tersedianya bahan dan peralatan pengendalian OPT | 2 paket | 2 paket | 2 paket | 2 paket | 2 paket | 1 paket | 1 paket | 1 paket | 1 ton | 1 paket | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
| | a. bahan pengendalian OPT | 1 paket | 1 paket | 1 paket | 1 paket | 1 paket | 1 paket | 1 paket | 1 paket | 1 paket | 1 paket | 0.54 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| | b. peralatan pengendalian OPT | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - pagupon | 10 unit | 10 unit | 10 unit | 10 unit | 10 unit | 100 unit | 0 unit | 10 unit | 0 unit | unit | 10.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | - emposan tikus | 10 unit | 10 unit | 10 unit | 10 unit | 10 unit | 100 unit | 100 unit | 0 unit | 40 unit | unit | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |
| | - hand sprayer, power sprayer, | 2 unit | 2 unit | 2 unit | 2 unit | 2 unit | 0 unit | 0 unit | 13 unit | 0 unit | unit | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 |
| | Rehabilitasi dan pembangunan sarana pengelolaan lahan dan air : | 13 paket | 17 paket | 19 paket | 19 paket | 19 paket | 24 paket | 1 paket | 1 paket | 39 paket | paket | 1.85 | 0.06 | 0.05 | 2.05 | 0.00 |
| | Diseminasi teknologi dan promosi/pameran hasil produksi pertanian | 3 kali | 3 kali | 3 kali | 3 kali | 3 kali | 3 kali | 3 kali | 3 kali | 3 kali | kali | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |



RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN KABUPATEN JOMBANG



| Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Renstra SKPD Tahun ke - | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke - | | | | | | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke - | | | | |
|---|--------------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|--------|------------------------------|---------|---------|---------|---------|---|---|---|---|---|-------------------------------|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K |
| Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Penilaian kinerja penyuluh pertanian | 175 orang | 175 orang | 175 orang | 175 orang | 175 orang | 175 orang | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | Rehab dan pembangunan BPP | unit | 1 unit | 1 unit | 1 unit | 2 unit | 0 unit | 1 unit | 0 unit | 4 BPP | unit | #DIV/0! | 1.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| Program Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | | | | | | | |
| | Meningkatnya jaringan pemasaran | 21 kec. | 21 kec. | 21 kec. | 21 kec. | 21 kec. | 0 kec. | 21 kec. | 21 kec. | 21 kec. | kec. | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |



RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN KABUPATEN JOMBANG



Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang

| uraian | Anggaran Pada Tahun ke- | | | | | realisasi anggaran tahun | | | | | Rasio antara realisasi dan anggaran tahun | | | | | Rata - rata | |
|--|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---|---|------|-----|------|---|-------------|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | anggaran | realisasi |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 507,368,750 | 791,213,000 | 979,414,000 | 1,051,118,500 | 1,038,674,000 | 489,101,241 | 719,279,060 | 937,175,138 | 969,143,461 | | 96% | 91% | 96% | 92% | | 21% | 27% |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 370,455,000 | 223,416,000 | 289,780,000 | 396,727,500 | 404,570,000 | 351,204,990 | 214,339,510 | 283,805,023 | 353,281,000 | | 95% | 96% | 98% | 89% | | 7% | 6% |
| Program peningkatan disiplin aparatur | 16,875,000 | 19,250,000 | 20,625,000 | 20,625,000 | 33,300,000 | 16,800,000 | 18,480,000 | 20,493,000 | 20,493,000 | | 100% | 96% | 99% | 99% | | 21% | 7% |
| Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur | - | - | 31,610,000 | 20,625,000 | | - | - | 17,944,000 | 20,493,000 | - | - | | 57% | 99% | | | |
| Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 10,037,500 | 7,962,500 | | | | 10,037,000 | 7,956,500 | | | | 100% | 100% | | | | | |
| Program Peningkatan Kesejahteraan Petani | 378,650,000 | 481,783,600 | 525,761,000 | 819,765,000 | 250,175,000 | 371,185,650 | 456,519,600 | 521,187,000 | 769,913,250 | | 98% | 95% | 99% | 94% | | 6% | 28% |
| Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan | - | 23,197,500 | 48,197,500 | 25,000,000 | 100,319,750 | - | 22,730,700 | 43,110,000 | 25,000,000 | | | 98% | 89% | 100% | | | |
| Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan | 3,350,690,000 | 1,944,326,500 | 2,369,312,500 | 1,827,545,000 | 378,082,000 | 3,226,335,800 | 1,838,887,910 | 2,209,849,800 | 1,705,573,950 | | 96% | 95% | 93% | 93% | | -31% | -15% |
| Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan | 3,714,847,750 | 6,109,904,200 | 3,441,208,200 | 7,337,749,250 | 3,348,127,333 | 3,571,288,752 | 5,969,445,640 | 2,871,546,525 | 4,402,532,813 | | 96% | 98% | 83% | 60% | | 20% | 23% |
| Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan | 437,190,000 | 1,046,670,000 | 255,913,395 | 1,623,680,000 | 1,049,920,000 | 429,393,250 | 1,038,430,000 | 251,363,395 | 1,365,265,600 | | 98% | 99% | 98% | 84% | | 141% | 170% |



2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian

A. Tantangan Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang

Berdasarkan analisa indikator kinerja pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, analisa Renstra Kementerian Pertanian Republik Indonesia, analisa Renstra Propinsi, analisa RTRW, dan analisa KLHS, maka tantangan pelayanan yang dihadapi oleh Dinas Pertanian Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut :

1. Menurunnya tingkat kesuburan tanah
2. Masih tingginya penggunaan pestisida dan pupuk anorganik
3. Tingginya alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi non pertanian
4. Dampak perubahan iklim terhadap tingginya OPT
5. Perdagangan bebas regional dapat memperlemah posisi petani sebagai produsen
6. Semakin kurangnya tenaga kerja pertanian
7. Kurangnya daya dukung masyarakat terhadap pembangunan pertanian
8. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan penyuluhan
9. Belum optimalnya kegiatan monitoring evaluasi penyuluhan
10. Terbatasnya jumlah penyuluh pertanian
11. Keterseidaan sarana dan prasarana penyuluhan belum tercukupi
12. Terbatasnya pemahaman dan keterampilan SDM aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi
13. Kurangnya rakitan teknologi spesifikasi lokasi
14. Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi dalam upaya pencapaian tujuan program dan kegiatan
15. Kurangnya monitoring dan evaluasi personal
16. Kurangnya motivasi staf

B. Peluang Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang

Peluang pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang terhadap peningkatan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

1. Adanya sinergitas dan program dengan SKPD terkait
2. Lahan pertanian yang luas
3. Jumlah kelompok tani binaan yang cukup banyak
4. Kebutuhan pangan meningkat
5. Kebijakan pemilik modal untuk menjalin kemitraan



6. Potensi areal pertanian
7. Tersedianya mekanisasi atau alsintan
8. Kelembagaan HIPPA/GHIPPA
9. Komitmen pimpinan daerah terhadap kegiatan penyuluhan
10. Tersedianya kelembagaan poktan dan gapoktan
11. Adanya mitra sektor pertanian
12. Terbukanya kerjasama dengan media massa sebagai saran penyuluhan
13. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk pertanian yang ramah lingkungan





BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Berdasarkan hasil analisis pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, maka identifikasi permasalahan yang paling utama dihadapi saat ini adalah :

1. Menurunnya tingkat kesuburan tanah
2. Masih tingginya penggunaan pestisida dan pupuk anorganik
3. Tingginya alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi non pertanian
4. Dampak perubahan iklim terhadap tingginya OPT
5. Perdagangan bebas regional dapat memperlemah posisi petani sebagai produsen
6. Semakin kurangnya tenaga kerja pertanian
7. Kurangnya daya dukung masyarakat terhadap pembangunan pertanian
8. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan penyuluhan
9. Belum optimalnya kegiatan monitoring evaluasi penyuluhan
10. Terbatasnya jumlah penyuluh pertanian
11. Ketersediaan sarana dan prasarana penyuluhan belum tercukupi
12. Terbatasnya pemahaman dan keterampilan SDM aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi
13. Kurangnya rakitan teknologi spesifikasi lokasi
14. Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi dalam upaya pencapaian tujuan program dan kegiatan
15. Kurangnya monitoring dan evaluasi personal
16. Kurangnya motivasi staf

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah : **“JOMBANG SEJAHTERA UNTUK SEMUA”**. Dari visi ini dijabarkan dalam beberapa **MISI** sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial dan Beragama
2. Mewujudkan Layanan Dasar yang Terjangkau.



3. Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Merata
4. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup.
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Bersih

Tugas dan fungsi Dinas Pertanian yang berkaitan dengan visi dan misi (khususnya misi 3) Kepala Daerah tersebut adalah **Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Merata** yang mengacu pada misi Dinas Pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan petani berbasis agribisnis melalui perbaikan infrastruktur pertanian. Penjabaran visi misi Bupati dan Wakil Bupati yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dapat dilihat dalam tabel berikut ini.





RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN KABUPATEN JOMBANG



Tabel 3.1 : Analisa Visi Misi Bupati Terpilih yang berkaitan dengan Tupoksi Dinas Pertanian

| MISI | TUJUAN | SASARAN RPJMD | | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM | SASARAN STRATEGIS PROGRAM | INDIKATOR SASARAN PROGRAM |
|--|--|--|---|---|--|---|--|----------------------------------|
| | | URAIAN | INDIKATOR | | | | | |
| Meningkatkan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing Dan Merata | Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Dan Pendapatan Masyarakat | Meningkatkan Kontribusi Sektor Pertanian dan Perikanan | Persentase Sub Sektor Pertanian Peternakan Perburuan dan Jasa Pertanian Terhadap PDRB | Meningkatkan produksi dan produktivitas sub sektor pertanian perkebunan peternakan dan perikanan berbasis teknologi keunggulan sumberdaya lokal dan berkelanjutan | Optimalisasi penerapan teknologi peningkatan produksi melalui pemanfaatan teknik budidaya dengan produktivitas tinggi yang berkelanjutan | Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku | Meningkatnya produktivitas tembakau | Produktivitas tembakau |
| | | | | | Peningkatan kerjasama dengan balai penelitian dalam rangka tranfer teknologi untuk peningkatan produktivitas | Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Perkebunan | Meningkatnya budidaya komoditas perkebunan | Luas tanam komoditas perkebunan: |
| | | | | | | | | - Tebu (Ha) |
| | | | | | | | | - Kopi (Ha) |
| | | | | | | | | - Cengkeh (Ha) |
| | | | | | | | | - Kakao (Ha) |



RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN KABUPATEN JOMBANG



| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|---|--|
| | | | | | Pembinaan pelatihan dan fasilitasi akses permodalan sarana prasarana usaha (budidaya dan pasca panen) | Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Pertanian | Meningkatnya budidaya hortikultura dari dana DBHCHT | Persentase luas lahan hortikultura dari dana DBHCHT terhadap luas lahan hortikultura |
| | | | | | Fasilitasi akses jaringan pemasaran produk baik di dalam maupun luar daerah | Program Pengembangan Produk Hasil Agribisnis Menjadi Bahan Jadi Atau Setengah Jadi | Meningkatnya pengolahan pasca panen komoditas padi | Persentase produksi beras petani terhadap total produksi beras Kabupaten |
| | | | | | Peningkatan fungsi dan peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) | Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | Meningkatnya kesejahteraan petani tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan | NTP Tanaman Pangan |
| | | | | | | | | NTP Hortikultura |
| | | | | | | | | NTP Perkebunan |



RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN KABUPATEN JOMBANG



| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | | Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | Meningkatnya pemasaran hasil produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan | Persentase poktan/gapoktan yang terfasilitasi pemasaran hasil produksi |
| | | | | | | Program Peningkatan Mutu dan Legalisasi Produk Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | Meningkatnya daya saing produk unggulan komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | Persentase produk unggulan yang tersertifikasi |
| | | | | | | Program Peningkatan Produksi Pertanian | Tercapainya pengembangan tanaman pangan dan hortikultura | Luas tanam komoditas tanaman pangan dan hortikultura |
| | | | | | | | | - Padi (Ha) |
| | | | | | | | | - Jagung (Ha) |
| | | | | | | | | - Kedelai (Ha) |
| | | | | | | | | - Cabe (Ha) |
| | | | | | | Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian | Meningkatnya produktivitas tanaman pangan dan hortikultura | Produktivitas komoditas tanaman pangan dan hortikultura |
| | | | | | | | | - Padi |
| | | | | | | | | - Jagung |



RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN KABUPATEN JOMBANG



| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|---|
| | | | | | | | | - Kedelai |
| | | | | | | | | - Cabe |
| | | | | | | Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan | Meningkatnya kualitas SDM petani | Rasio penyuluh pertanian terhadap jumlah desa |
| | | | | | | Program Peningkatan Produksi Perkebunan | Terwujudnya pengembangan budidaya komoditas perkebunan | Luas tanam komoditas perkebunan |
| | | | | | | | | - Tebu |
| | | | | | | | | - Tembakau |
| | | | | | | Program Pengembangan Kawasan Agropolitan cluster tanaman pangan | Terwujudnya infrastruktur pertanian yang berkualitas | Persentase infrastruktur pertanian yang ditingkatkan kualitasnya di kawasan agropolitan |
| | | | | | | Program Pembangunan Infrastruktur Pengelolaan air Tanaman Pertanian | Terwujudnya jaringan irigasi kondisi baik | Persentase jaringan irigasi yang terbangun |



RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN KABUPATEN JOMBANG



| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|---|--|
| | | | | | | Program Rehabilitasi Infrastruktur Pengelolaan Air Tanaman Pertanian | Terwujudnya jaringan irigasi kondisi baik | Persentase jaringan irigasi yang ditingkatkan kualitasnya |
| | | | | | | Program Pengelolaan Lahan Tanaman Pertanian | Terwujudnya JUT kondisi baik | Persentase JUT dalam kondisi baik |
| | | | | | | Program Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Sumur Dangkal Pertanian | Terwujudnya jaringan irigasi kondisi baik | Persentase sarana prasarana air (sumur dangkal) dalam kondisi baik |
| | | | | | | Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan prasarana Sumur Dangkal Perkebunan | Terwujudnya jaringan irigasi kondisi baik | Persentase sarana prasarana air (sumur dangkal) dalam kondisi baik |



RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN KABUPATEN JOMBANG



| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan | Meningkatnya produktivitas tanaman perkebunan | - Produktivitas Tebu - Produktivitas Tembakau |
| | | | | | | Program Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif | Meningkatnya SDM kelompok P3A | Persentase kelompok P3A yang meningkat kemampuannya |
| | | | | | | Program Peningkatan daya Dukung Lahan, Air dan Lingkungan Pertanian | Meningkatnya kesuburan lahan pertanian | Persentase kenaikan kandungan Bahan Organik (BO) lahan pertanian |
| | | | | | | Program Peningkatan Sarana Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | Terpenuhinya kebutuhan alat mesin pertanian | Persentase pemenuhan alat mesin pertanian |
| | | | | | | Program Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | Menurunnya serangan hama penyakit pada tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan | Persentase gangguan OPT |



RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN KABUPATEN JOMBANG



| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | Program Penyusunan Data, Informasi, Monitoring dan Evaluasi Pertanian | Meningkatnya kualitas data dan informasi yang valid dan akurat | Persentase dokumen yang dilakukan updating |
| | | | | | | Program Pengembangan Kawasan Agropolitan Klaster Tanaman Pangan | Meningkatnya produktivitas tanaman pangan di kawasan agropolitan | <ul style="list-style-type: none"> - Produktivitas padi di Kawasan agropolitan - Produktivitas jagung di Kawasan agropolitan - Produktivitas kedelai di Kawasan agropolitan |
| | | | | | | Program Pengembangan Kawasan Agropolitan Klaster Hortikultura | Meningkatnya produktivitas hortikultura | <ul style="list-style-type: none"> - Produktivitas Cabe (ku/Ha) - Produktivitas salak (kg/pohon) - Produktivitas durian (Kg/pohon) |
| | | | | | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Lancarnya tugas dan fungsi OPD | Administrasi perkantoran terwujud |



RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN KABUPATEN JOMBANG



| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|---------------------------------------|
| | | | | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Meningkatnya sarana prasarana aparatur | Sarana prasarana aparatur terwujud |
| | | | | | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Terwujudnya disiplin aparatur | Pakaian olah raga terpenuhi |
| | | | | | | Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD | Terwujudnya perencanaan, pengelolaan keuangan dan pencapaian kinerja program | Tertib pengelolaan tatausaha keuangan |



3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Berdasarkan telaahan terhadap Rencana Strategis Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2010 – 2014 permasalahan pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang beserta faktor penghambat dan faktor pendorong keberhasilan pembangunan pertanian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2.
Telaah Rencana Strategis Kementerian Pertanian dan Rencana Strategis Dinas
Pertanian Propinsi Jawa Timur

| No | Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L | Permasalahan Pelayanan OPD Provinsi | Sebagai Faktor | |
|-----|---|-------------------------------------|--|---|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | Pertumbuhan Komoditas Pangan Utama : Produksi Padi 3,22%/thn; Jagung 10,02%/thn dan Kedelai 20,05%/thn. | | <ol style="list-style-type: none">1. Tingginya alih fungsi/konversi lahan pertanian2. Meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global3. Belum optimalnya tingkat kesuburan lahan4. Terbatasnya ketersediaan infrastruktur pertanian (irigasi tingkat Usaha Tani (JITUT), Jaringan Irigasi Desa (JIDES) dan jalan usaha tani (JUT))5. Terbatasnya sarana dan prasarana budidaya (alsintan)6. Lambat/belum optimalnya transfer teknologi kepada petani7. Terbatasnya akses petani terhadap permodalan (pola pinjaman permodalan dan tingkat suku bunga masih belum pro petani)8. Masih tingginya | <ol style="list-style-type: none">1. Adanya sinergitas dan program dengan SKPD terkait2. Lahan pertanian yang luas3. Jumlah kelompok tani binaan yang cukup banyak4. Kebutuhan pangan meningkat5. Kebijakan pemilik modal untuk menjalin kemitraan6. Potensi areal pertanian7. Tersedianya mekanisasi atau alsintan8. Kelembagaan HIPPA/GHIPPA9. Komitmen pimpinan daerah terhadap kegiatan penyuluhan10. Tersedianya kelembagaan poktan dan gapoktan11. Adanya mitra sektor pertanian12. Terbukanya kerjasama dengan media massa sebagai saran penyuluhan13. Meningkatnya kesadaran masyarakat |



| No | Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L | Permasalahan Pelayanan OPD Provinsi | Sebagai Faktor | |
|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | | <p>tingkat kehilangan produk saat panen</p> <p>9. Belum optimalnya upaya peningkatan nilai tambah produk pertanian tanaman pangan</p> <p>10. Pengembangan agroindustri yang belum optimal dalam pengolahan dan pemasaran</p> <p>11. Pengembangan pertanian masih bersifat parsial pada sistem pertanian dan belum terintegrasi dalam suatu sistem agribisnis</p> <p>12. Pengembangan pertanian masih bersifat parsial pada sistem pertanian dan belum terintegrasi dalam suatu sistem agribisnis</p> <p>13. Adanya kecenderungan terjadinya proses levelling off (penyamarataan/penyeragaman kualitas/mutu) pada produk pertanian tanaman pangan</p> <p>14. Kondisi infrastruktur jalan ke sentra produksi belum memadai</p> <p>15. Lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani</p> <p>16. Terbatasnya akses informasi pasar dan pemasaran bagi petani</p> | <p>terhadap produk pertanian yang ramah lingkungan</p> |



| No | Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L | Permasalahan Pelayanan OPD Provinsi | Sebagai Faktor | |
|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|---|-----------|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | | 17. Lemahnya kapasitas dan kelembagaan penyuluh pertanian 18. Posisi tawar petani masih rendah 19. Rendahnya Nilai Tukar Petani sub sektor tanaman pangan | |

Sumber: Renstra Kementerian Pertanian dan Renstra Propinsi Jawa Timur

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Komoditas pertanian tanaman pangan direncanakan meliputi komoditas padi dan tanaman hortikultura. Pengembangan tanaman padi direncanakan untuk mewujudkan swasembada pangan di Kabupaten Jombang dan mewujudkan Kabupaten Jombang sebagai salah satu sentra beras di wilayah Jawa Timur.

Rencana Kegiatan pertanian tanaman pangan dikembangkan di Kecamatan Ngoro, Kecamatan Mojowarno, Kecamatan Bareng, Kecamatan Wonosalam, sebagian wilayah Kecamatan Mojoagung, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Kudu dan Kecamatan Sumobito.

Kegiatan disektor pertanian tanaman pangan khususnya padi akan didukung lahan pertanian sawah beririgasi teknis yang dikonservasi seluas 40,676 untuk mewujudkan Kabupaten Jombang sebagai salah satu sentra beras di Jawa Timur.

Sedangkan untuk tetap mempertahankan swasembada pangan di Kabupaten Jombang hingga 20 tahun ke depan, minimal akan pengembangan tanaman padi akan diarahkan dilahan seluas minimal 27,125 ha. Luas lahan minimal tersebut ditetapkan sebagai luas lahan pertanian abadi di Kabupaten Jombang.

Tanaman pangan hortikultura yang dikembangkan di kawasan pertanian lahan kering meliputi tanaman palawija seperti jagung, kacang kedelai, kacang tanah, kacang hijau, dan ubi kayu.

Rencana pengembangan kegiatan-kegiatan tersebut akan di jabarkan lebih rinci dalam rencana pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten. Rencana pengembangan kegiatan sektor pertanian lihat pada tabel



Tabel 3.3
Rencana Pengembangan Kegiatan Sektor Pertanian
Di Kabupaten Jombang

| KEGIATAN PERTANIAN | KOMODITAS UNGGULAN | ARAH PENGEMBANGAN | WILAYAH PENGEMBANGAN KEGIATAN |
|------------------------------|---|--|--|
| Sub Sektor Tanaman Pangan | Padi | Pembentukan Sentra Beras | Kecamatan Ngoro, Kecamatan Mojowarno, Kecamatan Bareng, sebagian wilayah Kecamatan Mojoagung, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Megaluh, dan Kecamatan Sumobito |
| | Palawija : Kedelai, Jagung dan Ubi Kayu | Kecukupan bahan baku untuk mendorong terbentuknya agroindustri. | Kecamatan Kudu, Kecamatan Ngusikan, Kecamatan Plandaan, Kecamatan Bareng, Kecamatan Mojowarno dan Kecamatan Kabuh. |

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang 2009 – 2029, 2009.

Selain itu Kabupaten Jombang juga mengembangkan kawasan Agropolitan. Pengembangan Kawasan agropolitan di Kabupatem Jombang diwujudkan melalui pembentukan Satuan Kawasan Pengembangan Pertanian (SKPP) :

- SKPP I meliputi Kecamatan Mojowarno, Kecamatan Wonosalam, Kecamatan Bareng, dan Kecamatan Ngoro.
 - Pengembangan kegiatan pertanian, meliputi:
 - Pusat pengembangan komoditas pertanian;
 - Pusat informasi dan pergudangan;
 - Penyediaan fasilitas akomodasi yang ditunjang oleh aktivitas jasa informasi dan transportasi;
 - Peningkatan produktivitas pertanian;
 - Pengembangan agroindustri;



- f) Pengembangan agribisnis: berupa jasa-jasa perbankan/bantuan permodalan untuk pengembangan pertanian;
- g) Pengembangan agrowisata berupa perkebunan;
- h) Pengembangan fasilitas pendukung wisata.

b. Pengembangan prasarana pertanian, meliputi:

- a) Balai penelitian dan pengembangan pertanian;
- b) Pusat pelatihan dan penyuluhan pertanian;
- c) Pergudangan dan distribusi pupuk dan bibit;
- d) Industri pengolahan dan pengemasan hasil pertanian;
- e) Bank perkreditan/simpan pinjam;
- f) Pasar utama hasil kegiatan pertanian;
- g) Pusat informasi dan akomodasi wisata.

2. SKPP II Mojoagung meliputi Kecamatan Mojoagung, Kecamatan Sumobito dan Kecamatan Kesamben.

- a. Pengembangan kegiatan pertanian sebagai kawasan produksi utama pembentukan sentra beras;
- b. Pengembangan prasarana pertanian, yang terdiri dari pergudangan, pusat koleksi tanaman pangan dan perkebunan.

3. SKPP II Mojoagung meliputi: Kecamatan Kudu, Kecamatan Ngusikan, Kecamatan Kabuh, Kecamatan Plandaan dan Kecamatan Bandar Kedungmulyo;

- a. Pengembangan kegiatan pertanian, yang meliputi pengolahan hasil pertanian, komoditas perkebunan dan pusat koleksi;
- b. Pengembangan prasarana pertanian, yang meliputi industri dan pergudangan.

Penentuan hirarki pusat pelayanan kawasan agropolitan yang dikembangkan di Kabupaten Jombang meliputi :

a. Kawasan Penghasil Bahan Baku

Kawasan penghasil bahan baku adalah kawasan produksi di kawasan perdesaan dengan cakupan wilayah satu desa atau lebih dan ditetapkan mempunyai potensi unggulan.

b. Pusat Pengumpul Bahan Baku

Pusat Pengumpul Bahan Baku adalah pusat kegiatan di kawasan perdesaan yang menjadi pusat koleksi dan distribusi bagi beberapa kawasan produksi. Pusat pengumpul bahan baku juga sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang secara hierarki terkait dalam sistem pusat kegiatan perkotaan dan ditetapkan sebagai desa



pusat pertumbuhan dan direncanakan terdapat fasilitas agropolitan berupa pasar pengumpul setingkat pasar desa.

c. Pusat Pelayanan Kawasan atau klaster

Pusat Pelayanan Kawasan atau klaster adalah kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan yang melayani beberapa desa yang terkait dalam sebuah sistem agribisnis dan direncanakan terdapat fasilitas agropolitan yang melayani dalam lingkup wilayah klaster.

Pusat Pelayanan Kawasan atau klaster dalam hierarki perkotaan kabupaten adalah Pusat Pelayanan Kawasan yang direncanakan terdapat fasilitas agropolitan yang melayani dalam lingkup wilayah klaster.

d. Agropolitan center

Agropolitan Center adalah Pusat Kegiatan SKPP, yang didalam hirarki perkotaan kabupaten adalah Pusat Kegiatan Lokal promosi(PKLp). Dalam struktur sistem agropolitan Kabupaten Jombang pusat kegiatan diarahkan di SKPP I, yang meliputi Kecamatan Mojowarno, Kecamatan Wonosalam, Kecamatan Bareng, dan Kecamatan Ngoro.

e. Pusat pasar regional

Pusat Pasar Regional merupakan pusat distribusi skala kabupaten yaitu di Perkotaan Mojoagung. Pada pusat pasar regional agropolitan ini diarahkan dikembangkan beberapa prasarana dan sarana penunjang yang mendukung kegiatan pemasaran regional.

Secara keseluruhan, kegiatan yang dikembangkan pada sistem agropolitan ini meliputi :

a. Kegiatan Produksi Hasil Pertanian, meliputi:

1. Pertanian tanaman pangan;
2. Perkebunan (buah, tanaman obat);
3. Peternakan;
4. Perikanan; dan
5. Produksi Hasil Hutan.

b. Agroindustri yang berlokasi di pusat-pusat WP, dan memungkinkan adanya aglomerasi untuk efisiensi dan efektivitas pemanfaatan ruang dan pelayanan sarana dan prasarana;

c. Agribisnis, yang berlokasi di pusat SKPP dengan pertimbangan efisiensi dan efektivitas dalam kaitan dengan forward linkage dan backward linkage; dan

d. Agrowisata, yang berlokasi baik di kawasan perkotaan maupun pusat perdesaan.



Pengembangan Prasarana wilayah untuk mendukung sistem Agropolitan meliputi :

- a. Pengembangan jaringan irigasi khususnya pada pengembangan kawasan pertanian lahan basah berupa peningkatan dari irigasi non-teknis atau ½ teknis ke teknis.
- b. Pengembangan jaringan jalan yang merupakan jaringan antar pusat-pusat desa menuju pusat kegiatan dan jalan usaha tani.
- c. Pengembangan jaringan kelistrikan untuk menunjang kegiatan agroindustri pada masing-masing pusat SKPP khususnya dunia industri.
- d. Pengembangan sarana pendukung kegiatan sub sektor hulu sampai dengan sub sektor hilir, sarana pengembangan SDM di kawasan agropolitan dan pengembangan kelembagaan di kawasan agropolitan.

Pengembangan sistem agropolitan di Kabupaten Jombang secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.





RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN KABUPATEN JOMBANG



Tabel 3.4 Rencana Sistem Agropolitan

| NO. | SATUAN KAWASAN PENGEMBANGAN PERTANIAN | FUNGSI DAN PERAN / SKALA PELAYANAN | SEKTOR/KEGIATAN UNGGULAN | PENGEMBANGAN KEGIATAN | LOKASI | FASILITAS PENDUKUNG |
|-----|--|--|---|---|--|---|
| 1 | SKPP Mojowarno: Mojowarno, Wonosalam, Bareng, Ngoro | Sebagai Pusat Kegiatan Agropolitan skala Kabupaten Jombang | <ul style="list-style-type: none">- Pertanian Tanaman Pangan.- Perkebunan: Kopi, Cengkeh, Tembakau, tebu, kelapa.- Tanaman Obat dan hasil hutan.- Tanaman Buah.- Kehutanan : Hutan Produksi- Peternakan: Ternak Besar (Sapi) | <ul style="list-style-type: none">- Pusat pengembangan komoditas pertanian- pusat informasi, pergudangan.- penyediaan fasilitas akomodasi yang ditunjang oleh aktivitas jasa informasi dan transportasi- Peningkatan produktifitas pertanian | Perkotaan Kecamatan Mojowarno | <ul style="list-style-type: none">- Balai Penelitian dan pengembangan pertanian,- pusat pelatihan dan penyuluhan pertanian- pergudangan dan distribusi pupuk dan bibit. |
| | | | | <ul style="list-style-type: none">- Pengembangan agro industri | Perkotaan Mojowarno, dan desa Pusat pertumbuhan (Panglungan) | <ul style="list-style-type: none">- Industri pengolahan dan pengemasan hasil pertanian. |
| | | | | <ul style="list-style-type: none">- Pengembangan Agro-bisnis: berupa jasa-jasa perbankan/ bantuan permodalan untuk pengembangan pertanian | Perkotaan Mojowarno | <ul style="list-style-type: none">- Bank Perkreditan/ Simpan Pinjam- Pasar utama hasil kegiatan pertanian- Pengembangan |
| | | | | <ul style="list-style-type: none">- Pengembangan Agrowisata berupa perkebunan- Pengembangan fasilitas pendukung wisata | Desa Panglungan Kec. Wonosalam Kecamatan Mojowarno | <ul style="list-style-type: none">- pusat informasi dan akomodasi wisata |



RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN KABUPATEN JOMBANG



| NO. | SATUAN KAWASAN PENGEMBANGAN PERTANIAN | FUNGSI DAN PERAN / SKALA PELAYANAN | SEKTOR/KEGIATAN UNGGULAN | PENGEMBANGAN KEGIATAN | LOKASI | FASILITAS PENDUKUNG |
|-----|--|--|--|---|--|---|
| 2 | SKPP Mojoagung: Mojoagung, Sumobito, dan Kesamben | Sebagai pusat kegiatan Agropolitan skala WP | <ul style="list-style-type: none">- Pertanian tanaman pangan (beras)- Komoditas perkebunan (tebu, dan palawija)- Perikanan dan peternakan unggas | <ul style="list-style-type: none">- Sebagai kawasan Produksi utama pembentukan Sentra beras | Perkotaan Mojoagung dengan sub pusat koleksi di DPP Curah Malang dan Perkotaan Kec. Sumobito | <ul style="list-style-type: none">- Pergudangan dan Pusat Koleksi tanaman pangan dan perkebunan |
| 3 | SKPP Ploso: Kecamatan Kudu, Ngusikan, Kabuh, Plandaan, dan Bandarkedungmulyo | Sebagai Pusat Kegiatan Agropolitan skala WP Ploso | <ul style="list-style-type: none">- Komoditas Perkebunan: Tebu, Pandan, Kelapa- Kehutanan- Peternakan kecil (kambing) | <ul style="list-style-type: none">- pengolahan hasil pertanian (komoditas perkebunan) dan pusat koleksi | Perkotaan Ploso, kawasan peruntukan industri. Desa-desa Pusat Pertumbuhan | <ul style="list-style-type: none">- Industri dan Pergudangan |

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang 2009 – 2029, 2009



3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan hasil analisis pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, maka identifikasi permasalahan yang paling utama dihadapi saat ini adalah:

1. Kondisi agroekosistem mengalami degradasi
2. Belum optimalnya kelembagaan petani dan kegiatan penyuluhan
3. Keterbatasan modal usaha dan akses pasar bagi petani
4. Tingginya fluktuasi harga komoditas pertanian
5. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian
6. Belum tercukupinya kebutuhan prasarana sarana penunjang pertanian
7. Belum optimalnya koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi program dinas
8. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan petani





BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi SKPD

Sebagai bagian dari pemerintah Kabupaten Jombang visi Dinas Pertanian tidak terlepas dari visi Kepala Daerah Kabupaten Jombang 2014 – 2018 yaitu ***“Jombang Sejahtera Untuk Semua”***. Dalam mendukung terwujudnya visi maka perlu didukung adanya misi untuk mencapai visi tersebut. Misi Dinas Pertanian juga tidak terlepas dari misi Kepala Daerah yaitu ***“Meningkatkan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing dan Merata”***





BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,
INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN,
DAN PENDANAAN INDIKATIF





BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Dinas Pertanian menjabarkan indikator yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pertanian dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Dinas Pertanian yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dipaparkan melalui tabel berikut ini.





BAB VII

PENUTUP

Tersusunnya Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian Kabupaten Jombang Tahun 2014 – 2018 akan menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan maupun lima tahunan yang berorientasi produksi dan produktivitas pertanian, terutama dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani, serta pengembangan kawasan agropolitan cluster tanaman pangan dan hortikultura.

Dengan adanya Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Jombang Tahun 2014 – 2018 diharapkan dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan dalam tahun tersebut akan lebih sinergis khususnya dengan program/kegiatan pusat, provinsi dan kabupaten/kota serta para stakeholder.





RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN KABUPATEN JOMBANG



4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai 5 tahun kedepan oleh Dinas Pertanian:

Tabel 4.1

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DINAS PERTANIAN

| NO | TUJUAN | | | SASARAN | | | Kondisi Awal | TARGET TAHUNAN | | | | | Target Akhir Renstra | | |
|--------|--|---|----------------------|-----------|---|--|--|----------------|---------|---------|---------|---------|----------------------|---------|---------|
| | Uraian | Indikator | Target Akhir Renstra | Uraian | Indikator | Satuan | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | |
| 1 | Meningkatnya kontribusi sektor pertanian | Prosentase sub sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian terhadap PDRB | 21,43 | 1 | Meningkatnya nilai tambah komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan | Prosentase kontribusi sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan terhadap PDRB | % | 12,14 | 12,13 | 12,00 | 11,41 | 11,51 | 11,52 | 11,52 | |
| | | | | 2 | Meningkatnya produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan | 1 | Produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan : | | | | | | | | |
| | | | | | | | | - Padi | 432.173 | 431.175 | 450.655 | 475.079 | 476.000 | 477.000 | 477.000 |
| | | | | | | | | - Jagung | 197.353 | 233.448 | 211.164 | 241.325 | 241.500 | 242.000 | 242.000 |
| | | | | | | | | - Kedelai | 8.248 | 10.822 | 9.747 | 6.429 | 6.500 | 6.550 | 6.550 |
| | | | | | | | | - Cabe | 5.278 | 5.541 | 6.000 | 5.707 | 6.000 | 6.100 | 6.100 |
| - Tebu | 978.023,8 | 962.461,5 | 968.095,04 | 818.882,2 | 977.000 | 990.000 | 990.000 | | | | | | | | |
| 2 | Produksi komoditas unggulan di kawasan agropolitan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | - Padi | 103.568 | 92.750 | 104.551 | 107.736 | 112.367 | 114.194 | 114.194 | | | | |
| | | | | - Durian | 5.310 | 5.607 | 5.554 | 5.681 | 5.690 | 5.750 | 5.750 | | | | |
| | | | | - Kopi | 474,79 | 713,45 | 716,09 | 581,54 | 562 | 565 | 565 | | | | |
| | | | | - Kakao | 141,3 | 131,4 | 206 | 222,94 | 157 | 163 | 163 | | | | |
| 3 | Meningkatnya Pelayanan Aparatur | Prosentase pelayanan administrasi perkantoran | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | |



RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN KABUPATEN JOMBANG



Tabel 4.2

SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DINAS PERTANIAN

| Sasaran | | | Arah Kebijakan | Strategi | Program |
|---|--|--|---|--|--|
| Uraian | Indikator | Formula | | | |
| Meningkatnya nilai tambah komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan | Prosentase kontribusi sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan terhadap PDRB | $\frac{\text{PDRB Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan kondisi baik}}{\text{PDRB Total}} \times 100\%$ | Meningkatkan produksi dan produktivitas sub sektor pertanian perkebunan peternakan dan perikanan berbasis teknologi keunggulan sumberdaya lokal dan berkelanjutan | Optimalisasi penerapan teknologi peningkatan produksi melalui pemanfaatan teknik budidaya dengan produktivitas tinggi yang berkelanjutan | Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku |
| | | | Meningkatkan nilai tambah produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan | Fasilitasi dan pembinaan penanganan hasil pertanian guna meningkatkan kualitas produksinya | Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku |
| | | | | Pembinaan pelatihan dan fasilitasi akses permodalan sarana prasarana usaha (budidaya dan pasca panen) | Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Perkebunan |
| | | | | Fasilitasi akses jaringan pemasaran produk baik di dalam maupun luar daerah | Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Pertanian Program Pengembangan Produk Hasil Agribisnis Menjadi Bahan Jadi Atau Setengah Jadi |

| Sasaran | | | Arah Kebijakan | Strategi | Program |
|---|--|---|--|--|--|
| Uraian | Indikator | Formula | | | |
| | | | | | Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Program Peningkatan Mutu dan Legalisasi Produk Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan |
| Meningkatnya produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan | 1 Produksi komoditas tanaman pangan, - Padi - Jagung - Kedelai - Cabe - Tebu | Luas panen (ha) x produktivitas (kw/ha) | Meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan berbasis teknologi keunggulan sumberdaya lokal dan berkelanjutan | Optimalisasi penerapan teknologi peningkatan produksi melalui pemanfaatan teknik budidaya dengan produktivitas tinggi yang berkelanjutan | Program Peningkatan Produksi Pertanian |
| | | | | | Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian |
| | | | | Peningkatan kerjasama dengan balai penelitian dalam rangka transfer teknologi untuk peningkatan produktivitas | Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan |
| | | | | Peningkatan fungsi dan peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) | Program Peningkatan Produksi Perkebunan |
| | | | | | Program Pengelolaan Lahan Tanaman Pertanian |
| | | | | | Program Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Sumur Dangkal |

| Sasaran | | | Arah Kebijakan | Strategi | Program |
|---------|---|---|---|---|--|
| Uraian | Indikator | Formula | | | |
| | | | | | Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan Program Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif Program Peningkatan daya Dukung Lahan, Air dan Lingkungan Pertanian Program Peningkatan Sarana Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Program Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Program Penyusunan Data, Informasi, Monitoring dan Evaluasi Pertanian |
| | 2 Produksi komoditas unggulan di kawasan agropolitan - Padi - Durian - Kopi - Kakao | Luas panen (ha) x produktivitas (kw/ha) | Membangun kawasan agropolitan sebagai wilayah kunjungan wisata dan pemasaran produk pertanian | Pengembangan komoditas unggulan, pembinaan penguatan lembaga tani, perbaikan infrastruktur, fasilitasi dan pembinaan teknologi budidaya pertanian | Program Pengembangan Kawasan Agropolitan Klaster Tanaman Pangan Program Pengembangan Kawasan Agropolitan Klaster Hortikultura |

| Sasaran | | | Arah Kebijakan | Strategi | Program |
|---------------------------------|---|-------------------------------|---|--|---|
| Uraian | Indikator | Formula | | | |
| Meningkatnya Pelayanan Aparatur | Prosentase pelayanan administrasi perkantoran | Jumlah pegawai yang terlayani | Menyelenggarakan pelayanan administrasi perkantoran, meningkatkan sarana dan prasarana aparatur, menegakkan disiplin aparatur, membangun sistem perencanaan, monitoring dan evaluasi yang efektif dan efisien | Fasilitasi kelancaran kerja, pembinaan kedisiplinan dan kesejahteraan kepegawaian, kelancaran penyusunan perencanaan dan monitoring program dan kegiatan | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran |
| | | Jumlah total pegawai | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Perencanaan Strategis dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan SKPD |





RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN KABUPATEN JOMBANG



Tabel 5.1

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2014 - 2018 DINAS PERTANIAN

| Sasaran Strategis | | Program | Sasaran Program | Indikator Program | Formula | Sumber Data | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|-----------------|--|
| an | Indikator | | | | | | |
| atnya nilai omoditas pangan, ra dan ian | Prosentase kontribusi sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan terhadap PDRB | Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku | Meningkatnya produktivitas tembakau | Produktivitas tembakau | $\frac{\text{Produksi tembakau}}{\text{Luas tanam}} \times 100\%$ | Dinas Pertanian | Bidang Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan |
| | | Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Perkebunan | Meningkatnya budidaya komoditas perkebunan | Luas tanam komoditas perkebunan | | Dinas Pertanian | Bidang Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan |
| | | | | - Tebu | Luas tanam komoditas tebu (Ha) | | |
| | | | | - Kopi | Luas tanam komoditas Kopi (Ha) | | |
| | | | | - Cengkeh | Luas tanam komoditas cengkeh (Ha) | | |
| | | | | - Kakao | Luas tanam komoditas kakao (Ha) | | |
| | | Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Pertanian | Meningkatnya budidaya hortikultura dari dana DBHCHT | Prosentase luas lahan hortikultura dari dana DBHCHT terhadap luas lahan hortikultura | $\frac{\text{Luas tanam hortikultura dari dana DBHCHT}}{\text{Luas tanam hortikultura}} \times 100\%$ | Dinas Pertanian | Bidang Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan |
| | | Program Pengembangan Produk Hasil Agribisnis Menjadi Bahan Jadi Atau Setengah Jadi | Meningkatnya pengolahan pasca panen komoditas padi | Prosentase produksi beras petani terhadap total produksi beras Kabupaten | $\frac{\text{Jumlah produksi beras poktan / gapoktan}}{\text{Total produksi beras Kab Jombang}} \times 100\%$ | Dinas Pertanian | Bidang Perlindungan, Pasca Panen dan Pemasaran |
| | | Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | Meningkatnya kesejahteraan petani | NTP Tanaman Pangan | Indeks Diterima komoditas tanaman pangan | Bappeda | Bidang Sarana Prasarana dan Sumberdaya Manusia Pertanian |
| | | | | NTP Hortikultura | Indeks diterima komoditas hortikultura | | |
| | | | | | Indeks Dibayar komoditas hortikultura | | |
| | | | | NTP Perkebunan | Indeks Diterima komoditas perkebunan | | |
| | | | | | Indeks Dibayar komoditas perkebunan | | |

| Sasaran Strategis | | Program | Sasaran Program | Indikator Program | Formula | Sumber Data | Penanggung Jawab |
|-------------------------------------|--|--|---|--|---|-----------------|---|
| an | Indikator | | | | | | |
| | | Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | Meningkatnya pemasaran hasil produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan | Prosentase poktan/gapoktan yang terfasilitasi pemasaran hasil produksi | $\frac{\text{Jumlah poktan / gapoktan terfasilitasi pemasaran}}{\text{Jumlah poktan/gapoktan di Kab Jombang}} \times 100\%$ | Dinas Pertanian | Bidang Perlindungan, Pasca Panen dan Pemasaran |
| | | Program Peningkatan Mutu dan Legalisasi Produk Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | Meningkatnya daya saing produk unggulan komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | Prosentase produk unggulan yang tersertifikasi | $\frac{\text{Jumlah produk unggulan tersertifikasi}}{\text{Jumlah produk unggulan di Kab Jombang}} \times 100\%$ | Dinas Pertanian | Bidang Perlindungan, Pasca Panen dan Pemasaran |
| atnya komoditas pangan, jra dan ian | Produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan : | Program Peningkatan Produksi Pertanian | Tercapainya pengembangan tanaman pangan dan hortikultura | Luas tanam komoditas tanaman pangan dan hortikultura | | Dinas Pertanian | Bidang Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan |
| | | | | Padi (Ha) | Luas lahan Padi setahun (Ha) | | |
| | | | | Jagung (Ha) | Luas lahan Jagung setahun (Ha) | | |
| | | | | Kedelai (Ha) | Luas lahan Kedelai setahun (Ha) | | |
| | | | | Cabe (Ha) | Luas lahan Cabe setahun (Ha) | | |
| | | Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian | Meningkatnya produktivitas tanaman pangan dan hortikultura | Produktivitas komoditas tanaman pangan dan hortikultura | $\frac{\text{Produksi (Ku)}}{\text{Luas tanam (Ha)}}$ | BPS | Bidang Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan |
| | | | | Padi | | | |
| | | | | Jagung | | | |
| | | | | Kedelai | | | |
| | | | | Cabe | | | |
| | | Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan | Meningkatnya kualitas SDM petani | Rasio penyuluh pertanian terhadap jumlah desa | $\frac{\text{Jumlah PPL Pertanian}}{\text{Jumlah Desa}}$ | Dinas Pertanian | Bidang Sarana Prasarana dan Sumberdaya Manusia Pertanian |
| | | Program Peningkatan Produksi Perkebunan | Terwujudnya pengembangan budidaya komoditas perkebunan | Luas tanam komoditas perkebunan | | Dinas Pertanian | Bidang Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan |
| | | | | Tebu | Luas lahan tebu (Ha) | | |
| | | | | Tembakau | Luas lahan tembakau (Ha) | | |

| Sasaran Strategis | | Program | Sasaran Program | Indikator Program | Formula | Sumber Data | Penanggung Jawab |
|-------------------|-----------|--|--|--|--|-----------------|---|
| an | Indikator | | | | | | |
| | | Program Pengelolaan Lahan Tanaman Pertanian | Terwujudnya JUT kondisi baik | Prosentase JUT dalam kondisi baik | $\frac{\text{Jumlah JUT kondisi baik}}{\text{Jumlah JUT keseluruhan}} \times 100\%$ | Dinas Pertanian | Bidang Sarana Prasarana dan Sumberdaya Manusia Pertanian |
| | | Program Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Sumur Dangkal | Terwujudnya jaringan irigasi kondisi baik | Prosentase sarana prasarana air (sumur dangkal) dalam kondisi baik | $\frac{\text{Jumlah sumur dangkal kondisi baik}}{\text{Jumlah sumur dangkal keseluruhan}} \times 100\%$ | Dinas Pertanian | Bidang Sarana Prasarana dan Sumberdaya Manusia Pertanian |
| | | Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan | Meningkatnya produktivitas tanaman perkebunan | - Produktivitas Tebu | $\frac{\text{Produksi tebu (Kg)}}{\text{Luas tanam tebu (Ha)}}$ | Dinas Pertanian | Bidang Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan |
| | | | | - Produktivitas Tembakau | $\frac{\text{Produksi tembakau (Kg)}}{\text{Luas tanam tembakau (Ha)}}$ | Dinas Pertanian | Bidang Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan |
| | | Program Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif | Meningkatnya SDM kelompok P3A | Prosentase kelompok P3A yang meningkat kemampuannya | $\frac{\text{Jumlah kelompok P3A yg meningkat kemampuannya}}{\text{Jumlah kelompok P3A keseluruhan}} \times 100\%$ | Dinas Pertanian | Bidang Sarana Prasarana dan Sumberdaya Manusia Pertanian |
| | | Program Peningkatan daya Dukung Lahan, Air dan Lingkungan Pertanian | Meningkatnya kesuburan lahan pertanian | Prosentase kenaikan kandungan Bahan Organik (BO) lahan pertanian | $\frac{\text{Luas lahan yg meningkat kandungan bahan organik (BO)}}{\text{Luas lahan}} \times 100\%$ | Dinas Pertanian | Bidang Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan |
| | | Program Peningkatan Sarana Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | Terpenuhinya kebutuhan alat mesin pertanian | Prosentase pemenuhan alat mesin pertanian | $\frac{\text{Jumlah alat mesin pertanian yg ada pd poktan/gapoktan}}{\text{Jumlah kebutuhan alat mesin sesuai standar}} \times 100\%$ | Dinas Pertanian | Bidang Sarana Prasarana dan Sumberdaya Manusia Pertanian |
| | | Program Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | Menurunnya serangan hama penyakit pada tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan | Prosentase gangguan OPT | $\frac{\text{Luas serangan hama penyakit pada tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan}}{\text{Luas lahan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan}} \times 100\%$ | Dinas Pertanian | Bidang Perlindungan, Pasca Panen dan Pemasaran |

| Sasaran Strategis | | Program | Sasaran Program | Indikator Program | Formula | Sumber Data | Penanggung Jawab |
|---------------------|--|---|---|---|---|-----------------|---|
| an | Indikator | | | | | | |
| | | Program Penyusunan Data, Informasi, Monitoring dan Evaluasi Pertanian | Meningkatnya kualitas data dan informasi yang valid dan akurat | Prosentase dokumen yang dilakukan updating | $\frac{\text{Jumlah dokumen yg di up date}}{\text{Jumlah dokumen}} \times 100\%$ | Dinas Pertanian | Bidang Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan |
| | Produksi komoditas unggulan di kawasan agropolitan | Program Pengembangan Kawasan Agropolitan Klaster Tanaman Pangan | Meningkatnya produktivitas tanaman pangan di kawasan agropolitan | Produktivitas padi di Kawasan agropolitan | $\frac{\text{Produksi padi (Ku)}}{\text{Luas tanam padi (Ha)}}$ | BPS | Bidang Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan |
| | | | | Produktivitas jagung di Kawasan agropolitan | $\frac{\text{Produksi jagung (Ku)}}{\text{Luas tanam jagung (Ha)}}$ | | |
| | | | | Produktivitas kedelai di Kawasan agropolitan | $\frac{\text{Produksi kedelai (Ku)}}{\text{Luas tanam kedelai (Ha)}}$ | | |
| | | Program Pengembangan Kawasan Agropolitan Klaster Hortikultura | Meningkatnya produktivitas hortikultura | Produktivitas Cabe (ku/Ha) | $\frac{\text{Produksi Cabe (Ku)}}{\text{Luas tanam Cabe (Ha)}}$ | Dinas Pertanian | Bidang Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan |
| | | | | Produktivitas salak (kg/pohon) | $\frac{\text{Produksi salak (Kg)}}{\text{Jumlah pohon salak}}$ | | |
| | | | | Produktivitas durian (Kg/pohon) | $\frac{\text{Produksi durian (Kg)}}{\text{Jumlah pohon durian}}$ | | |
| atkan n Aparatur | Persentase pelayanan administrasi perkantoran | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Meningkatnya Penunjang kelancaran administrasi perkantoran | Persentase Penunjang kelancaran administrasi perkantoran | $\frac{\text{Jumlah pegawai yang terlayani}}{\text{Jumlah pegawai}} \times 100\%$ | Dinas Pertanian | Sekretariat |
| | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan | Persentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan | $\frac{\text{Jumlah sarana prasarana yang tersedia}}{\text{Jumlah pegawai}} \times 100\%$ | Dinas Pertanian | Sekretariat |
| | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Meningkatnya Pegawai yang memperoleh pakaian khusus | Persentase kualitas kinerja aparatur | $\frac{\text{Jumlah pengadaan pakaian olah raga}}{\text{Jumlah pegawai}} \times 100\%$ | Dinas Pertanian | Sekretariat |

Sasaran Strategis

an

Indikator

Program

Sasaran Program

Indikator Program

Formula

Sumber Data

Penanggung Jawab

| | | | | | | | |
|--|--|---|--------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD | Meningkatnya Akuntabilitas Institusi | Nilai evaluasi AKIP | Nilai SAKIP OPD | Dinas Pertanian | Sekretariat |
|--|--|---|--------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|



Tabel 5.2

Rencana Program dan Kegiatan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif

| Kode | Program | Kegiatan | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) | Kondisi Awal | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|---|---|--|-------------------------------|---|---------------|--------------------|---------------|-----------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|---|----------------|
| | | | | | | Tahun 2014 | | Tahun 2015 | | Tahun 2016 | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra SKPD | |
| | | | | | | Target Kinerja | Target Rp. | Target Kinerja | Target Rp. | Target Kinerja | Target Rp. | Target Kinerja | Target Rp. | Target Kinerja | Target Rp. | Target Kuantitatif | Pagu Indikatif |
| 3.03.01.36 | Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku | | Meningkatnya produktivitas tembakau | Produktivitas tembakau | 11.116 Kg/ha/tahun daun basah | 12.919 kg/ha daun basah | 4.648.310.800 | 13.197,61 kg/ha/th | 5.498.994.982 | 13.500 kg/ha/th | 6.571.733.500 | 14.883 kg/ha/th | 4.935.336.000 | 16.628 kg/ha/th | 5.009.007.000 | 16.628 kg/ha/th | 26.663.382.282 |
| 3.03.01.36.04 | | Penanganan Panen dan Pasca Panen Bahan Baku | Meningkatnya mutu hasil panen tembakau | Jumlah poktan/gapoktan penerima bantuan alat pasca panen tembakau | | | | | | | | 32 poktan/gapoktan | 544.007.000 | 37 poktan/gapoktan | 594.007.000 | | |
| 3.03.01.36.06 | | Standarisasi Kualitas Bahan Baku | Meningkatnya kualitas tanaman tembakau | Jumlah poktan/gapoktan penerima bantuan alat mesin budidaya tembakau | | | | | | | | 50 poktan/gapoktan | 4.128.804.000 | 50 poktan/gapoktan | 4.150.000.000 | | |
| 3.03.01.36.09 | | Pembinaan dan fasilitasi pembentukan dan/atau pengesahan badan hukum kelompok petani tembakau | Meningkatnya jumlah petani tembakau | Jumlah peserta pembinaan/pelatihan usaha tani tembakau | | | | | | | | 50 orang | 262.525.000 | 50 orang | 265.000.000 | | |
| 3.03.01.45 | Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Perkebunan | | Meningkatnya budidaya komoditas perkebunan | Luas tanam komoditas perkebunan | | | 2.473.355.000 | | 961.502.750 | | 1.343.829.500 | | 1.034.015.500 | | 1.050.000.000 | | 6.862.702.750 |
| | | | | - Tebu | | 11.756,76 ha | | 11.928,62 Ha | | 9.589 ha | | 11.494 ha | | 11.565 ha | | 11.565 ha | |
| | | | | - Kopi | | 1.193 ha | | 1.193 Ha | | 751 ha | | 882 ha | | 883 ha | | 883 ha | |
| | | | | - Cengkeh | | 1.841 ha | | 1.841,43 Ha | | 1.841 ha | | 1.919 ha | | 1.896 ha | | 1.896 ha | |
| | | | | - Kakao | | 527 ha | - | 318,5 Ha | | 321 ha | | 275 ha | | 270 ha | | 270 ha | |
| 3.03.01.45.05 | | Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja/usaha bidang perkebunan bagi masyarakat | Meningkatnya mekanisasi budidaya tanam perkebunan | Jumlah poktan/gapoktan penerima bantuan sarana budidaya tanaman perkebunan | | | | | | | | 71 poktan/gapoktan | 1.034.015.500 | 70 poktan/gapoktan | 1.050.000.000 | | |
| 3.03.01.87 | Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Pertanian | | Meningkatnya budidaya hortikultura dari dana DBHCHT | Prosentase luas lahan hortikultura dari dana DBHCHT terhadap luas lahan hortikultura | | - | - | 1,38% | 2.017.523.000 | 0,33% | 637.007.800 | 0,17% | 900.000.000 | 0,18% | 900.000.000 | 0,18% | 4.454.530.800 |
| 3.03.01.87.03 | | Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja/usaha bidang tanaman pertanian | Meningkatnya usaha tani hortikultura | Jumlah poktan/gapoktan penerima bantuan sarana produksi hortikultura | | | | | | | | 15 poktan/gapoktan | 900.000.000 | 15 poktan/gapoktan | 900.000.000 | | |

| Kode | Program | Kegiatan | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) | Kondisi Awal | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|---|---|---|--------------|---|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|-------------------|-------------|----------------|-------------|---|----------------|
| | | | | | | Tahun 2014 | | Tahun 2015 | | Tahun 2016 | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra SKPD | |
| | | | | | | Target Kinerja | Target Rp. | Target Kinerja | Target Rp. | Target Kinerja | Target Rp. | Target Kinerja | Target Rp. | Target Kinerja | Target Rp. | Target Kuantitatif | Pagu Indikatif |
| 3.03.01.89 | Program Pengembangan Produk Hasil Agribisnis Menjadi Bahan Jadi Atau Setengah Jadi | | Meningkatnya pengolahan pasca panen komoditas padi | Prosentase produksi beras petani terhadap total produksi beras Kabupaten | | - | - | 50% | 100.000.000 | 60% | 150.000.000 | 70% | 250.000.000 | 72% | 150.000.000 | 72% | 650.000.000 |
| 3.03.01.89.01 | | Pengolahan hasil produksi pertanian | Meningkatnya usaha pengolahan padi | Jumlah poktan/gapoktan penerima bantuan alat pengolah hasil pertanian | | | | | | | | 2 poktan/gapoktan | 250.000.000 | 1 poktan | 150.000.000 | | |
| 3.03.01.95 | Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | | Meningkatnya kesejahteraan petani tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan | NTP Tanaman Pangan | 106,45 | 107,25 | 317.238.000 | 114,86 | 375.000.000 | 111 | 380.000.000 | 112 | 654.400.000 | 112 | 125.000.000 | 112 | 1.851.638.000 |
| | | | | NTP Hortikultura | | | | | | | | 107 | | 107 | | 107 | |
| | | | | NTP Perkebunan | 102,93 | 106,5 | | 107 | | 107,5 | | 108 | | 108,5 | | 108,5 | |
| 3.03.01.95.01 | | Peningkatan kemampuan lembaga petani | Meningkatnya kerja sama usaha tani | Jumlah peserta pelatihan pemahaman sistem kemitraan | | | | | | | | 50 orang | 214.400.000 | 100 orang | 125.000.000 | | |
| 3.03.01.95.02 | | Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani di kawasan agropolitan | Meningkatnya SDM pengurus kelembagaan petani | Jumlah peserta pelatihan manajemen dan teknis bagi pengurus kelembagaan pada wilayah agropolitan tanaman pangan | | | | | | | | 135 orang | 50.000.000 | - | - | | |
| 3.03.01.95.03 | | Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian | Meningkatnya pengetahuan budidaya pertanian | Jumlah peserta pelatihan penerapan teknologi pertanian | | | | | | | | 100 orang | 75.000.000 | - | - | | |
| 3.03.01.95.04 | | Penyuluhan peningkatan produksi perkebunan | Meningkatnya pengetahuan budidaya perkebunan | Jumlah peserta penyuluhan peningkatan produksi perkebunan | | | | | | | | 600 orang | 115.000.000 | - | - | | |
| 3.03.01.95.05 | | Fasilitasi kajian pembangunan pertanian | Terlaksananya survey kepuasan masyarakat bidang pertanian | Jumlah dokumen survey kepuasan masyarakat atas kinerja penyelenggaraan pembangunan pertanian | | | | | | | | 1 dokumen | 200.000.000 | - | - | | |
| 3.03.01.97 | Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | | Meningkatnya pemasaran hasil produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan | Prosentase poktan/gapoktan yang terfasilitasi pemasaran hasil produksi | | - | - | - | - | - | - | 1,50% | 856.600.000 | 1,60% | 450.000.000 | 1,60% | 1.306.600.000 |
| 3.03.01.97.01 | | Pelatihan petani dan pelaku agribisnis | Meningkatnya usaha agribisnis | Jumlah peserta pelatihan agribisnis bagi petani dan pelaku agribisnis | | | | | | | | 75 orang | 100.000.000 | 50 orang | 50.000.000 | | |

| Kode | Program | Kegiatan | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) | Kondisi Awal | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|---|---|--|--------------|---|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|---|----------------|
| | | | | | | Tahun 2014 | | Tahun 2015 | | Tahun 2016 | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra SKPD | |
| | | | | | | Target Kinerja | Target Rp. | Target Kinerja | Target Rp. | Target Kinerja | Target Rp. | Target Kinerja | Target Rp. | Target Kinerja | Target Rp. | Target Kuantitatif | Pagu Indikatif |
| | | | | Jumlah poktan penerima bantuan kegiatan agribisnis | | | | | | | | 3 poktan | | - | | | |
| 3.03.01.97.02 | | Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis | Meningkatnya pengetahuan pelaku agribisnis | Jumlah peserta pembinaan dan pendampingan poktan/gapoktan pelaku agribisnis | | | | | | | | 450 orang | 123.200.000 | 50 orang | 50.000.000 | | |
| 3.03.01.97.03 | | Peningkatan potensi dan promosi hasil produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan | Terfasilitasinya promosi bidang pertanian | Jumlah promosi hasil produksi pertanian | | | | | | | | 2 kali | 249.000.000 | 2 kali | 150.000.000 | | |
| 3.03.01.97.04 | | Fasilitasi kerjasama regional/ nasional/ internasional/ penyedia hasil produksi pertanian | Optimalisasi sistem pemasaran | Jumlah peserta fasilitasi kerjasama antara pelaku utama dan pelaku usaha | | | | | | | | 1.000 orang | 230.000.000 | 100 orang | 100.000.000 | | |
| 3.03.01.97.05 | | Penyuluhan pemasaran produksi pertanian guna menghindari tengkulak dan sistem ijon | Meningkatnya pengetahuan petani tentang sistem pemasaran | Jumlah peserta penyuluhan pengawalan sistem tunda jual | | | | | | | | 350 orang | 90.000.000 | 250 orang | 50.000.000 | | |
| 3.03.01.97.06 | | Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian masyarakat | Tersusunya data informasi pasar | Jumlah dokumen informasi pasar/permintaan dan pasokan produk pertanian | | | | | | | | 1 dokumen | 64.400.000 | 1 dokumen | 50.000.000 | | |
| 3.03.01.100 | Program Peningkatan Mutu dan Legalisasi Produk Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | | Meningkatnya daya saing produk unggulan komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | Prosentase produk unggulan yang tersertifikasi | | | | | | | | 5% | 200.000.000 | 5% | 300.000.000 | 5% | 500.000.000 |
| 3.03.01.100.01 | | Penanganan pasca panen dan standarisasi mutu produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan | Meningkatnya nilai tambah hasil produksi pertanian | Jumlah poktan/ gapoktan penerima sarana prasarana pasca panen produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan | | | | | | | | 3 poktan/ gapoktan | 200.000.000 | 3 poktan/ gapoktan | 300.000.000 | | |
| 3.03.01.68 | Program Peningkatan Produksi Pertanian | | Tercapainya pengembangan tanaman pangan dan hortikultura | Luas tanam komoditas tanaman pangan dan hortikultura | | | 3.943.584.200 | | 4.205.055.000 | | 3.272.535.000 | | 980.265.000 | | 650.000.000 | | 13.051.439.200 |

| Kode | Program | Kegiatan | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) | Kondisi Awal | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra SKPD | |
|---------------|---|--|--|--|--------------|---|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---|----------------|
| | | | | | | Tahun 2014 | | Tahun 2015 | | Tahun 2016 | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | | |
| | | | | | | Target Kinerja | Target Rp. | Target Kinerja | Target Rp. | Target Kinerja | Target Rp. | Target Kinerja | Target Rp. | Target Kinerja | Target Rp. | Target Kuantitatif | Pagu Indikatif |
| | | | | Padi (Ha) | | 69.098 Ha | | 77.408 ha | | 81.484 ha | | 74.398 ha | | 74.662 ha | | 74.662 ha | |
| | | | | Jagung (Ha) | | 30.540 Ha | | 30.330 ha | | 33.864 ha | | 29.294 ha | | 29.382 ha | | 29.382 ha | |
| | | | | Kedelai (Ha) | | 5.999 Ha | | 5.866 ha | | 4.986 ha | | 4.822 ha | | 4.691 ha | | 4.691 ha | |
| | | | | Cabe (Ha) | | 558 ha | | 411 ha | | 739 ha | | 838 ha | | 847 ha | | 847 ha | |
| 3.03.01.68.10 | | Penyediaan Benih/Bibit Hortikultura | Meningkatnya usaha tani hortikultura | Jumlah poktan/gapoktan penerima bantuan bibit hortikultura | | | | | | | | 6 poktan/ gapoktan | 316.065.000 | 5 poktan/ gapoktan | 200.000.000 | | |
| 3.03.01.68.13 | | Pengembangan Komoditas Unggulan Daerah | Meningkatnya produk unggulan daerah | Jumlah poktan/gapoktan penerima bibit buah-buahan | | | | | | | | 3 poktan/ gapoktan | 170.000.000 | 3 poktan/ gapoktan | 150.000.000 | | |
| 3.03.01.68.20 | | Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian | Meningkatnya usaha tani tanaman pangan | Jumlah poktan/ gapoktan penerima bantuan saprodi teknologi pertanian | | | | | | | | 19 poktan/ gapoktan | 494.200.000 | 10 poktan/ gapoktan | 300.000.000 | | |
| 3.03.01.67 | Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian | | Meningkatnya produktivitas tanaman pangan dan hortikultura | Produktivitas komoditas tanaman pangan dan hortikultura | | | 668.965.800 | | 2.570.000.000 | | 1.746.000.000 | | 339.500.000 | | 250.000.000 | | 5.574.465.800 |
| | | | | Padi | | 62,4 ku/Ha | | 60,58 ku/Ha | | 60,19 ku/Ha | | 61,00 kw/ha | | 62,00 kw/ha | | 62,00 kw/ha | |
| | | | | Jagung | | 76,44 Ku/Ha | | 71,80 Ku/Ha | | 76,30 Ku/Ha | | 76,50 kw/ha | | 76,5 kw/ha | | 76,5 kw/ha | |
| | | | | Kedelai | | 18,04 Ku/Ha | | 17,80 Ku/Ha | | 13,33 Ku/Ha | | 13,50 kw/ha | | 13,5 kw/ha | | 13,5 kw/ha | |
| | | | | Cabe | | 29,15 ku/ha | | 46,16 ku/ha | | 43,6 ku/ha | | 45,00 kw/ha | | 47,00 kw/ha | | 47,00 kw/ha | |
| 3.03.01.67.05 | | Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi Pertanian tepat guna | Meningkatnya SDM Petugas laboratorium pertanian | Jumlah petugas laboratorium pertanian yang dilatih | | | | | | | | 6 orang | 76.000.000 | 6 orang | 100.000.000 | | |
| 3.03.01.67.06 | | Pelatihan penerapan teknologi Pertanian modern bercocok tanam | Meningkatnya pengetahuan petani tentang penerapan teknologi budidaya pertanian | Jumlah poktan/ gapoktan penerima bantuan saprodi untuk penerapan teknologi pertanian | | | | | | | | 5 poktan/ gapoktan | 188.500.000 | 3 poktan/ gapoktan | 100.000.000 | | |
| 3.03.01.67.10 | | Pengadaan Sarana Operasional Laboratorium Pertanian | Meningkatnya fungsi dan kinerja laboratorium pertanian | Jumlah pengadaan bahan dan peralatan laboratorium | | | | | | | | 2 paket | 75.000.000 | 2 paket | 50.000.000 | | |
| 3.03.01.30 | Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan | | Meningkatnya kualitas SDM petani | Rasio penyuluh pertanian terhadap jumlah desa | 0,52 | 0,45 | 2.017.079.300 | 0,47 | 375.000.000 | 0,48 | 769.753.000 | 0,49 | 1.734.175.775 | 0,5 | 1.862.515.354 | 0,5 | 6.758.523.429 |
| 3.03.01.30.01 | | Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian | Meningkatnya kompetensi tenaga penyuluh pertanian | Jumlah PPL yang mengikuti pelatihan teknis | | | | | | | | 149 orang | 636.375.775 | 149 orang | 487.515.354 | | |

| Kode | Program | Kegiatan | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) | Kondisi Awal | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|---|--|--|--------------|---|---------------|----------------|-------------|----------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|---------------|---|----------------|
| | | | | | | Tahun 2014 | | Tahun 2015 | | Tahun 2016 | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra SKPD | |
| | | | | | | Target Kinerja | Target Rp. | Target Kinerja | Target Rp. | Target Kinerja | Target Rp. | Target Kinerja | Target Rp. | Target Kinerja | Target Rp. | Target Kuantitatif | Pagu Indikatif |
| 3.03.01.30.03 | | Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian | Tersusunnya program penyuluhan yang terintegrasi | Jumlah PPL yang melaksanakan penyusunan programa dan rencana kerja | | | | | | | | 149 orang | 75.000.000 | 149 orang | 65.000.000 | | |
| 3.03.01.30.05 | | Penyediaan/pengad aan sarana prasarana penyuluhan pertanian | Meningkatnya fungsi dan kinerja BPP | Jumlah BPP yang menerima bantuan sarana prasarana penyuluhan pertanian | | | | | | | | 21 BPP | 292.800.000 | 21 BPP | 250.000.000 | | |
| 3.03.01.30.06 | | Peningkatan Kapasitas Balai Penyuluh Pertanian | Meningkatnya kualitas BPP | Jumlah BPP yang melakukan peragaan teknologi dan budidaya pertanian | | | | | | | | 4 BPP | 400.000.000 | 5 BPP | 750.000.000 | | |
| 3.03.01.30.07 | | Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna | Meningkatnya ketrampilan PPL | Jumlah BPP yang melaksanakan demplot penerapan teknologi pertanian tepat guna dalam bentuk laboratorium lapangan | | | | | | | | 8 BPP | 150.000.000 | 8 BPP | 150.000.000 | | |
| | | | | Jumlah gapoktan/ poktan peserta pendampingan penelitian dan kajian pertanian | | | | | | | | 1 gapoktan/ poktan | | 1 gapoktan | | | |
| 3.03.01.30.08 | | Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi Pertanian tepat guna | Meningkatnya pengetahuan petani | Jumlah peserta penyuluhan penerapan teknologi pertanian tepat guna | | | | | | | | 160 orang | 100.000.000 | 100 orang | 85.000.000 | | |
| 3.03.01.30.09 | | Peningkatan kemampuan lembaga petani dikawasan agropolitan cluster hortikultura | Meningkatnya SDM pengurus kelembagaan petani | Jumlah peserta pelatihan manajemen, teknis, IT dsb bagi pengurus kelembagaan pada wilayah agropolitan | | | | | | | | 30 orang | 80.000.000 | 25 orang | 75.000.000 | | |
| 3.03.01.34 | Program Peningkatan Produksi Perkebunan | | Terwujudnya pengembangan budidaya komoditas perkebunan | Luas tanam komoditas perkebunan | | | 528.960.000 | | 449.883.900 | | 100.000.000 | | 199.242.700 | | 200.000.000 | | 1.478.086.600 |
| | | | | Tebu | | 11.756,76 Ha | | 11.601 ha | | 9.589 ha | | 11.414 ha | | 11.565 ha | | 11.565 ha | |
| | | | | Tembakau | | 4.427 Ha | | 4.547 ha | | 2.429 ha | | 3.789 ha | | 3.647 ha | | 3.647 ha | |
| 3.03.01.34.02 | | Pengembangan bibit unggul perkebunan | Meningkatnya usaha tani perkebunan | Jumlah bibit lada yang dihasilkan di BPP Perak | | | | | | | | 2.500 batang | 149.242.700 | 2.000 batang | 150.000.000 | | |
| 3.03.01.34.05 | | Pengembangan Diversifikasi Tanaman | Meningkatnya budidaya perkebunan di masyarakat | Jumlah bibit lada yang dibantukan kepada masyarakat | | | | | | | | 6.290 batang | 50.000.000 | 6.250 batang | 50.000.000 | | |
| 3.03.052 | Program Pengembangan Kawasan Agropolitan cluster tanaman pangan | | Terwujudnya infrastruktur pertanian yang berkualitas | Prosentase infrastruktur pertanian yang ditingkatkan kualitasnya di kawasan agropolitan | | 16,47% | 2.548.946.300 | | | | | | | 5% | 1.436.500.000 | 21,57% | 3.985.446.300 |

| Kode | Program | Kegiatan | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) | Kondisi Awal | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|--|--|---|--------------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------------|---------------|-----------------|-------------|---|----------------|
| | | | | | | Tahun 2014 | | Tahun 2015 | | Tahun 2016 | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra SKPD | |
| | | | | | | Target Kinerja | Target Rp. | Target Kinerja | Target Rp. | Target Kinerja | Target Rp. | Target Kinerja | Target Rp. | Target Kinerja | Target Rp. | Target Kuantitatif | Pagu Indikatif |
| 3.03.060 | Program Pembangunan Infrastruktur Pengelolaan air Tanaman Pertanian | | Terwujudnya jaringan irigasi kondisi baik | Prosentase jaringan irigasi yang terbangun | | - | - | 11,31% | 13.349.975.500 | 11,07% | 5.824.840.000 | 0 | - | 10% | 250.000.000 | 32,38% | 19.424.815.500 |
| 3.03.070 | Program Rehabilitasi Infrastruktur Pengelolaan Air Tanaman Pertanian | | Terwujudnya jaringan irigasi kondisi baik | Prosentase jaringan irigasi yang ditingkatkan kualitasnya | | - | - | 5% | 5.221.905.000 | 10% | 120.000.000 | 0 | - | 10% | 100.000.000 | 25,00% | 5.441.905.000 |
| 3.03.01.59 | Program Pengelolaan Lahan Tanaman Pertanian | | Terwujudnya JUT kondisi baik | Prosentase JUT dalam kondisi baik | | 0 | 0 | 9,52% | 8.484.202.775 | 2,26% | 3.129.000.000 | 0 | 75.000.000 | 4,81% | 75.000.000 | 7,07% | 11.763.202.775 |
| 3.03.01.59.505 | | Fasilitasi Pengelolaan Lahan dan Air Tanaman Pangan | Terlaksananya monev kegiatan pengelolaan lahan dan air | Jumlah poktan/Gapoktan pelaksana kegiatan pengelolaan lahan dan air | | | | | | | | 53 poktan/gapoktan | 75.000.000 | 93 poktan/HIPPA | 75.000.000 | | |
| 3.03.01.62 | Program Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Sumur Dangkal | | Terwujudnya jaringan irigasi kondisi baik | Prosentase sarana prasarana air (sumur dangkal) dalam kondisi baik | | 10,40% | 3.426.862.000 | 8,26% | 9.514.500.000 | 2,81% | 2.640.000.000 | 4,38% | 5.945.790.000 | 1,65% | | 1,65% | 5.945.790.000 |
| 3.03.01.62.05 | | Pembangunan/Rehabilitasi Sumur Dangkal Desa Brodot, Kec. Bandar Kedung Mulyo | Terlaksananya pembangunan sumur dangkal | Jumlah pembangunan sumur dangkal tanaman perkebunan (PID) | | | | | | | | 1 paket | 40.000.000 | - | - | | |
| 3.03.01.62.15 | | Pembangunan/Rehabilitasi Sumur Dangkal Desa Brambang, Kec. Diwek | Terlaksananya pembangunan sumur dangkal | Jumlah pembangunan sumur dangkal perkebunan (DAK) | | | | | | | | 1 paket | 120.000.000 | - | - | | |
| 3.03.01.62.23 | | Pembangunan/Rehabilitasi Sumur Dangkal Desa Kayangan, Kec. Diwek | Terlaksananya pembangunan sumur dangkal | Jumlah pembangunan sumur dangkal perkebunan (DAK) | | | | | | | | 1 paket | 120.000.000 | - | - | | |
| 3.03.01.62.28 | | Pembangunan/Rehabilitasi Sumur Dangkal Desa Pandanwangi, Kec. Diwek | Terlaksananya pembangunan sumur dangkal | Jumlah pembangunan sumur dangkal perkebunan (DAK) | | | | | | | | 1 paket | 120.000.000 | - | - | | |
| 3.03.01.62.34 | | Pembangunan/Rehabilitasi Sumur Dangkal Desa Gempol Legundi, Kec. Gudo | Terlaksananya pembangunan sumur dangkal | Jumlah pembangunan sumur dangkal tanaman pangan (PID) | | | | | | | | 1 paket | 80.000.000 | - | - | | |

| Kode | Program | Kegiatan | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) | Kondisi Awal | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra SKPD | |
|----------------|---------|---|---|---|--------------|---|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|-------------|----------------|------------|---|----------------|
| | | | | | | Tahun 2014 | | Tahun 2015 | | Tahun 2016 | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | | |
| | | | | | | Target Kinerja | Target Rp. | Target Kinerja | Target Rp. | Target Kinerja | Target Rp. | Target Kinerja | Target Rp. | Target Kinerja | Target Rp. | Target Kuantitatif | Pagu Indikatif |
| 3.03.01.62.39 | | Pembangunan/Rehabilitasi Sumur Dangkal Desa Krembangan , Kec. Gudo | Terlaksananya pembangunan sumur dangkal | Jumlah pembangunan sumur dangkal tanaman pangan (PID) | | | | | | | | 1 paket | 80.000.000 | - | - | | |
| 3.03.01.62.45 | | Pembangunan/Rehabilitasi Sumur Dangkal Desa Sepanyul, Kec. Gudo | Terlaksananya pembangunan sumur dangkal | Jumlah pembangunan sumur dangkal perkebunan (DAK) | | | | | | | | 2 paket | 240.000.000 | - | - | | |
| 3.03.01.62.46 | | Pembangunan/Rehabilitasi Sumur Dangkal Desa Sukoiber, Kec. Gudo | Terlaksananya pembangunan sumur dangkal | Jumlah pembangunan sumur dangkal tanaman pangan (PID) | | | | | | | | 1 paket | 80.000.000 | - | - | | |
| 3.03.01.62.99 | | Pembangunan/Rehabilitasi Sumur Dangkal Desa Gumulan, Kec. Kesamben | Terlaksananya pembangunan sumur dangkal | Jumlah pembangunan sumur dangkal tanaman pangan (DAK) | | | | | | | | 1 paket | 120.000.000 | - | - | | |
| 3.03.01.62.100 | | Pembangunan/Rehabilitasi Sumur Dangkal Desa Jatiduwur, Kec. Kesamben | Terlaksananya pembangunan sumur dangkal | Jumlah pembangunan sumur dangkal tanaman pangan (DAK) | | | | | | | | 1 paket | 120.000.000 | - | - | | |
| 3.03.01.62.101 | | Pembangunan/Rehabilitasi Sumur Dangkal Desa Jombatan, Kec. Kesamben | Terlaksananya pembangunan sumur dangkal | Jumlah pembangunan sumur dangkal tanaman pangan (DAK) | | | | | | | | 1 paket | 120.000.000 | - | - | | |
| 3.03.01.62.103 | | Pembangunan/Rehabilitasi Sumur Dangkal DesaKedung Betik, Kec. Kesamben | Terlaksananya pembangunan sumur dangkal | Jumlah pembangunan sumur dangkal tanaman pangan (DAK) | | | | | | | | 1 paket | 120.000.000 | - | - | | |
| 3.03.01.62.104 | | Pembangunan/Rehabilitasi Sumur Dangkal Desa Kedung Mlati, Kec. Kesamben | Terlaksananya pembangunan sumur dangkal | Jumlah pembangunan sumur dangkal tanaman pangan (DAK) | | | | | | | | 1 paket | 120.000.000 | - | - | | |
| 3.03.01.62.106 | | Pembangunan/Rehabilitasi Sumur Dangkal Desa Podoroto, Kec. Kesamben | Terlaksananya pembangunan sumur dangkal | Jumlah pembangunan sumur dangkal tanaman pangan (DAK) | | | | | | | | 1 paket | 120.000.000 | - | - | | |
| 3.03.01.62.107 | | Pembangunan/Rehabilitasi Sumur Dangkal Desa Pojok Kulon Kec. Kesamben | Terlaksananya pembangunan sumur dangkal | Jumlah pembangunan sumur dangkal tanaman pangan (DAK) | | | | | | | | 1 paket | 120.000.000 | - | - | | |

| Kode | Program | Kegiatan | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) | Kondisi Awal | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra SKPD | |
|----------------|---------|---|---|---|--------------|---|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|-------------|----------------|------------|----------------|------------|---|----------------|
| | | | | | | Tahun 2014 | | Tahun 2015 | | Tahun 2016 | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | | | | |
| | | | | | | Target Kinerja | Target Rp. | Target Kinerja | Target Rp. | Target Kinerja | Target Rp. | Target Kinerja | Target Rp. | Target Kinerja | Target Rp. | Target Kinerja | Target Rp. | Target Kuantitatif | Pagu Indikatif |
| 3.03.01.62.109 | | Pembangunan/Rehabilitasi Sumur Dangkal Desa Watudakon, Kec. Kesamben | Terlaksananya pembangunan sumur dangkal | Jumlah pembangunan sumur dangkal tanaman pangan (DAK) | | | | | | | | 1 paket | 120.000.000 | - | - | | | | |
| 3.03.01.62.113 | | Pembangunan/Rehabilitasi Sumur Dangkal Desa Katemas, Kec. Kudu | Terlaksananya pembangunan sumur dangkal | Jumlah pembangunan sumur dangkal tanaman pangan (PID) | | | | | | | | 1 paket | 80.000.000 | - | - | | | | |
| 3.03.01.62.126 | | Pembangunan/Rehabilitasi Sumur Dangkal Desa Kedungrejo , Kec. Megaluh | Terlaksananya pembangunan sumur dangkal | Jumlah pembangunan sumur dangkal tanaman pangan (DAK) | | | | | | | | 1 paket | 120.000.000 | - | - | | | | |
| 3.03.01.62.134 | | Pembangunan/Rehabilitasi Sumur Dangkal Desa Turipinggir, Kec. Megaluh | Terlaksananya pembangunan sumur dangkal | Jumlah pembangunan sumur dangkal tanaman pangan (DAK) | | | | | | | | 1 paket | 120.000.000 | - | - | | | | |
| 3.03.01.62.137 | | Pembangunan/Rehabilitasi Sumur Dangkal Desa Dukuhtimoro, Kec. Mojoagung | Terlaksananya pembangunan sumur dangkal | Jumlah pembangunan sumur dangkal tanaman pangan (PID) | | | | | | | | 2 paket | 280.000.000 | - | - | | | | |
| | | | Terlaksananya pembangunan sumur dangkal | Jumlah pembangunan sumur dangkal tanaman pangan (DAK) | | | | | | | 1 paket | - | | - | | | | | |
| 3.03.01.62.139 | | Pembangunan/Rehabilitasi Sumur Dangkal Desa Janti, Kec. Mojoagung | Terlaksananya pembangunan sumur dangkal | Jumlah pembangunan sumur dangkal tanaman pangan (DAK) | | | | | | | | 1 paket | 120.000.000 | - | - | | | | |
| 3.03.01.62.147 | | Pembangunan/Rehabilitasi Sumur Dangkal Desa Miagan, Kec. Mojoagung | Terlaksananya pembangunan sumur dangkal | Jumlah pembangunan sumur dangkal tanaman pangan (DAK) | | | | | | | | 1 paket | 120.000.000 | - | - | | | | |
| 3.03.01.62.156 | | Pembangunan/Rehabilitasi Sumur Dangkal Desa Kedung Bogo, Kec. Ngusikan | Terlaksananya pembangunan sumur dangkal | Jumlah pembangunan sumur dangkal tanaman pangan (PID) | | | | | | | | 1 paket | 80.000.000 | - | - | | | | |
| 3.03.01.62.164 | | Pembangunan/Rehabilitasi Sumur Dangkal Desa Cangkringrandu, Kec. Perak | Terlaksananya pembangunan | Jumlah pembangunan sumur dangkal perkebunan (DAK) | | | | | | | | 1 paket | 200.000.000 | - | - | | | | |
| | | | Terlaksananya pembangunan sumur dangkal | Jumlah pembangunan sumur dangkal tanaman pangan (PID) | | | | | | | 1 paket | - | | - | | | | | |
| 3.03.01.62.167 | | Pembangunan/Rehabilitasi Sumur Dangkal Desa Jantiganggong, Kec. Perak | Terlaksananya pembangunan sumur dangkal | Jumlah pembangunan sumur dangkal tanaman pangan (PID) | | | | | | | | 1 paket | 80.000.000 | - | - | | | | |

| Kode | Program | Kegiatan | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) | Kondisi Awal | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------|--|---|---|--------------|---|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|-------------|----------------|-------------|---|----------------|
| | | | | | | Tahun 2014 | | Tahun 2015 | | Tahun 2016 | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra SKPD | |
| | | | | | | Target Kinerja | Target Rp. | Target Kinerja | Target Rp. | Target Kinerja | Target Rp. | Target Kinerja | Target Rp. | Target Kinerja | Target Rp. | Target Kuantitatif | Pagu Indikatif |
| 3.03.01.62.182 | | Pembangunan/Rehabilitasi Sumur Dangkal Desa Mancar, Kec. Peterongan | Terlaksananya pembangunan sumur dangkal | Jumlah pembangunan sumur dangkal tanaman pangan (DAK) | | | | | | | | 1 paket | 120.000.000 | - | - | | |
| 3.03.01.62.184 | | Pembangunan/Rehabilitasi Sumur Dangkal Desa Ngrandu Lor, Kec. Peterongan | Terlaksananya pembangunan sumur dangkal | Jumlah pembangunan sumur dangkal tanaman pangan (DAK) | | | | | | | | 1 paket | 120.000.000 | - | - | | |
| 3.03.01.62.187 | | Pembangunan/Rehabilitasi Sumur Dangkal Desa Sumberagung, Kec. Peterongan | Terlaksananya pembangunan sumur dangkal | Jumlah pembangunan sumur dangkal tanaman pangan (PID) | | | | | | | | 1 paket | 80.000.000 | 1 paket | 120.000.000 | | |
| 3.03.01.62.189 | | Pembangunan/Rehabilitasi Sumur Dangkal Desa Tengeran, Kec. Peterongan | Terlaksananya pembangunan sumur dangkal | Jumlah pembangunan sumur dangkal tanaman pangan (DAK) | | | | | | | | 1 paket | 120.000.000 | - | - | | |
| 3.03.01.62.217 | | Pembangunan/Rehabilitasi Sumur Dangkal Desa Badas, Kec. Sumobito | Terlaksananya pembangunan sumur dangkal | Jumlah pembangunan sumur dangkal tanaman pangan (DAK) | | | | | | | | 1 paket | 120.000.000 | - | - | | |
| 3.03.01.62.225 | | Pembangunan/Rehabilitasi Sumur Dangkal Desa Kendalsari, Kec. Sumobito | Terlaksananya pembangunan sumur dangkal | Jumlah pembangunan sumur dangkal tanaman pangan (DAK) | | | | | | | | 1 paket | 105.790.000 | - | - | | |
| 3.03.01.62.226 | | Pembangunan/Rehabilitasi Sumur Dangkal Desa Madyo Puro, Kec. Sumobito | Terlaksananya pembangunan sumur dangkal | Jumlah pembangunan sumur dangkal tanaman pangan (DAK) | | | | | | | | 1 paket | 120.000.000 | - | - | | |
| 3.03.01.62.227 | | Pembangunan/Rehabilitasi Sumur Dangkal Desa Mentoro, Kec. Sumobito | Terlaksananya pembangunan sumur dangkal | Jumlah pembangunan sumur dangkal perkebunan (DAK) | | | | | | | | 1 paket | 120.000.000 | - | - | | |
| 3.03.01.62.231 | | Pembangunan/Rehabilitasi Sumur Dangkal Desa Plemahan, Kec. Sumobito | Terlaksananya pembangunan sumur dangkal | Jumlah pembangunan sumur dangkal tanaman pangan (DAK) | | | | | | | | 1 paket | 120.000.000 | - | - | | |
| 3.03.01.62.233 | | Pembangunan/Rehabilitasi Sumur Dangkal Desa Sebani, Kec. Sumobito | Terlaksananya pembangunan sumur dangkal | Jumlah pembangunan sumur dangkal tanaman pangan (DAK) | | | | | | | | 1 paket | 120.000.000 | - | - | | |

| Kode | Program | Kegiatan | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) | Kondisi Awal | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------|---|---|---|--------------|---|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|-------------|----------------|------------|---|----------------|
| | | | | | | Tahun 2014 | | Tahun 2015 | | Tahun 2016 | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra SKPD | |
| | | | | | | Target Kinerja | Target Rp. | Target Kinerja | Target Rp. | Target Kinerja | Target Rp. | Target Kinerja | Target Rp. | Target Kinerja | Target Rp. | Target Kuantitatif | Pagu Indikatif |
| 3.03.01.62.234 | | Pembangunan/Rehabilitasi Sumur Dangkal Desa Segodorejo, Kec. Sumobito | Terlaksananya pembangunan sumur dangkal | Jumlah pembangunan sumur dangkal tanaman pangan (DAK) | | | | | | | | 1 paket | 120.000.000 | - | - | | |
| 3.03.01.62.235 | | Pembangunan/Rehabilitasi Sumur Dangkal Desa Sumobito, Kec. Sumobito | Terlaksananya pembangunan sumur dangkal | Jumlah pembangunan sumur dangkal tanaman pangan (DAK) | | | | | | | | 1 paket | 120.000.000 | - | - | | |
| 3.03.01.62.236 | | Pembangunan/Rehabilitasi Sumur Dangkal Desa Talun Kidul, Kec. Sumobito | Terlaksananya pembangunan sumur dangkal | Jumlah pembangunan sumur dangkal tanaman pangan (DAK) | | | | | | | | 1 paket | 120.000.000 | - | - | | |
| 3.03.01.62.238 | | Pembangunan/Rehabilitasi Sumur Dangkal Desa Bedah Lawak, Kec. Tembelang | Terlaksananya pembangunan sumur dangkal | Jumlah pembangunan sumur dangkal tanaman pangan (DAK) | | | | | | | | 1 paket | 120.000.000 | - | - | | |
| 3.03.01.62.239 | | Pembangunan/Rehabilitasi Sumur Dangkal Desa Gabusbanaran, Kec. Tembelang | Terlaksananya pembangunan sumur dangkal | Jumlah pembangunan sumur dangkal tanaman pangan (DAK) | | | | | | | | 1 paket | 120.000.000 | - | - | | |
| 3.03.01.62.240 | | Pembangunan/Rehabilitasi Sumur Dangkal Desa Jati Wates, Kec. Tembelang | Terlaksananya pembangunan sumur dangkal | Jumlah pembangunan sumur dangkal tanaman pangan (DAK) | | | | | | | | 1 paket | 120.000.000 | - | - | | |
| 3.03.01.62.241 | | Pembangunan/Rehabilitasi Sumur Dangkal Desa Kalikejambon, Kec. Tembelang | Terlaksananya pembangunan sumur dangkal | Jumlah pembangunan sumur dangkal tanaman pangan (DAK) | | | | | | | | 1 paket | 120.000.000 | - | - | | |
| 3.03.01.62.242 | | Pembangunan/Rehabilitasi Sumur Dangkal Desa Kedung Losari, Kec. Tembelang | Terlaksananya pembangunan sumur dangkal | Jumlah pembangunan sumur dangkal tanaman pangan (DAK) | | | | | | | | 1 paket | 120.000.000 | - | - | | |
| 3.03.01.62.243 | | Pembangunan/Rehabilitasi Sumur Dangkal Desa Kedung Otok, Kec. Tembelang | Terlaksananya pembangunan sumur dangkal | Jumlah pembangunan sumur dangkal tanaman pangan (DAK) | | | | | | | | 1 paket | 120.000.000 | - | - | | |
| 3.03.01.62.244 | | Pembangunan/Rehabilitasi Sumur Dangkal Desa Kepuhdoko, Kec. Tembelang | Terlaksananya pembangunan sumur dangkal | Jumlah pembangunan sumur dangkal tanaman pangan (DAK) | | | | | | | | 1 paket | 120.000.000 | - | - | | |

| Kode | Program | Kegiatan | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) | Kondisi Awal | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|--|---|--|--------------|---|------------|--------------------|---------------|-----------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|---|----------------|
| | | | | | | Tahun 2014 | | Tahun 2015 | | Tahun 2016 | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra SKPD | |
| | | | | | | Target Kinerja | Target Rp. | Target Kinerja | Target Rp. | Target Kinerja | Target Rp. | Target Kinerja | Target Rp. | Target Kinerja | Target Rp. | Target Kuantitatif | Pagu Indikatif |
| 3.03.01.62.248 | | Pembangunan/Rehabilitasi Sumur Dangkal Desa Pulorejo, Kec. Tembelang | Terlaksananya pembangunan sumur dangkal | Jumlah pembangunan sumur dangkal tanaman pangan (DAK) | | | | | | | | 1 paket | 120.000.000 | - | - | | |
| 3.03.01.62.277 | | Pembangunan/Rehabilitasi Sumur Dangkal Desa Selorejo, Kec.Mojowarno | Terlaksananya pembangunan sumur dangkal | Jumlah pembangunan sumur dangkal perkebunan (DAK) | | | | | | | | 1 paket | 120.000.000 | - | - | | |
| 3.03.01.62.283 | | Pembangunan/Rehabilitasi Sumur Dangkal Desa Gajah, Kec. Ngoro | Terlaksananya pembangunan sumur dangkal | Jumlah pembangunan sumur dangkal perkebunan (DAK) | | | | | | | | 1 paket | 120.000.000 | - | - | | |
| 3.03.01.62.290 | | Pembangunan/Rehabilitasi Sumur Dangkal Desa Pulorejo, Kec. Ngoro | Terlaksananya pembangunan sumur dangkal | Jumlah pembangunan sumur dangkal perkebunan (DAK) | | | | | | | | 1 paket | 120.000.000 | - | - | | |
| 3.03.01.62.303 | | Pembangunan/Rehabilitasi Sumur Dangkal Desa Ngrimbi, Kec. Bareng | Terlaksananya pembangunan sumur dangkal | Jumlah pembangunan sumur dangkal tanaman pangan (PID) | | | | | | | | 1 paket | 80.000.000 | - | - | | |
| 3.03.01.74 | Program Peningkatan Penerapan Teknologi | | Meningkatnya produktivitas tanaman perkebunan | - Produktivitas Tebu | | | | 83.450 kg/ha/th | 1.048.986.600 | 85.400 kg/ha/th | | 85.000 kg/ha/th | 812.000.000 | 85.6000 kg/ha/th | | | 1.860.986.600 |
| | | | | - Produktivitas Tembakau | | | | 13.197,61 kg/ha/th | | 13.500 kg/ha/th | | 14.884 keg/ha/th | | 15.628 kg/ha/th | | | |
| 3.03.01.74.02 | | Pengadaan Sarana Dan Prasarana Teknologi perkebunan Tepat Guna | Tersedianya peralatan teknologi budidaya perkebunan | Jumlah kelompok penerima sarpras perkebunan | | | | | | | | 2 KPTR | 812.000.000 | 2 kelompok | 450.000.000 | | |
| 3.03.01.85 | Program Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif | | Meningkatnya SDM kelompok P3A | Prosentase kelompok P3A yang meningkat kemampuannya | | - | - | 3,20% | 386.250.000 | 3,90% | 201.500.000 | 4,20% | 507.870.000 | 2,60% | 125.000.000 | 10,40% | 1.220.620.000 |
| 3.03.01.85.02 | | Penguatan kelembagaan HIPPA/GHIPPA | Meningkatnya pengetahuan pengurus P3A | Jumlah peserta pembinaan dan pemberdayaan Persatuan Petani Pemakai Air (P3A) | | | | | | | | 450 orang | 100.000.000 | 200 orang | 50.000.000 | | |
| 3.03.01.85.03 | | Peningkatan kapasitas SDM HIPPA/GHIPPA | Optimalnya pengelolaan air irigasi | Jumlah peserta pelatihan pengelolaan irigasi secara partisipatif | | | | | | | | 450 orang | 100.000.000 | 200 orang | 75.000.000 | | |
| 3.03.01.85.04 | | Pendampingan Program WISMP | Optimalnya pelaksanaan program WISMP | Jumlah peserta pembinaan P3A pada lokasi WISMP | | | | | | | | 720 orang | 257.870.000 | - | - | | |
| 3.03.01.85.05 | | Peningkatan Pengelolaan Kelembagaan Irigasi Partisipatif | Meningkatnya pengetahuan petani dalam mengelola air irigasi | Jumlah peserta studi banding GP3A | | | | | | | | 140 orang | 50.000.000 | - | - | | |

| Kode | Program | Kegiatan | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) | Kondisi Awal | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|---|--------------|---|------------|----------------|-------------|----------------|-------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|---|----------------|
| | | | | | | Tahun 2014 | | Tahun 2015 | | Tahun 2016 | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra SKPD | |
| | | | | | | Target Kinerja | Target Rp. | Target Kinerja | Target Rp. | Target Kinerja | Target Rp. | Target Kinerja | Target Rp. | Target Kinerja | Target Rp. | Target Kuantitatif | Pagu Indikatif |
| 3.03.01.86 | Program Peningkatan daya Dukung Lahan, Air dan Lingkungan Pertanian | | Meningkatnya kesuburan lahan pertanian | Prosentase kenaikan kandungan Bahan Organik (BO) lahan pertanian | | - | - | 0,14% | 275.000.000 | 0,71% | 345.250.000 | 0,75% | 170.000.000 | 1% | 100.000.000 | 1% | 890.250.000 |
| 3.03.01.86.01 | | Peningkatan daya dukung lahan pertanian | Meningkatnya unsur hara lahan pertanian | Jumlah poktan penerima saprodi untuk penanaman komoditas tanaman yang berpotensi sebagai pupuk hijau | | | | | | | | 6 poktan | 170.000.000 | 3 poktan | 100.000.000 | | |
| 3.03.01.94 | Program Peningkatan Sarana Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | | Terpenuhinya kebutuhan alat mesin pertanian | Prosentase pemenuhan alat mesin pertanian | | - | - | - | - | - | - | 10% | 5.491.446.000 | 12% | 1.267.000.000 | 12,00% | 6.758.446.000 |
| 3.03.01.94.01 | | Penyediaan Sarana Prasarana Produksi Pertanian | Tersedianya peralatan pertanian | Jumlah poktan/gapoktan penerima bantuan alsintan kegiatan PID | | | | | | | | 174 poktan/gapoktan | 5.070.000.000 | 15 poktan | 892.000.000 | | |
| 3.03.01.94.02 | | Pengadaan Sarana Dan Prasarana Teknologi Pertanian Tepat Guna | Tersedianya peralatan pertanian | Jumlah sarana prasarana penunjang usahatani tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang disalurkan | | | | | | | | 54 unit | 281.000.000 | 5 unit | 275.000.000 | | |
| 3.03.01.94.03 | | Penyediaan Sarana Prasarana Produksi perkebunan | Tersedianya peralatan perkebunan | Jumlah poktan penerima sarana dan prasarana perkebunan (pompa air) | | | | | | | | 2 poktan | 10.000.000 | - | - | | |
| 3.03.01.94.04 | | Penyediaan Sarana Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | Tersedianya pupuk bersubsidi | Jumlah poktan yang terfasilitasi pupuk bersubsidi | | | | | | | | 1.211 poktan | 130.446.000 | 1.211 poktan | 100.000.000 | | |
| 3.03.01.96 | Program Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | | Menurunnya serangan hama penyakit pada tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan | Prosentase gangguan OPT | | | | | | | | 5% | 716.054.000 | 4,50% | 550.000.000 | 4,50% | 1.266.054.000 |
| 3.03.01.96.01 | | Pelatihan dan Bimbingan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) | Meningkatnya pengetahuan petani tentang pengendalian OPT | Jumlah poktan/ gapoktan yang mengikuti SLPHT tanaman pangan | | | | | | | | 5 poktan/gapoktan | 127.500.000 | 6 poktan/gapoktan | 150.000.000 | | |
| 3.03.01.96.02 | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengendalian OPT | Tertanganinya serangan OPT | Jumlah poktan/gapoktan penerima bahan dan peralatan pengendalian OPT | | | | | | | | 13 poktan/gapoktan | 440.000.000 | 8 poktan/gapoktan | 250.000.000 | | |

| Kode | Program | Kegiatan | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) | Kondisi Awal | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra SKPD | |
|---------------|---|--|--|--|--------------|---|------------|----------------|-------------|----------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|---|----------------|
| | | | | | | Tahun 2014 | | Tahun 2015 | | Tahun 2016 | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | | |
| | | | | | | Target Kinerja | Target Rp. | Target Kinerja | Target Rp. | Target Kinerja | Target Rp. | Target Kinerja | Target Rp. | Target Kinerja | Target Rp. | Target Kuantitatif | Pagu Indikatif |
| 3.03.01.96.03 | | Peningkatan kualitas ekosistem lahan pertanian | Meningkatnya musuh alami di lahan pertanian | Jumlah poktan/gapoktan penerima bantuan pembangunan pagupon burung hantu | | | | | | | | 5 poktan/ gapoktan | 102.000.000 | 5 poktan/ gapoktan | 100.000.000 | | |
| 3.03.01.96.04 | | Fasilitasi Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | Terlaksananya perlindungan usaha tani | Jumlah peserta kegiatan fasilitasi asuransi pertanian | | | | | | | | 1.211 poktan | 46.554.000 | 1.211 poktan | 50.000.000 | | |
| 3.03.01.98 | Program Penyusunan Data, Informasi, Monitoring dan Evaluasi Pertanian | | Meningkatnya kualitas data dan informasi yang valid dan akurat | Prosentase dokumen yang dilakukan updating | | | | | | | | 100% | 158.800.000 | 100% | 175.000.000 | 100% | 333.800.000 |
| 3.03.01.98.01 | | Penyusunan data informasi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan | Tersusnya data statistik pertanian | Jumlah dokumen hasil pengumpulan dan pengolahan data tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan | | | | | | | | 1 dokumen | 158.800.000 | 1 dokumen | 100.000.000 | | |
| 3.01.098.00xx | | Pengembangan teknologi informasi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan | Meningkatnya teknologi informasi pertanian | Jumlah petugas teknologi informasi tingkat kecamatan dan kabupaten | | | | | | | | - | - | 23 orang | 75.000.000 | | |
| 3.03.01.37 | Program Pengembangan Kawasan Agropolitan Klaster Tanaman Pangan | | Meningkatnya produktivitas tanaman pangan di kawasan agropolitan | Produktivitas padi di Kawasan agropolitan | | | | 58,8 kw/ha | 210.000.000 | 60,9 kw/ha | 360.000.000 | 61,5 kw/ha | 125.000.000 | 62,5 kw/ha | 50.000.000 | 62,5 kw/ha | 745.000.000 |
| | | | | Produktivitas jagung di Kawasan agropolitan | | | | 75,07 kw/ha | | 76,30 kw/ha | | 72 kw/ha | | 72,5 kw/ha | | 72,5 kw/ha | |
| | | | | Produktivitas kedelai di Kawasan agropolitan | | | | 17,22 kw/ha | | 13,33 kw/ha | | 18,5 kw/ha | | 19 kw/ha | | 19 kw/ha | |
| 3.03.01.37.01 | | Penelitian dan Pengembangan Teknologi Budidaya tanaman pangan | Meningkatnya usaha tani tanaman pangan di kawasan agropoitan | Jumlah poktan/gapoktan penerima bantuan saprodi untuk penerapan teknologi tepat guna tanaman pangan di kawasan agropolitan | | | | | | | 4 poktan/ gapoktan | 125.000.000 | 2 poktan | 50.000.000 | | | |
| 3.03.01.88 | Program Pengembangan Kawasan Agropolitan Klaster Hortikultura | | Meningkatnya produktivitas hortikultura | Produktivitas Cabe (ku/Ha) | | | | 46,16 kw/ha | 255.000.000 | 43,6 kw/ha | 279.487.500 | 41,95 kw/ha | 125.000.000 | 42,37 kw/ha | 75.000.000 | 42,37 kw/ha | 734.487.500 |
| | | | | Produktivitas salak (kg/pohon) | | | | 7,1 kg/pohon | | 6,5 kg/pohon | | 6,7 kg/pohon | | 6,8 kg/pohon | | 6,8 kg/pohon | |
| | | | | Produktivitas durian (Kg/pohon) | | | | 72,75 kg/pohon | | 79,91 kw/ha | | 54,70 kg/pohon | | 55,24 kg/pohon | | 55,24 kg/pohon | |

| Kode | Program | Kegiatan | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) | Kondisi Awal | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|---|---|---|--------------|---|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|---|----------------|
| | | | | | | Tahun 2014 | | Tahun 2015 | | Tahun 2016 | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra SKPD | |
| | | | | | | Target Kinerja | Target Rp. | Target Kinerja | Target Rp. | Target Kinerja | Target Rp. | Target Kinerja | Target Rp. | Target Kinerja | Target Rp. | Target Kuantitatif | Pagu Indikatif |
| 3.03.01.88.01 | | Pengembangan komoditas unggulan di kawasan agropolitan cluster hortikultura | Meningkatnya usaha tani hortikultura di kawasan agropolitan | Jumlah poktan/gapoktan penerima bantuan bibit komoditas unggulan hortikultura | | | | | | | | 2 poktan/gapoktan | 125.000.000 | 2 poktan | 75.000.000 | | |
| 3.03.1.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | Meningkatnya penunjang kelancaran administrasi | Persentase Penunjang kelancaran administrasi perkantoran | 100% | 100% | 1.538.143.518 | 100% | 2.194.994.000 | 100% | 2.724.868.675 | 100% | 1.795.419.000,00 | 100% | 1.795.419.000,00 | 100% | 10.048.844.193 |
| 3.03.1.01.20 | | Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran | Tersedianya tenaga teknis perkantoran | Jumlah tenaga kontrak SK Bupati | | | | | | | | 2 orang | 27.984.000 | 2 orang | 26.400.000 | | |
| 3.03.1.01.24 | | Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Terwujudnya administrasi perkantoran yang baik | Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran | | | | | | | | 258 orang | 1.767.435.000 | 260 orang | 1.800.000.000 | | |
| 3.03.1.02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan | Persentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan | N/A | 75% | 749.611.280 | 80% | 348.732.500 | 80% | 746.664.014 | 85% | 244.775.000,00 | 85% | 244.775.000,00 | 85% | 2.334.557.794 |
| 3.03.1.02.42 | | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor | Meningkatkan kenyamanan bekerja | Jumlah gedung yang diperbaiki/direhabilitasi | | | | | | | | - | - | 2 unit | 350.000.000 | | |
| 3.03.1.02.46 | | Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor | Meningkatkan kenyamanan bekerja | Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor | | | | | | | | 9 unit | 35.000.000 | 12 unit | 75.000.000 | | |
| 3.03.1.02.47 | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/bangunan pendukungnya | Meningkatkan kenyamanan bekerja | Jumlah gedung yang dilakukan pemeliharaan rutin | | | | | | | | 2 unit | 50.000.000 | 2 unit | 50.000.000 | | |
| 3.03.1.02.48 | | Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat sarana dan prasarana gedung kantor | Meningkatkan kenyamanan bekerja | Jumlah sarana prasarana gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin | | | | | | | | 75 unit | 66.650.000 | 75 unit | 50.000.000 | | |
| 3.03.1.02.49 | | Pemeliharaan Rutin/Berkala | Meningkatkan kenyamanan bekerja | Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan rutin | | | | | | | | 5 unit | 93.125.000 | 5 unit | 93.125.000 | | |
| 3.03.1.03 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | Meningkatnya pegawai yang memperoleh pakaian khusus | Persentase kualitas kinerja aparatur | 100% | 100% | 46.483.000 | 100% | 80.000.000 | 100% | 75.000.000 | 100% | 64.500.000,00 | 100% | 64.500.000,00 | 100% | 330.483.000 |
| 3.03.1.03.06 | | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu | Meningkatkan kenyamanan bekerja | Jumlah pegawai yang mendapatkan pakaian olahraga | | | | | | | | 258 orang | 64.500.000 | 258 orang | 64.500.000 | | |

| Kode | Program | Kegiatan | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) | Kondisi Awal | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|--|--|--------------|---|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---|----------------|
| | | | | | | Tahun 2014 | | Tahun 2015 | | Tahun 2016 | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra SKPD | |
| | | | | | | Target Kinerja | Target Rp. | Target Kinerja | Target Rp. | Target Kinerja | Target Rp. | Target Kinerja | Target Rp. | Target Kinerja | Target Rp. | Target Kuantitatif | Pagu Indikatif |
| 3.03.1.07 | Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD | | Meningkatnya Akuntabilitas Institusi | Nilai evaluasi AKIP | C | C | 69.287.700 | CC | 72.000.000 | CC | 70.000.000 | B | 70.000.000,00 | B | 70.000.000,00 | B | 351.287.700 |
| 3.03.1.07.01 | | Penyusunan renstra SKPD | Tersedianya dokumen Renstra SKPD sebagai dokumen perencanaan lima tahunan | Jumlah dokumen Renstra SKPD sebagai dokumen perencanaan lima tahunan | | | | | | | | 1 dokumen | 35.000.000 | 1 dokumen | 35.000.000 | | |
| 3.03.1.07.02 | | Penyusunan rencana kerja SKPD | Tersedianya dokumen Renja SKPD tahunan sebagai rencana program/kegiatan SKPD | Jumlah dokumen Renja SKPD tahunan sebagai rencana program/kegiatan SKPD | | | | | | | | 2 dokumen | 15.000.000 | 2 dokumen | 15.000.000 | | |
| 3.03.1.07.03 | | Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD | Tersedianya laporan capaian kinerja SKPD | Jumlah dokumen pelaporan Capaian Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja sesuai aturan | | | | | | | | 5 dokumen | 10.000.000 | 5 dokumen | 15.000.000 | | |
| 3.03.1.07.04 | | Penyusunan laporan keuangan SKPD | Tersedianya dokumen pelaporan kinerja dan keuangan di susun tepat waktu | Jumlah Dokumen pelaporan kinerja dan keuangan di susun tepat waktu | | | | | | | | 2 dokumen | 10.000.000 | 2 dokumen | 10.000.000 | | |



Tabel 6.1

Indikator Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Jombang yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

| Indikator | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|--|---|-----------------------------|------------|-----------|---------|---------|--|
| | Tahun 0 | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 | |
| Prosentase kontribusi sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan terhadap PDRB | 12,14 | 12,13 | 12,00 | 11,41 | 11,51 | 11,52 | 11,52 |
| Produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan : | | | | | | | |
| - Padi (ton) | 432.173 | 431.175 | 450.655 | 475.079 | 476.000 | 477.000 | 477.000 |
| - Jagung (ton) | 197.353 | 233.448 | 211.164 | 241.325 | 241.500 | 242.000 | 242.000 |
| - Kedelai (ton) | 8.248 | 10.822 | 9.747 | 6.429 | 6.500 | 6.550 | 6.550 |
| - Cabe (ton) | 5.278 | 5.541 | 6.000 | 5.707 | 6.000 | 6.100 | 6.100 |
| - Tebu (ton) | 978.023,8 | 962.461,5 | 968.095,04 | 818.882,2 | 977.000 | 990.000 | 990.000 |
| Produksi komoditas unggulan di kawasan agropolitan | | | | | | | |
| - Padi (kw/ha) | 103.568 | 92.750 | 104.551 | 107.736 | 112.367 | 114.194 | 114.194 |
| - Durian (kg/pohon) | 5.310 | 5.607 | 5.554 | 5.681 | 5.690 | 5.750 | 5.750 |
| - Kopi (kg/ha/th) | 474,79 | 713,45 | 716,09 | 581,54 | 562 | 565 | 565 |
| - Kakao (kg/ha/th) | 141,3 | 131,4 | 206 | 222,94 | 157 | 163 | 163 |



RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN KABUPATEN JOMBANG



INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERTANIAN KABUPATEN JOMBANG

| Kinerja Utama | Indikator Kinerja Utama | Penjelasan/Formulasi Penghitungan | Sumber Data | Penanggung Jawab |
|---|--|---|-------------------------------|---|
| Meningkatnya nilai tambah komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan | Prosentase kontribusi sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan terhadap PDRB | $\frac{\text{PDRB Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan}}{\text{PDRB Total}} \times 100\%$ | BPS | Bidang Perlindungan, Pasca Panen dan Pemasaran |
| Meningkatnya produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan | 1 Produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan : <ul style="list-style-type: none">- Padi- Jagung- Kedelai- Cabe- Tebu | Luas Panen (Ha) x Produktivitas (Kw/Ha) | BPS, Data Statistik Pertanian | Bidang Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan |
| | 2 Produksi komoditas unggulan di kawasan agropolitan : <ul style="list-style-type: none">- Padi- Durian- Kopi- Kakao | Luas Panen (Ha) x Produktivitas (Kw/Ha) | BPS, Data Statistik Pertanian | Bidang Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan |

**KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN JOMBANG**

Ir. HADI PURWANTORO, MSI
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19610623 199403 1 002